



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR

JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

Nomor : B. 1141/BPPMHKP.MKS/TU.140/IV/2026
2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

14 April

Yth. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan kinerja periode triwulan I Tahun 2026 pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja (terlampir).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Balai PPMHKP Makassar



Mohammad Zamrud



LAPORAN KINERJA

BALAI PPMHKP MAKASSAR
TRIWULAN I
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar yang ditetapkan untuk periode triwulan I tahun 2026 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



Makassar, 14 April 2026
Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar

Mohammad Zamrud

AFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	5
1. Visi dan Misi	5
2. Tujuan Strategis	6
3. Sasaran , Indikator dan Kinerja	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
1. Capaian Kinerja	9
2. Analisis dan evaluasi	10
IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	11
IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	20
IK3. Nilai Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di Wilayah Ri Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai) ...	26
IK4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	38
IK5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)	45
IK6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar	55
IK7. Nilai Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	63
IK8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	68
IK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	71
IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	77
IK11. Persentase rencana umum pengadaaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	88
IK12. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar. (Indeks)	97

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	108
2. Rekomendasi	108
3. Tindaklanjuti.....	109

LAMPIRAN

Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

- IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
- IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
- IK3. Nilai Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di Wilayah Ri Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai) ...
- IK4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
- IK5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)
- IK6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar
- IK7. Nilai Penilaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)
- IK8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
- IK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)
- IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)
- IK11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
- IK12. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar. (Indeks)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 113,51 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Pada Triwulan I tahun 2026 ada 12 (dua belas) perjanjian Kinerja, adapun capaian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Realisasi Triwulan I
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	72	76,20
2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	72	88,10
3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	71	74,81
4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	71	0
5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)	82,5	0

6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	77	77,59
7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	86,2	0
8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Persen)	86	100
9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	92,1	0
10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	71,75	78,20
11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	77	100
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)	3.5	3,92

Kinerja Keuangan Balai Pegendalain dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar pagu anggaran tahun 2026 sebsar Rp 21.301.198.000 dan triwulan I tahun 2026 terealisasi sebesar Rp 3.063.439.195 atau 14,65 %.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut

untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas dan Struktur Organisasi Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR
TAHUN 2026



1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Pengendalin dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, 3). Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah Ri Lingkup lingkup Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1).

- Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Makassar.
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan Balai PPMHKP Makassar yang di dukung 1). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar, 2). Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar, 3). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Makassar, 4). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar, 5). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar, 6). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar, 7) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Makassar, 8). Indeks Kepuasan masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar.

1.4 Sistematika dan penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Triwulanan Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;
- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2 Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

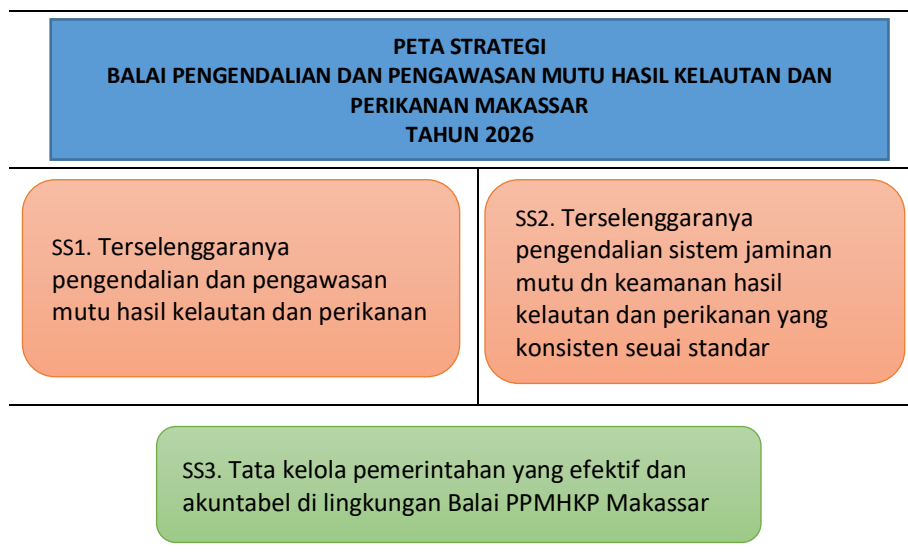
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar |

3.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis maka Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan terget kinerja yang akan dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar pada tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2026. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar pada Triwulan I Tahun 2026 dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,51 (Istimewa) berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerja.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama tahun 2026.



3.2. Analis dan Evaluasi

Capaian kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 2.1
Capaian Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar	-	-	-	125	142,86	72	72	76,2	105,83	105,83
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar	-	-	-	98,1	139,51	72	72	88,1	122,36	122,36
	3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan I Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar	5	4	4	100	100,00	71	71	74,81	105,37	105,37
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar	-	-	-	83,1	121,64	71	0	0	0,00	0,00
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Makassar	81,44	82,23	90,27	90,78	108,60	82,5	0	0	0,00	0,00
	6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar					100,68	77	77	77,59	100,77	100,77
	7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar	98	95,3	87,13	83,8	104,65	86,2	0	0	0,00	0,00
	8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar	65	100	100	100	117,65	86	86	100	116,28	116,28
	9. Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar	89	98,44	96,38	97,16	102,80	92,1	0	0	0,00	0,00
	10. Nilai kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar	86	87,87	86,2	98,37	139,86	71,75	0	78,2	0,00	0,00
	11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)		79,56	78,26	84,34	131,58	77	77	100	129,87	129,87
	12. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	89,8	91,12	3,77	116,96	3,5	3,5	3,92	112,00	112,00

Sasaran Kegiatan 1**Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan**

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar. diperlukan dukungan 3 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 3 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan : 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%) 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%) 3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	1. 72 % 2. 72 % 3. 71

IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar	-	-	-	125	142,86	72	72	76,2	105,83	105,83

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan;
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
3. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
4. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
6. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$$= \frac{81,00 + 70 + 70 + 90}{5}$$

$$= 76.20$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

Catatan :

Untuk realisasi output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026 triwulan I sebesar 76,20 % sedangkan realisasi output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 triwulan I tahun 2025 sebesar 100 %. Mengalami penurunan sebesar 23,8 % yang disebabkan oleh perhitungan capaian realisasi IKU tahun 2026 diperoleh dari perhitungan dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPIB Kapal	5	5	100 %
2	Sertifikasi CBIB	0	0	0
3	Sertifikasi CPIB	0	0	0
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0
5	Sertifikasi CPOIB	0	0	0
6	Sertifikasi CDOIB	0	0	0

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan I tahun 2026 adalah 100 % sehingga capaian kinerja sebesar 138,88 %.

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan I tahun 2026 adalah 76,20 % sehingga capaian kinerja sebesar 105,83 %.

Realisasi Triwulan I tahun 2025 yaitu 100% 2025. karena seluruh permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti sampai dengan terbitnya sertifikat, namun dari segi anggaran dan jumlah output sertifikasi berbeda.

Pada Triwulan I tahun 2026 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CBIB, CPPIB, CPOIB dan CDOIB, namun telah dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan pada unit pembudidaya yang telah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) sebanyak 4 unit dari 7 target yang ditetapkan oleh pusat produksi primer. Adapun output kegiatan tersebut berupa Surat Keterangan Hasil Surveilan (SKHS) telah diterbitkan sebanyak 4 SKHS dan telah disampaikan kepada pelaku usaha. Kegiatan surveilan pada sertifikasi CPIB kapal sebanyak 3 target belum dilaksanakan. Tidak ada program surveilan pada kegiatan sertifikasi untuk pembenihan (CPIB) dan CPPIB.

Adapun Sumberdaya Manusia yang terlibat yaitu :

- Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi CPIB Kapal pada Triwulan I sebanyak 4 orang, yang terdiri atas 4 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Surveilan CBIB pada TW I sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar
- Pada triwulan I tahun 2026 perwakilan Balai PPMHKP Makassar atas nama Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P, Sri Rahayu Setyaningsih S.St.Pi., M.Sc dan Arfiandi S.Pi menerima Sertifikat Apresiasi dari Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) pada Program Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di kapal rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal tahun 2026 sebesar Rp. 75.380.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer. Realisasi anggaran TW I Tahun 2026 sebesar Rp. 8.241.000,- atau sebesar 10,93 %, untuk perjalanan dinas inspeksi CPIB Kapal dan surveilan CBIB. Sedangkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.18.820.000 dan belum ada realisasi pada TW I tahun 2025.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP " penangkapan ikan terukur berbasis kuota " yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP " pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan " yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I yaitu :

- Pada tanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan Walikota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut adalah memperkenalkan tugas dan fungsi UPT BPPMHKP secara kelembagaan serta meminta dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir di kota Makassar.
- Pada tanggal 26 Januari 2026 sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya

- pada penyuluh perikanan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang bertempat di Aula BRPBAPPP Maros.
- Pada tanggal 29 Januari 2026 mengikuti Help Desk Sertifikasi CPPIB, CPOIB dan CDOIB yang dilaksanakan secara Online oleh Pusat Produksi Primer.
 - Pada tanggal 4 Februari 2026 telah diadakan Sharing Session Cara Budidaya Ikan yang Baik dalam rangka peningkatan kapasitas Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu yang bertempat di aula BPPMHKP Makassar.
 - Pada tanggal 5 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Sertifikasi CPIB Kapal Melalui Portal SIAPMUTU Versi 1.0.3 – 2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar yang diikuti oleh pengguna layanan BPPMHKP Makassar.
 - Pada tanggal 6 Februari 2026 mengikuti kegiatan Help desk Koordinasi CPIB 2026 Wilayah 2 yang dilaksanakan secara online oleh Pusat Produksi Primer.
 - Pada tanggal 26 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Pengisian ceklist CPIB Kapal Melalui Portal SIAPMUTU Versi 1.0.3 – 2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar
 - Pada tanggal 2-4 Maret 2026 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar an. Sri Rahayu Setyaningsih S.St.Pi.,M.Sc dan Arfiandi S.Pi mengikuti kegiatan Training Of Trainer (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) yang diselenggarakan oleh BPPSDMKP yang bekerja sama dengan BPPMHKP dan DJPT yang dilaksanakan secara online.
 - Pada tanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPI Paotere. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kota Makassar, Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar yang dihadiri oleh 60 orang nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyadartahuan kepada nelayan tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan Balai PPMHKP Makassar terhadap program Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi modern, produktif dan terintegrasi.

Hasil Tindakanlanjut rekomendasi rencana tindakanlanjut sebelumnya

Pada tanggal 26 Januari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya pada penyuluh perikanan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang bertempat di Aula BRPBAPPP Maros.

Akar Masalah

Komitmen pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi penjaminan mutu hulu masih kurang.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, untuk melakukan pendekatan terhadap pelaku usaha guna peningkatan komitmen



Dokumentasi Kegiatan Audensi dengan Walikota Makassar



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Indikator Penilaian CBIB
sebagai Instrumen Peningkatan kualitas dan keamanan hasil
budidaya



Dokumentasi kegiatan sosialisasi sertifikasi CPIB Kapal melalui
Portal Siapmutu Versi 1.0.3 – 2025.12.08

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar	-	-	-	98,1	139,51	72	72	88,1	122,36	122,36

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan I 2026 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Produk)
3. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) pada unit distribusi lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
4. Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Surveilien HACCP)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.

CARA PENGUKURAN

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2026 yaitu :

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B+C}{xn} \\ &= \frac{93,75+90,56+80}{3} \\ &= 88,10 \%\end{aligned}$$

Dimana

%X =	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A =	Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B =	Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
C =	Persentase Surak Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan pada unit supplier

Catatan:

Data variable perhitungan diperoleh dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan I tahun 2026 terealisasi sebesar 88,10 %, dari target 72 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 122,36 %, dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 115,08 %.

Adapun jumlah sertifikat yang diterbitkan pada Triwulan I sebagai berikut:

1. HACCP sejumlah 43 ruang lingkup sertifikat.
2. SKP sejumlah 22 ruang lingkup sertifikat.
3. SPDI sejumlah 1 ruang lingkup sertifikat.

Pelaksanaan kegiatan SKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (mengatur persyaratan HACCP) serta sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (surveilien HACCP) yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan konsistensi dalam Penerapan System Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan I telah dilaksanakan surveilien HACCP dan pengambilan sampel UJI sebanyak 93 UPI.

Kegiatan pendukung lainnya yang telah dilaksanakan :

1. Pada tanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan Walikota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut adalah memperkenalkan tugas dan fungsi UPT BPPMHKP secara kelembagaan serta meminta dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir di kota Makassar.
2. Pada tanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPI Paotere. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar, Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar yang dihadiri oleh 60 orang nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan

penyadartahuan kepada nelayan tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan Balai PPMHKP Makassar terhadap program Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi modern, produktif dan terintegrasi.

3. Pada tanggal 5 Maret 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi narasumber pada Kegiatan Pelatihan On Line Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Koperasi Sektor Riil Transformasi SDM dan Inovasi Menuju Koperasi Berdaya Saing yang dilaksanakan oleh Kedeputan Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi. Pada kegiatan tersebut Balai PPMHKP Makassar membawakan materi Akselerasi Penerbitan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan Untuk Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan Berbasis Koperasi.
4. Pada tanggal 30 Januari 2026 telah dilakukan rapat persiapan pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) PB Umku dan tindak lanjut PP 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kegiatan ini diadakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen, BPPMHKP KKP;
5. Pada tanggal 11 Maret 2026 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Verifikator Layanan Sistem Distribusi Ikan Online (DISNILINE), kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Mutu pasca Panen, BPPMHKP KKP.

Kegiatan ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu diantaranya untuk kegiatan sertifikasi HACCP sebanyak 15 orang dan kegiatan sertifikasi SKP sebanyak 16 orang serta Sertifikasi SPDI sebanyak 3 orang.

Realisasi Anggaran kegiatan pasca panen Tahun 2026 :

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran Awal Rp	Pagu Anggaran setelah revisi Rp	Efisiensi Rp	Realisasi Rp	Sisa Anggaran Rp
a. 3989.PDC.002. A. Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan	30.000.000	12.231.000	17.769.000	1.290.000	10.941.000

b. 3989.PDC.002. B. Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit Pengolahan Ikanskala UMKM dan Menengah Besa	48.125.000	19.689.000	28.436.000	4.954.000	14.735.000
c. 3989.PDC.002. C. Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	68.243.000	68.243.000	-	33.459.000	34.784.000
d. 3989.QIC.003. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (SMKHP)	5.000.000	3.500.000	1.500.000	0	3.500.000
TOTAL	151.368.000	103.663.000	47.705.000	39.703.000	63.960.000

Pada Tahun 2026 pagu anggaran sebesar RP. 151.368.000,- setelah dilakukan efisiensi sebesar RP. 103.663.000,- dan realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 39.703.000,-, dibandingkan dengan Tahun 2025 pagu sebesar Rp. 58.196.000 dan terealisasi Rp. 22.365.000,- atau 38,43%.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2026, terkait teknis pelaksanaan Sertifikasi SKP yang lebih efisien dan efektif.

Akar Masalah

Belum terlaksananya Sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sulawesi Selatan

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Koordinasi dengan UPT DJPT KKP terkait percepatan pelaksanaan sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Selatan.



Dokumentasi kegiatan Inspeksi Konsistensi Penerapan HACCP di UPI



Dokumentasi kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih

IK.3. Nilai Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan I Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar	5	4	4	100	100,00	71	71	74,81	105,37	105,37

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu :

- I. Program Prioritas Kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana pada kegiatan pengawasan mutu domestik Balai PPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- II. Program Prioritas Ketiga KKP yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu Balai PPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan stakeholder dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain :

1. Pengawasan Mutu: Melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Dalam hal ini, Balai PPMHKP Makassar mengikuti kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan pengawasan mutu impor tahun 2025 dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu perikanan domestik tahun 2026 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat dan Pengawasan Mutu Impor yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen pada tanggal 29 Januari 2026 yang dihadiri oleh seluruh UPT BPPMHKP secara virtual. Secara garis besar pada kegiatan ini Pusat Mutu Pasca Panen melakukan review kegiatan tahun sebelumnya dan berkoordinasi untuk menyamakan persepsi antara Pusat dan UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebesar 71% sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik rencananya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester dan untuk lokasi kegiatan di Pasar Tradisional, Pasar Modern, Pelabuhan atau TPI, dan UMKM Suplier MBG.

Pada triwulan I tahun 2026 berdasarkan Surat dari Pusat Mutu Pasca Panen tanggal 12 Februari 2026 perihal Pelaksanaan Giat Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kabupaten Maros dengan lokus pengawasan yaitu TPI Labuang dan Poklalsar UMKM Cahaya Bandeng.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Perikanan Domestik Tahun 2026, Pengawasan Mutu Impor dan Review Kegiatan Tahun 2025	29 Januari 2026	Pusat Mutu Pasca Panen BPPMHKP
2.	Koordinasi Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros	9 Februari 2026	Balai PPMHKP Makassar
3.	Kunjungan lapangan ke lokasi pengawasan, pengisian check list penilaian sarana, prasarana, sanitasi & hygiene dan pengambilan sampel uji	17 Februari 2026	Balai PPMHKP Makassar

Sampel uji yang diambil pada Lokasi TPI Labuang terdapat 5 (lima) sampel yaitu Cumi-cumi segar, Bandeng segar, Katamba segar, Layang segar dan Udang Vannamei segar sedangkan di Poklalsar UMKM Cahaya Bandeng diambil 2 (dua) sampel produk yaitu Bandeng segar dan Bandeng Tanpa Duri yang selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Balai PPMHKP Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, dan Formalin dan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sudah sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene di TPI Labuang yang memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana lokasi berada ditempat bebas pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat, saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu, transportasi pengangkutan produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait

cara penanganan ikan yang baik sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga sedangkan di Poklhasar UMKM Cahaya Bandeng memperoleh nilai dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik sektor produksi pasca panen di wilayah RI diperoleh dari hasil penghitungan persentase nilai sarana & prasarana sebesar 60% dan nilai pengujian produk sebesar 40% dengan formula :

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

$$(60\% \times 87.5) + (40\% \times 97) = \mathbf{91,3}$$

Sedangkan nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan bahan berbahaya dan monitoring cemaran lingkungan perairan sektor produksi primer di wilayah RI diperoleh dari hasil penghitungan jumlah pengujian yang dilakukan dibagi jumlah pengujian yang wajib dilakukan dikali 100 dengan formula :

$$X = \frac{(A1:A2) + (B1:B2)}{2} \times 100 \%$$

Dimana :

X : Hasil akhir

A1 : Hasil pengujian yang memenuhi persyaratan

A2 : Jumlah pengujian yang dilakukan

B1 : Skor jumlah pengujian

B2 : Nilai total skor

$$X = \frac{(5:6) + (1:3)}{2} \times 100 \%$$

$$X = \frac{83.33 + 33.33}{2} \times 100 \%$$

$$X = \frac{116.66}{2} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{58,33}$$

Untuk indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan formula :

$$X = \frac{A + B}{2} \times 100 \%$$

Dimana :

X : nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

A : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen di wilayah RI

$$X = \frac{58.33 + 91.3}{2} \times 100 \%$$

$$X = \frac{149.63}{2} \times 100 \%$$

$$= 74.81$$

Pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar mendapatkan nilai 74.81 atau sebesar 105 % jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025

Untuk indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :

1. Hasil Perikanan impor yang diawasi mutunya
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan
3. Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan

Alokasi anggaran kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2026 sebesar Rp.7.000.000,- bersumber dari dana PNBK yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai PPMHKP Makassar Tahun Anggaran 2026. Walaupun terdapat kebijakan pemerintah pusat yang masih melakukan blokir atau penghematan anggaran diawal tahun 2026 sebesar Rp. 3.972.000 tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Pada pelaksanaan

kegiatan di triwulan I tahun 2026 ini anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 1.640.000 atau sebesar 54.16%

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 13 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros, dan Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Maros.

I. Hasil Perikanan Impor Yang Diawasi Mutunya

Kegiatan pengawasan mutu impor dilakukan untuk memastikan produk yang masuk ke dalam negeri aman dikonsumsi dan memenuhi standar sanitasi. Balai PPMHKP Makassar memastikan produk yang masuk tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2026 tentang keamanan pangan, Pemasok ikan dari luar negeri wajib teregistrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bahan baku yang masuk memenuhi standar hygiene.

Pengawasan mutu impor juga dilakukan melalui uji laboratorium terhadap cemaran mikroba, residu, dan keamanan pangan. Pada triwulan I tahun 2026 kegiatan pengawasan mutu impor belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2026.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan

Pada triwulan I tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 4 (empat) Unit Pengolahan Ikan yang melakukan kegiatan ekspor produk hasil kelautan dan perikanan, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama UPI	Waktu Pelaksanaan	Petugas
1.	CV. Anugrah Bahari Mandiri	6 Februari 2026	-Waode Suharni, S.Pi -Kamaruddin, S.P,M.
2.	CV. Mitra Sejahtera	24 Februari 2026	-Patmawati, S.St.Pi -Andi Muhammad Haedar
3.	PT. Asia Sejahtera Mina TBK	3 Maret 2026	-Muhammad Irfan Rais, S.Pi -Suprianto, A.Md.Pi.,S.P
4.	PT. Global Maju Pratama	13 Maret 2026	-Mohammad Zamrud, S.Pi.,M.P -Taufiq, S.PKP

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan data yang tersedia pada aplikasi SIAP Mutu dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan Balai PPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 25.000.000 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 15.000.000 atau sekitar 60%.

Pada Triwulan I tahun 2026, anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.460.000 atau sekitar 14,6%. Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025, kondisi tersebut berbeda karena pada tahun 2025 terjadi blokir anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui *automatic adjustment*.

III. Pengawasan Cemaran Bahan Berbahaya Di Lingkungan Perairan

Pada triwulan I tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan dengan lokasi kegiatan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring Residu Cemaran Bahan Berbahaya di Perairan Laut Zona PIT dan Perairan Umum WPP-NRI Perairan Darat	2 Februari 2026	Pusat Mutu Primer
2.	Kunjungan lapangan ke lokasi pengawasan bahan berbahaya dan monitoring cemaran lingkungan perairan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai	5-6 Maret 2026	Balai PPMHKP Makassar

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan target yang disampaikan pada saat rapat persiapan kegiatan pada tanggal 2 Februari 2026 bersama Pusat Mutu Primer yaitu sebanyak 1 (satu) lokasi di TPI Lappa, Kabupaten Sinjai.

Monitoring cemaran perairan merupakan salah kegiatan pendukung IKU utama program prioritas kedua Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang dikonsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun hayati laut dan logam berat dan untuk SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2026 sebanyak 4 orang Inspektur Mutu.

Kegiatan ini dilaksanakan secara onsite dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.500.000, jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp. 27.500.000 atau sekitar 87%, pada triwulan I tahun 2026 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.644.000 atau sekitar 45.72%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan I tahun 2025, kondisi tersebut berbeda karena pada tahun 2025 terjadi blokir anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui *automatic adjustment*.

Tabel Data Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Nama Kegiatan	Pagu	Efisiensi	Realisasi
1.	3989.QIA.001. Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya	Rp.7.000.000	Rp. 3.972.000	Rp. 1.640.000 (54.16 %)
2.	3989.QIA.003. Hasil Perikanan impor yang diawasi mutunya	Rp.5.000.000	Rp. 3.000.000	0
3.	3989.QIC.003. Jumlah Produksi Primer yang konsisten menerapkan Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Rp.10.000.000	Rp. 2.924.000	Rp. 1.460.000 (20.63 %)
4.	3989.QIA.002. Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan	Rp. 37.500.000	Rp. 18.594.000	Rp. 8.644.500 (45.72 %)

Hasil Tindaklanjuti rekomendasi rencana tindaklanjuti sebelumnya

1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros pada tanggal 9 Februari 2026.

2. Penyampaian laporan hasil uji sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut hari natal dan tahun baru ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros pada tanggal 5 Februari 2026.

Akar Masalah

Potensi masalah :

- Pengawasan Mutu Domestik : Belum optimalnya kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu domestic
- Pengawasan Mutu Impor : Belum dilaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di semester II tahun 2026.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maros



Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Mutu
Domestik di TPI Labuang dan Pklahsar UMKM Cahaya Bandeng



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerbitan
SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bahan Berbahaya dan
Monitoring Cemaran Lingkungan Perairan di TPI Lappa Kab. Sinjai

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 1 Indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 1 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar 1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapan Lingkup Balai PPMHKP	1. 71 Nilai

IK4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar	-	-	-	83,1	121,64	71	0	0	0,00	0,00

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar diperoleh dari rata-rata dari nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS), nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017, dan nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP pada Balai PPMHKP Makassar.

Nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi.

SNI ISO/IEC 17025:2017 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling

pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (SNI ISO/IEC 17025:2017) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

SNI ISO/IEC 17020:2012 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Untuk menghitung nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu maka digunakan rumus :

$$X = \frac{A + B + C}{3} \times 100\%$$

Dimana :

- X= Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Makassar
A= Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012
B= Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017
C= Presentase Nilai Penerapan Quality Management System (QMS)

Pada Triwulan I Tahun 2026, Pusat Manajemen Mutu belum melakukan verifikasi penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012, verifikasi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, maupun verifikasi penerapan Quality Management System (QMS) di Balai PPMHKP Makassar sehingga belum ada nilai realisasi yang dapat disampaikan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 berupa surveilan penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan. Selama Triwulan I Tahun 2026 terdapat 93 kali surveilan penerapan HACCP yang terdiri dari :

1. Bulan Januari sebanyak 35 kali
2. Bulan Februari sebanyak 35 kali
3. Bulan Maret sebanyak 23 kali

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 berupa kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai PPMHKP Makassar. Selama Triwulan I Tahun 2026, terdapat 2.846 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Bulan Januari sebanyak 1.007 kali
2. Bulan Februari sebanyak 1.316 kali
3. Bulan Maret sebanyak 523 kali

Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini dilaksanakan oleh 29 orang mulai dari Manager Puncak, inspektur mutu, hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan

sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar sebesar Rp. 86.000.000 yang mendapatkan efisiensi sebesar Rp. 38.750.000 sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 47.250.000. Pada Triwulan I tahun 2026 belum ada anggaran yang terealisasi karena belum ada kegiatan akreditasi, uji profisiensi, dan iuran tahunan sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu integrasi.

Jika dibandingkan tahun 2025 Indikator ini didukung 2 kegiatan yaitu :

- 1) Pemenuhan sistem manajemen mutu dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.500.000, tpada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi .
- 2) Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium dengan pagu anggaran sebesar Rp 36.537.000, pada triwulan I ttahun 2025 terealisasi sebsar Rp 1.500.000.

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi laboratorium diantaranya :

- a. 14/01/2026 Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium oleh Labmania
- b. 21/01/2026 Pengenalan ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen oleh Balai Besar Uji Standar KHIT
- c. 21/01/2026 Implementasi ISO 11133:2014/AMD2:2020 untuk Jaminan Kualitas Media Mikrobiologi oleh Maja Sains
- d. 22/01/2026 Webinar Salmonella Detection Based on ISO 6579 oleh DKSH
- e. 05/02/2026 Webinar ISO 6887 Preparation for microbiological examination oleh JLPPI BPOM
- f. 18/02/2026 Detection and Enumeration of Listeria oleh DKSH

- g. 24/02/2026 Basic & Teknik Analisa dengan Instrument AAS oleh Maja Sains
- h. 12/03/2026 Analisa Kualitatif & Kuantitatif dengan FITR oleh Maja Sains

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi lembaga inspeksi diantaranya :

- a. 29/01/2026 Evaluasi Pelaksanaan Surveilans HACCP (sharing session)
- b. 03/03/2026 Harmonisasi Daftar Periksa Inspeksi Rumpun Laut oleh UNIDO – GQSP

Pada Triwulan I tahun 2026 terdapat kunjungan praktik kerja lapang di Laboratorium Balai PPMHKP Makassar oleh siswa/mahasiswa sebagai berikut :

- a. Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 10 orang
- b. Prodi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 5 orang
- c. Prodi Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan Fakultas Vokasi Unhas sebanyak 4 orang
- d. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unhas sebanyak 3 orang
- e. Jurusan Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 1 orang

Selama Triwulan I tahun 2026, terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang melaksanakan magang berdasarkan program pemagangan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program magang ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium.

Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana tindakan lanjut sebelumnya

Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi analisis laboratorium untuk ruang lingkup yang akan ditambahkan sebagai laboratorium rujukan wilayah Timur Indonesia berupa pelatihan *Listeria monocytogenes* pada tanggal 18 Februari 2026 oleh DKSH.

Akar Masalah

Sebagai laboratorium pengujian dan juga sebagai lembaga inspeksi yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional, Balai PPMHKP Makassar wajib membayar biaya iuran tahunan sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Potensi masalah terjadi dengan adanya kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia yang memangkas banyak pos anggaran pemerintah. Selain itu pos anggaran iuran tahunan di DIPA Balai PPMHKP Makassar merupakan anggaran yang bersumber dari PNPB yang memerlukan surat penetapan Maksimum Pencairan (MP) PNPB dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Jika tidak segera dibayarkan paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahun maka status akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 dapat dibekukan dan diberikan denda terhadap keterlambatan pembayaran.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Melakukan koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional dan bagian keuangan untuk mengakselerasi pembayaran iuran tahunan KAN untuk tahun 2026.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Surveilans HACCP

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 8 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 8 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar lingna dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Makassar	1. 82,5 Indeks
2. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar	2. 77 Nilai
3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Makassar	3. 86,2 Nilai
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar	4. 86 %
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar	5. 92,1 Nilai
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai PPMHKP Makassar	6. 71,75 Nilai
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Makassar	7. 77 Persen
8. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar	8. 3,5 Indeks

IK5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Makassar	81,44	82,23	90,27	90,78	108,60	82,5	0	0	0,00	0,00

Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
6. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Target Tahunan IP ASN Tahun 2026 adalah 82,5 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 75 dan Semester II nilai target 82,5

Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan I 2026 belum terealisasi, menunggu sistem aplikasi siap operasional

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai PPMHKP Makassar berupaya melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

Pemanfaatan sumber daya internal :

1. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dengan narasumber jabatan Inspektur Mutu Balai PPMHKP Makassar.
2. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025 dengan narasumber penelaah teknis kebijakan.

3. Sharing session Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
4. Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak tahap hulu
5. Morning briefing petugas pelayanan dan inspektur mutu sebagai bagian dari implementasi core values ASN Berakhlak sebelum memulai aktivitas kerja
6. Briefing Pagi Mengidentifikasi kendala terkait kelancaran Tugas dan Fungsi Dukungan Manajerial Tahun 2026 oleh Plt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM dukungan Manajerial
7. Briefing Pagi Tim Dukungan Manajerial terkait tindaklanjut indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) tahun 2026 oleh Plt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM dukungan Manajerial.

Optimalisasi teknologi (tabel terlampir)

1. Webinar Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Melalui Aplikasi CoreTax
2. Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium
3. Pelatihan Tech Savvy pada ASN kelautan dan Perikanan
4. Pelatihan Pengantar analisis laporan keuangan
5. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025
6. Diseminasi Pengenalan ISO 19011:2018 - Pedoman Audit Sistem Manajemen
7. Webinar Salmonella Detection Based on ISO 6579 Standards
8. Webinar Panduan Pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax
9. Sosialisasi Indikator Penilaian CBIB
10. Webinar Refreshment ISO 6887
11. Sosialisasi Sertifikasi kompetensi okupasi Ahli Budidaya Perairan
12. Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi
13. Bimtek Pengelolaan SIKN dan JIKN tahun 2026
14. Webinar Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Badan beserta Koreksi Fiskal
15. Webinar Teknis Pembuatan Media Mikrobiologi

16. Webinar Detection and Enumeration of Listeria
17. Bimtek Teknis Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan
18. Webinar Kesehatan Aktivitas fisik yang aman dan menyehatkan selama kegiatan kantor
19. Webinar Basic & Teknik Analisa dengan Instrumen AAS
20. E-Learning Dasar-Dasar Keuangan
21. Pelatihan pemanfaatan media sosial dan edukasi publik oleh ASN
22. Pelatihan Dasar dasar keuangan
23. Microelearning Membangun Komitmen Hijau ASN
24. Webinar Panduan Mudah Pelaporan SPT Tahunan Badan Untuk Sektor Manufaktur
25. Webinar Menjamin Mutu dan Keamanan Produk Perikanan Melalui Penerapan SNI Pakan Ikan
26. Elearning Dasar dasar keuangan.

Perencanaan strategis dan kolaborasi :

1. Sosialisasi Penilaian CBIB kepada Penyuluh Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan bersama dengan Balai PPMHKP Makassar.
2. Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal melalui Aplikasi SIAP MUTU yang dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Pelabuhan Perikanan Untia, Satwas PSDKP Makassar, penyuluh perikanan, Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Balai PPMHKP Makassar sebagai narasumber.
3. Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih, kolaborasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar dan Balai PPMHKP Makassar sebagai narasumber.
4. Forum Desa Bisa Ekspor Chapter Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dan BPPMHKP Makassar sebagai narasumber dan peserta.
5. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros melakukan kunjungan ke Laboratorium Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Makassar untuk melakukan kunjungan untuk

melihat proses pengujian laboratorium bidang mikrobiologi dan berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengujian laboratorium mutu dan keamanan hasil perikanan

6. Penandatanganan Kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dengan Balai PPMHKP Makassar

Balai PPMHKP Makassar Terima Penghargaan Dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sendiri merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan yang dilaksanakan akan menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BPPMHKP Makassar, meliputi:

Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan S-3 = -

Pendidikan S-2 :

S2 Keahlian : 7 orang :

1. Ir Habrin Yake, M.M
2. Andi Rahmani Dj, ST.,M.Si
3. Kamaruddin, S.P, M.S
4. Kamdani, S.Pi, M.M
5. Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P

6. Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
7. Fatima Tayang, S.St.Pi, MM

S2 Pelaksana : 1 orang

1. Rahma Tenri Aben

Pendidikan S-1 /D-IV :

S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang

1. Waode Suharni, S.Pi
2. Bakhtiar, S.Pi
3. Moh. Fahri, S. Pi
4. Wara Zakaria Sapan, A.PI
5. Muhammad Irfan Rais, S.Pi
6. Patmawati M, S.St.Pi
7. Erlina Kadang, S.Kom
8. Junaedi, S.E
9. Muzakkir, S.Pi
10. Taufiq, S.PKP
11. Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi
12. Suprianto, A.Md.Pi., S.Pi
13. S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
14. Karwit, S.Pi

S-1 /D-IV Keterampilan : 1 orang

1. Arfiandi, S.Pi

S-1 /D-IV Pelaksana : 5 orang

1. Darmawan, SP
2. Hapi, SAP
3. Muhammad Arman, SAP
4. Arniyanti, A.Md, SAP
5. Oktovianus, SAP

Pendidikan D-III ;

D-III Keterampilan : 4 orang

1. Idawati Barung
2. Rosdiana
3. Zulyana Arlina
4. Ardiana

D-III Pelaksana : 1 orang

1. Jumhana

Pendidikan SLTA :

SLTA Keterampilan : 2 orang

1. Erwin Wijaya

2. Andi Muhammad Haedar

SLTA Pelaksana : 4 orang

1. Halim
2. Niza Mahaputri Zainal
3. Irma Syam
4. Muh. Arfah

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Full Waktu dan Paruh Waktu)

Pendidikan S-3 = -

Pendidikan S-2 = -

Pendidikan S-1 =

S-1 / D-IV Pelaksana : 5 orang

1. Syahribulan, SE
2. Aisyah Nur, S.Kom
3. Syumra Hatima Ma'mun, S.Si.
4. Iqbal Harun Pratama, S. Pi
5. Andi Arfini, S.Kom

Pendidikan D-III = 5 orang

1. Dedi Junaidi, A.Md.Pi
2. Kaharuddin, A.Md.Pi
3. Mamak Tamsil, A.Md
4. Agus Alim, A.Md.Pi
5. Andi Rahman, A.Md.Pi

Pendidikan SLTA = 7 orang

1. Athul Azwar
2. Tri Saputradin Madiara
3. Randi
4. Nurwahidah
5. Saharuddin
6. Hamka
7. Arsyad

Pendidikan SMP = 1 orang

1. Junaedi Saleh

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksima I	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BPPMHKP Makassar pada tahun 2026 adalah BAIK dan SANGAT BAIK

1. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai PPMHKP Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan menunggu sistem aplikasi siap operasional

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai PPMHKP Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 56 orang yang terbagi atas 2 kategori yaitu PNS dan PPPK, pegawai mutasi masuk sebanyak 1 orang yang UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Ternate an Muh Arfah dan penambahan PPPK full waktu dan PPPK paruh waktu sebanyak 18 Orang

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	3
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	10
15.	PPPK Full waktu	12
16.	PPPK Paruh waktu	6
	Total	56

Anggaran yang mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

1. Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
2. Anggaran setelah blokir Rp. 0

Triwulan I

1. Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp.0
2. Realisasi Rp. 0

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2026 :

Anggaran Awal :

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 7.406.000
2. Gaji dan Tunjangan : Rp. 7.058.809.000
3. Pembinaan Kepegawaian : Rp. 50.000.000
4. Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 267.200.000

Realisasi Triwulan I

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 4.955.800
2. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.204.499.498
3. Pembinaan Kepegawaian : Rp.0
4. Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 60.208.000

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita yaitu manajemen talenta dengan pemetaan potensi dan kompetensi menggunakan sistem digital seperti profilin ASN untuk mengetahui kemampuan, minat dan rekam jejak pegawai secara objektif. Manajemen talenta adalah cara untuk memastikan bahwa birokrasi menjadi lebih profesional, efisien dan mampu menjalankan seluruh program asta cita dengan baik.

Pemanfaatan kompetensi ASN mencakup aspek yang saling terhubung, mulai dari penempatan posisi hingga pengembangan karier. Menempatkan ASN pada jabatan atau tugas sesuai keahlian/potensi yang dimiliki dan menggunakan data profil kompetensi seperti manajemen talenta sebagai dasar pengambilan Keputusan.

Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana tindakan lanjut sebelumnya

1. Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan Sertifikat dan surat tugas pada Triwulan I.
2. Pelatihan dengan pemanfaatan sumberdaya internal telah dilakukan pada tanggal 4 Februari 2026 tentang Peningkatan kompetensi IMUT dan AIMUT terkait CBIB dengan narasumber ibu Patmawati M, S.St.Pi

3. Evaluasi pasca pelatihan :

- sistem manajemen mutu (Pengenalan ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen untuk Jaminan Kualitas Media Mikrobiologi) telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2026
- Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Gratifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026

Akar Masalah

- Kurangnya kedisiplinan dalam kehadiran pegawai terlihat dari pegawai yang terlambat datang di jam kantor yang telah ditentukan
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyASN tepat waktu perlu ditingkatkan

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Pegawai yang terlambat akumulasi maksimal 240 menit akan dilakukan panggilan tatap muka
- TIM Kepegawaian akan mengingatkan kepada pegawai untuk disiplin mengentry data sertifikat pada Whatapp group kantor.

IK6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar	-	-	-	-	100,68	77	77	77,59	100,77	100,77

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang

telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PANRB kepada unit kerja instansi pemerintah yang berhasil menyelenggarakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, WBBM berfokus pada pencegahan korupsi (KKN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima;

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Balai PPMHKP) Makassar yang dulu masih bernama Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018, dan tahun 2019 dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1025 Tahun 2019. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai PPMHKP Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai PPMHKP Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Nomor B.656/BPPMHKP.1/OT.730/ II/2026 tanggal 19 Februari

2026 Hal Penilaian Kembali Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPPMHKP Tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar bersama 5 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang dilaksanakan penilaian kembali unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPMHKP (pasca reorganisasi) oleh Tim Penilai Internal KKP Tahun 2025-2026;

Berdasarkan surat Sekretaris Badan PPMHKP Nomor B.1030/BPPMHKP.1/ KP.750/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 Hal Penilaian Kembali Rencana Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar diusulkan sebagai unit kerja memperoleh predikat zona integritas menuju WBBM dari Menteri PAN RB;

Target indikator kinerja bersifat tahunan, namun pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan pengukuran secara mandiri, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
1.	Nilai Total Komponen Pengungkit	41,75
2.	Nilai Total Komponen Hasil	35,84
	Nilai Evaluasi Zona Integritas	77,59

Uraian penilaian zona integritas triwulan I tahun 2026 disajikan pada gambar matrik berikut ini.

No.	Uraian	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Persentase Nilai Min
A.	PENGUNGKIT	41,75	53,75%	41,75	53,75%	53,75%
1.	MANAJEMEN PENGUNJUKAN	8,00	100%	8,00	100%	100%
2.	MANAJEMEN KESELAMATAN	7,00	100%	7,00	100%	100%
3.	PENGUNJUKAN SISTEM MANAJEMEN KEMERDEKAAN	10,00	100%	10,00	100%	100%
4.	PENGUNJUKAN MANAJEMEN KEMERDEKAAN	10,00	100%	10,00	100%	100%
5.	PENGUNJUKAN MANAJEMEN KEMERDEKAAN	10,00	100%	10,00	100%	100%
6.	PENGUNJUKAN MANAJEMEN KEMERDEKAAN	10,00	100%	10,00	100%	100%
B.	HASIL	35,84	45,84%	35,84	45,84%	45,84%
1.	INDIKATOR YANG BERHUBUNG DENGAN KEMERDEKAAN	15,00	100%	15,00	100%	100%
2.	Indikator yang Berhubungan dengan KEMERDEKAAN	15,00	100%	15,00	100%	100%
3.	Indikator yang Berhubungan dengan KEMERDEKAAN	5,00	100%	5,00	100%	100%
C.	POLAKU YANG BERHUBUNG DENGAN KEMERDEKAAN	15,84	100%	15,84	100%	100%
1.	Indikator yang Berhubungan dengan KEMERDEKAAN	15,84	100%	15,84	100%	100%
2.	Indikator yang Berhubungan dengan KEMERDEKAAN	15,84	100%	15,84	100%	100%
D.	TOTAL NILAI	77,59	100%	77,59	100%	100%

Jika dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2025 yang realisasinya 0, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai Zona Integritas	
		Triwulan I Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026
1.	Nilai Total Komponen Pengungkit	-	41,75
2.	Total Nilai Komponen Hasil	-	35,84
	Nilai Evaluasi Zona Integritas	-	77,59

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud implementasi zona integritas WBK pada Balai PPMHKP Makassar, diantaranya adalah :

- Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan ruang tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster pengelolaan pengaduan;
- Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala PPMHKP Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
- Pada apel pagi tanggal 5 Januari 2026, dirangkaikan dengan seremoni penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan I, II dan III periode semester II tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026;
- Guna mendukung penerapan nilai-nilai integritas, pada tanggal 4 Februari 2026 dilaksanakan sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber Penanggung Jawab Unsur V (Penguatan Pengawasan) yang diikuti oleh seluruh pegawai secara hibrid (tatap muka dan zoom meeting);
- Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta

memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;

- (f) Pada tanggal 23 Februari 2026 dilakukan verifikasi dan validasi dokumen penerapan WBK unsur V (Penguatan Pengawasan);
- (g) Tanggal 24 Februari 2026 dilakukan rapat pembahasan pemenuhan dokumen penerapan zona integritas WBK yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar dan diikuti oleh seluruh tim pembangunan zona integritas WBK, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi dokumen penerapan WBK unsur III (Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur);
- (h) Pada tanggal 25 Februari 2026 telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi dokumen penerapan zona integritas WBK untuk unsur IV (Penguatan Akuntabilitas) dan unsur V (Penguatan Pengawasan);
- (i) Dalam upaya mendukung konsistensi penerapan WBK pada Balai PPMHKP Makassar, pada tanggal 26 Februari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Ketua KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber Plt. Balai PPMHKP Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai
- (j) Pada tanggal 26 Februari 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur I (Manajemen Perubahan);
- (k) Tanggal 26 Februari 2026 dilakukan briefing kepada petugas pelayanan dan Inspektur Mutu lingkup Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan arahan, meningkatkan motivasi kerja bagi petugas pelayanan dan Inspektur Mutu serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat petugas pelayanan dan Inspektur Mutu terjalin dengan baik guna mendukung penacapaian target kinerja organisasi;
- (l) Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan diadakan briefing adalah untuk meningkatkan pemahaman, menyampaikan regulasi terkini, memberikan arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;

- (m) Sebagai salah satu wujud penerapan nilai integritas, dalam momen peringatan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah menerbitkan surat kepada instansi terkait (stakeholder), dan nota penyampaian dinas kepada seluruh pegawai Balai PPMHKP Makassar, yang substansinya adalah dalam upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi;
- (n) Pada tanggal 12 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur II (Penataan Tatalaksana);
- (o) Tanggal 16 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK untuk unsur VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);
- (p) Pemenuhan kewajiban LHKPN untuk pegawai wajib lapor LHKPN sebanyak 6 pegawai dan pemenuhan kewajiban melaporkan pajak tahunan melalui aplikasi Coretax bagi seluruh pegawai yang memiliki NPWP;
- (q) Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.91/MEN-SJ/HK.410/II/2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai PPMHKP Makassar berkomitmen dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, tertib dan indah sekaligus mempresentasikan tanggung jawab Balai PPMHKP Makassar dalam menjaga kelestarian sumberdaya yang dimiliki.

Sejalan dengan hal tersebut, Agen Perubahan pada Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI, dengan aktivitas :

- (1) Menginisiasi kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kerja;
- (2) Penataan ruang kerja pegawai dan ruang pelayanan;
- (3) Kampanye hemat energi di lingkungan kantor;
- (4) Penataan lingkungan kerja yang rapi dan sehat;
- (5) Pengelolaan sampah dengan pemilahan jenis sampah;
- (6) Penerapan keselamatan kerja (penyediaan alat pemadam kebakaran dan Kotak P3K);
- (7) Menjaga keamanan kantor.

Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :

- (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- (3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
- (4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;
- (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai PPMHKP Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ASN (PNS 37 orang, PPPK 12 orang, dan PPPK Paruh Waktu 6 orang), serta pegawai non ASN 5 orang;

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2026 sebesar Rp. 17.573.000,-, (WA.3987.EBA.962.051.0C. Layanan rumah tangga dan perlengkapan), sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.415.000,- atau 8,05%, yang digunakan untuk biaya pengadaan alat tulis kantor dan supplies komputer, biaya transpor urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta biaya transpor kegiatan pimpinan. Pada tahun 2025, indikator kinerja ini tidak mendapatkan alokasi anggaran, anggaran yang semula Rp. 12.489.000,- dilakukan efisiensi secara keseluruhan.

Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai PPMHKP Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :

- (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (b) Mencegah terjadinya korupsi;
- (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
- (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

- Nota Dinas Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar Nomor B.598/BPPMHKP.MKS/TU.330/II/2026 tanggal 19 Februari 2026, Hal Dokumen Penerapan WBK;
- Himbauan Ketua Tim WBK kepada seluruh penanggung jawab unsur terkait pemenuhan dokumen penerapan WBK;
- Penataan fasilitas pendukung penerapan WBK (penataan ruangan dan meubelair, alat pengolah data, banner, penataan ruangan pelayanan dan ketersediaan jaringan internet);

Akar Masalah

Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur lambat mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggung jawabnya;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Seluruh penanggung jawab unsur WBK (Unsur 1-6 dan Hasil) melakukan pemutakhiran dokumen penerapan WBK;
- Mengajukan akun e-ZI ke Inspektorat Jenderal KKP melalui Sekretariat Badan PPMHKP untuk memudahkan pemantauan dan penilaian WBK;
- Tim sekretariat WBK melakukan verifikasi terhadap dokumen penerapan WBK yang disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab unsur.



Penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026

IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar	98	95,3	87,13	83,8	104,65	86,2	0	0	0,00	0,00

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus meningkatkannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2026 yaitu : penyusunan RKAKL, Renja, Rencana Aksi dan Renstra mencapai 30 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2026 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2026, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I sehingga realisasi tercapai 3 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai PPMHKP Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai PPMHKP Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Parameter ini belum dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026.

Bobot realisasi capaian :

= Parameter 1 (30 %) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (3 %) + parameter 4 (0 %)
= 63 %.

Realisasi capaian = $\frac{\text{Bobot realisasi capaian}}{\text{Target}} \times 100 \%$
= $\frac{63}{100} \times 100$

$$86,2$$

$$= 53,41 \%$$

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2026 yaitu

- Tanggal 2 Januari 2026 Nomor surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP
- Penyusunan SK Indikator Kinerja Balai PPMHKP Makassar Nomor B.198/BPPMHKP.MKS/RC.610/I/2026 tanggal 14 Januari 2026.
- Pada tanggal 5 Februari 2026 sesuai dengan Undangan Rapat PLT. Balai PPMHKP Makassar Nomor B.433/BBKIPM.MKS/TU.330/II/2026 telah dilakukan rapat Dialog Kinerja dan Matrik Peran Hasil terhadap Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) Sasaran Kinerja dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri saki dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai PPMHKP Makassar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.

Capaian Indkator ini perhitungannya berdasarkan Tahunan

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2026 :

Kegiatan	Pagu Defenitif	Efesiensi	Setelah efesiensi	Realisasi
3987.EBA.962. B. Tata Usaha	Rp 2.516.000	-	Rp 2.516.000	0
3987.EBA.962. D. Evaluasi dan Pelaporan	Rp 16.515.000	-	Rp 16.515.000	Rp 4.501.000

3987.EBA.994.02. F. Pas Bandara	Rp. 5.075.000	-	Rp 5.075.000	Rp 44.000
3987.EBA.994.02. G. Pertemuan/ Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	Rp. 54.000.000	-	Rp 54.000.000	Rp 11.899.401
Jumlah	Rp 75.592.516	-	Rp 75.592.516	Rp16.444.401

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini tahun 2026 sebesar Rp 75.592.516 dan terealisasi sebesar Rp 16.444.401 atau sebesar 21,75 % jika dibandingkan tahun 2025 pada triwulan I pagu anggaran sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana tindakan lanjut sebelumnya

1. Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;
2. Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan briefing personil dukungan manajerial terkait monitoring output dan realisasi anggaran.

Akar Masalah

Evaluasi AKIP belum dilakukan secara berjenjang

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Melibatkan unsur manajemen dalam evaluasi AKIP, koreksi pimpinan terhadap Laporan Kinerja

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar	65	100	100	100	117,65	86	86	100	116,28	116,28

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat vital dalam menjamin keberhasilan suatu organisasi. Secara esensial, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan tetap berada pada jalur yang direncanakan (*on track*). Melalui proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang sistematis, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada upaya preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai PPMHKP Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Pada triwulan I tahun 2026 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. Jika dibandingkan dengan pencapaian nilai Indikator Kinerja pada triwulan yang sama pada Tahun 2025 sama-sama mencapai nilai 100. Sebagai upaya preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel, telah dilakukan kegiatan antara lain : Manajemen Resiko Lingkup Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026 Tanggal 12 – 13 Januari 2026, Briefing Pagi Dukungan Manajerial Lingkup BPPMHKpm Makassar Tanggal 07 Januari 2026 dan 03 Maret 2026

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2026 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A Operasional Perkantoran, dengan pagu anggaran Rp. 285.384.000,- yang sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026 terealisasi sebesar Rp. 50.084.555,- atau 17,55% yang digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari perkantoran, dukungan kebersihan dan keamanan, penggandaan/penjilidan, dan pencetakan.

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.502.912.000,- dan terealisasi sebesar Rp.402.956.249,- atau 26,81%, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 81,01%. Demikian pula dengan besaran persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan periode yang sama triwulan I tahun 2025 yang sudah mencapai 26,81%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat

Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba”.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai PPMHKP Makassar yaitu “Akuntabel” dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode Triwulan I Tahun 2026.

Akar Masalah

- Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.
- Masih terdapat sisa temuan Itjen sebesar Rp. 9.00,- pada aplikasi SIDAK KKP.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala.
- Membuat surat resmi ke Itjen KKP dalam rang penyelesaian sisa temuan Rp. 9.00,- pada aplikasi SIDAK KKP..

IK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Nilai Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar	89	98,44	96,38	97,16	102,80	92,1	0	0	0,00	0,00

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN yang sekarang diganti menjadi aplikasi My Interest. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

xxx
x x x
xxx Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

xxx Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Capaian nilai IKPA Balai PPMHKP Makassar pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 58,46 persen dari target 83 Persen. Capaian Kinerja IKPA di peroleh sebagai berikut :

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan

Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA.

Adapun Rincian nilai IKPA TW I 2026 Balai PPMHKP Makassar sebagai berikut:

Capaian kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran TW I tahun 2026 pada Balai PPMHKP Makassar.

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Capaian Output	
Nilai	100	56,40	50,00	100	100	100	0	0,00	58,46
Bobot	10	15	20	10	10	10	0	25	
Nilai Akhir	10	8,46	10	10	10	10	0	0,00	
Nilai Aspek	78,20		87,50					0,00	

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran
TW I 2025 dan TW I 2026

Indikator kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW I 2025	TW I 2026	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0.00
Deviasi Hal III DIPA	15	15	8.46	7.46
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	20	10	-0.50
Belanja Kontraktual	10	10	10	0.00
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0.00
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	0.00
Dispensasi SPM	0	0	0	0.00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	0	-1.00
Nilai Total	100	100	58.46	-0.415

Pada tabel diatas terlihat adanya Penurunan nilai IKPA pada TW I 2026 dibandingkan TW I 2025 sebesar 0,415 %. Penurunan ini dipengaruhi karena adanya perbedaan nilai perolehan pada masing-masing indikator TW I 2025 dan indikator TW I 2026. Perbedaan tersebut adalah :

- Deviasi Hal. III DIPA

TW I 2025 Deviasi Hal. III DIPA memperoleh nilai 15 sedangkan TW I 2026 memperoleh nilai 8.46.

Penurunan di Tw I 2026 disebabkan karena realisasi anggaran tidak memenuhi target RPD pada hal. III DIPA

- Capaian Output

Tw I 2025 memperoleh nilai 25 sedangkan Tw I 2026 memperoleh nilai 0.

Penurunan di Tw I 2026 disebabkan karena Pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI belum bisa dilaksanakan karena masih proses penyempurnaan.

Sehingga nilai total IKPA Tw I 2026 mengalami penurunan dibandingkan nilai total IKPA TW I 2025.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai PPMHKP Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.028/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2026 tanggal 2 januari 2026. Tim terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Penugasan Personil Sebagai Pejabat Pengadaan TA 2026 Nomor B.13/SJ.7/KP.340/I/2026 tanggal 4 januari 2026.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan perbendaharaan dan Administrasi Keuangan, Layanan Daya Jasa, Perawatan Kendaraan Bermotor, Perawatan Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Perbendaharaan dan administrasi keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.220.000 telah realisasi sebesar Rp. 8.980.000

➤ Layanan Daya dan Jasa

Kegiatan ini didukung dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 363.408.000 telah realisasi sebesar Rp.58.166.803

➤ Perawatan Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.745.000 telah terealisasi sebesar Rp.17.166.268.000.

➤ Perawatan Gedung dan Bangunan

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.269.000 telah terealisasi sebesar Rp. 864.000

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp26.301.198.000 dengan realisasi anggaran Tw I 2026 Rp. 2.383.488.655 atau 9,06 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.879.526.000 dengan realisasi anggaran triwulan I 2025 sebesar 1.997.000.161 atau 28,50 persen. terdapat peningkatan jumlah anggaran dan realisasi pada Triwulan I 2026 dibandingkan jumlah anggaran Tw I 2025. Hal ini disebabkan terdapat penambahan anggaran untuk pembangunan Laboratorium Rujukan, penambahan anggaran gaji pegawai dan hal lainnya.

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2026. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

Tangkap Layar IKPA Triwulan I 2026 pada Aplikasi My Interest

[illegible]

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

Melaksanakan monitoring melalui briefing pagi tim dukungan manajerial terkait IKPA pada tanggal 3 maret 2026

Akar Masalah

- Target RPD tidak terpenuhi
- Pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI belum dilaksanakan karena aplikasi SAKTI masih dalam penyempurnaan.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Dibentuk tim Tekhnis Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung percepatan realisasi anggaran.
- Operator komitmen melakukan penginputan data target dan capaian output satker pada aplikasi SAKTI maupun modul komitmen

IK 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Nilai kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai PPMHKP Makassar	86	87,87	86,2	98,37	139,86	71,75	0	78,2	0,00	0,00

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada instansi pemerintah, khususnya Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memastikan bahwa anggaran disusun dengan baik dan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tersebut berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan tersusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Tujuan utama dari pengukuran nilai kinerja perencanaan anggaran adalah untuk **meningkatkan kualitas perencanaan anggaran** di masa mendatang. Melalui evaluasi yang sistematis dan objektif, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKAK/L). Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk perbaikan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya, serta dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada instansi pemerintah memiliki beberapa indikator kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan efektivitas pengelolaan serta pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator ini membantu dalam mengidentifikasi area yang berkinerja baik dan area yang memerlukan perbaikan.

Indikator utama yang menjadi fokus dalam Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai seberapa baik anggaran disusun dan direncanakan. Aspek yang dievaluasi meliputi:

- **Kesesuaian Rencana dengan Pelaksanaan:** Se jauh mana rencana anggaran yang telah dibuat sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- **Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan:** Menilai apakah dokumen perencanaan anggaran (seperti RKAK/L) disusun secara komprehensif, realistis, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran selama periode pelaksanaan. Beberapa sub-indikatornya adalah:

- **Penyerapan Anggaran:** Tingkat penyerapan dana anggaran yang menunjukkan seberapa aktif anggaran digunakan untuk kegiatan.
- **Pencapaian Output/Outcome:** Se jauh mana target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tercapai.
- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:** Menilai apakah sumber daya (dana, waktu, tenaga) digunakan secara optimal tanpa pemborosan.
- **Kepatuhan Terhadap Peraturan:** Menilai apakah pelaksanaan anggaran mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prosedur pengadaan, pembayaran, dan pelaporan.

3. Kualitas Hasil (Outcome)

Selain *output*, evaluasi juga melihat dampak atau hasil yang lebih luas dari pelaksanaan anggaran. Ini mencakup:

- **Pencapaian Sasaran Strategis:** Se jauh mana pelaksanaan anggaran berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

- **Dampak Program/Kegiatan:** Menilai dampak positif yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran terhadap masyarakat atau lingkungan.
4. Akuntabilitas dan Transparansi
- Indikator ini menilai sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan.
- **Kualitas Pelaporan Keuangan:** Menilai akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.
 - **Keterbukaan Informasi:** Sejauh mana informasi terkait anggaran dan pelaksanaannya dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.
5. Pengelolaan Risiko Anggaran
- Evaluasi juga dapat mencakup penilaian terhadap kemampuan instansi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.
- Secara umum, hasil evaluasi kinerja anggaran memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja pengelolaan keuangan negara, serta menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Untuk pelaksanaan kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Balai PPMHKP Makassar untuk triwulan I tahun 2026 telah melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Untuk Nilai Kualitas perencanaan anggaran di triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 78,20%, data tersebut dapat kita lihat dalam aplikasi MyIntress.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 100% maka nilai Kualitas perencanaan mengalami penurunan di triwulan I sebesar 21,80%

[illegible]

- b. Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen,

serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;

- c. Pada tanggal 12 Januari 2026 melaksanakan breafing pagi berupa Dalog Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Manajemen Risiko Lingkup BPPMHKP Makassar Tahun 2026 bersama tim Dukungan Manajemen Balai PPMHKP Makassar yang dipimpin langsung Plt Kepala Balai PPMHKP Makassar.
- d. Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Data Poyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN yang dilaksanakan oleh direktorat pembiayaan syariah kementerian Keuangan secara daring.
- e. Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti rapat pembahasan tindak lanjut proyek SBSN TA 2026 Pasca Blokir yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara daring.
- f. Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan kegiatan Breafing pagi bersama Tim Dukungan manajerial terkait pembahasan tindak lanjut indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang dipimpin langsung Plt Kepala Balai PPMHKP Makassar.
- g. Telah dilakukan revisi DIPA Tahun 2026 sebanyak dua kali yaitu pada tanggal posting Span 5 Januari 2026 dan pada tanggal 11 Februari 2026, Keterangan tersebut dapat dilihat pada aplikasi SAKTI dan aplikasi MyIntress. Revisi tersebut dilaksanakan dalam rangka identifikasi ketersediaan alokasi anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 dan kegiatan prioritas akibat revisi anggaran.

- h. Untuk tabel III DIPA telah tergambar rencana penarikan dana (RPD) sebagai berikut :

[illegible]

Uraian	Rencana Penarikan Dana			Total
	Januari	Februari	Maret	
Belanja Pegawai	274.794.000	569.376.000	826.446.000	1.670.616.000
Belanja Barang	47.435.000	120.877.000	182.076.000	350.388.000
Belanja Modal	0	158.208.000	0	158.208.000
Jumlah	322.229.000	848.461.000	1.008.522.000	2.179.212.000

Sampai bulan Maret tahun 2026, Rencana Penarikan Dana sesuai yang tergambar dalam table III DIPA adalah sebesar Rp.2.179.212.000,-

- i. Untuk Laporan Realisasi Anggaran sampai periode Maret 2026 yang terdapat dalam aplikasi SAKTI dan MYIntress sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2026
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN R2
ESKON I
SATUAN KERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN R2
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 15
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR 42788

Tgl Data : 03/03/2026 09:44
Tgl Cetak : 03/03/2026 10:41:19
Revisi : 1
No. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

URAIAN	2025				2026			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI ATAS BUKAN ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI ATAS BUKAN ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pemeliharaan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Pemeliharaan Pemukiman	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Sarana Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Sarana Pemukiman Perairan	20.267.788.000	3.280.448.600	323.017.726.340	0,06	11.975.028.000	2.778.284.770	9.760.220.000	17,91
2. Sarana Pengairan	7.008.000.000	1.240.375.500	3.746.255.800	0,17	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	22,96
3. Sarana Ransang	2.042.388.000	284.707.500	1.757.581.844	13,84	4.000.287.000	330.440.750	4.388.730.210	19,83
4. Sarana Monev	17.200.200.000	168.308.000	117.041.751.700	0,82	0	0	0	0
5. Sarana Pemukiman Sungai Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sarana Subsid	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sarana Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sarana Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sarana Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi s/d Periode Maret 2026	%
1	Belanja Pegawai	7.058.809.000,-	1.940.573.169,-	27,49
2	Belanja Barang	2.042.389.000,-	284.707.186,-	13,94
3	Belanja Modal	17.200.000.000,-	158.208.300,-	0,92
Jumlah		26.301.198.000,-	2.383.488.655,-	9,06

j. Deviasi RPD dan Realisasi Anggaran sampai triwulan I adalah sebagai berikut :

Uraian	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Selisih	%
Belanja Pegawai	1.670.616.000	1.940.573.169	269.957.169	16,16
Belanja Barang	350.388.000	284.707.186	65.680.814	18,75
Belanja Modal	158.208.000	158.208.300	300	0,00
Jumlah	2.179.212.000	2.383.488.655	204.276.655	9,37

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai PPMHKP Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai sesuai Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.028/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:

- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
- 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
- 3 Orang Staf KPA dan;
- 2 Orang Staf PPK

Untuk mendukung kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026, anggaran tersedia pada Akun 3987.EBA.962.E. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dengan Pagu awal sebesar Rp.22.630.000,- dan tidak terdapat blokir anggaran atau perubahan/efisiensi anggaran. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 dan saat ini telah terealisasi sebesar Rp.22.630.000,- atau telah tercapai sebesar 100%.

Perbandingan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 170.811.000 dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.18.458.459,-

Besaran nilai perbandingan anggaran triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 turun sebesar (Rp.148.181.000,-) atau turun sebesar (654,79%).

Besaran nilai perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 turun naik sebesar Rp.4.171.541,- atau naik sebesar 22,59%.

Secara teknis, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran bukanlah sebuah Program Prioritas Nasional namun, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah merupakan instrumen pendukung utama dan indikator kualitas untuk memastikan seluruh Program Prioritas Nasional dapat terlaksana dengan baik.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) memiliki aspek pemanfaatan penting dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu :

- **Pengukuran Kualitas Perencanaan Anggaran:**
untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Hal ini mencakup kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- **Evaluasi Kinerja Anggaran:**
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga tingkat kementerian/lembaga.
- **Dasar Penyusunan Kebijakan:**
Digunakan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan. Selain itu, juga digunakan dalam penyusunan reviu angka dasar, alokasi anggaran tahun berikutnya, dan penyesuaian anggaran tahun berjalan.
- **Peningkatan Akuntabilitas:**
Sebagai alat untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara profesional kepada pemangku kepentingan.
- **Identifikasi Faktor Pendukung dan Kendala:**
Evaluasi kinerja anggaran membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.
- **Pengambilan Keputusan:**
Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran, seperti pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi⁴.
- **Mendorong Efisiensi:**
Dengan adanya penilaian NKPA, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

- **Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara:**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) berkontribusi dalam membangun tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana tindakan lanjut sebelumnya

Rapat/briefing terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Akar Masalah

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk TW I tahun 2026 belum dapat terinput pada capaian kinerja modul komitmen di aplikasi SAKTI karena saat ini di aplikasi SAKTI untuk capaian kinerja pada modul komitmen sampai TW I tahun 2026 tersebut masih dalam proses penyempurnaan.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Melakukan penginputan target dan realisasi capaian kinerja bulan Januari sampai Maret 2026 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen;



Dokumentasi Kegiatan Briefing pegawai lingkup dukungan manajerial

IK 11. Persentase rencana Umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)		79,56	78,26	84,34	131,58	77	77	100	129,87	129,87

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan}} \times 100\%$$

Pagu Pengadaan Barang/Jasa

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. 19.484.769. 000}}{\text{Rp. 19.484.769. 000}} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan I adalah sebesar 100 % dari target 77 % atau capaiannya sebesar 129,87 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan pada triwulan I yang nilai pagu paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah sama.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai PPMHKP Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada triwulan I telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebanyak 45 paket dengan sebesar Rp. 19.484.769. 000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 3 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 65.000.000,-
- b. Paket Penyedia sebanyak 15 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.258.232.000,-
- c. Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 1.147.337.000,-

- d. Paket E-Purchasing sebanyak 2 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 7.200.000.000,-
- e. Paket Seleksi sebanyak 3 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.075.200.000,-
- f. Paket Tender sebanyak 1 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 8.739.000.000,-

Pada Tahun Anggaran 2026 nilai paket pengadaan barang dan jasa Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp. 19.484.769. 000,-.. Keadaan dan posisi realisasi RUP sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program (Rp.)	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu terumumkan (Rp.)	Selisih (Rp.)	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	680,000,000	680,000,000	680,000,000	0	100 %
2	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	17,937,248,000	17,657,432,000	17,657,432,000	0	100 %
3	WA	Program Dukungan Manajemen	1,305,141,000	1,147,337,000	1,147,337,000	0	100 %

Untuk mengetahui capaian persentase pengadaan barang dan jasa yang telah diupload dan diumumkan di Aplikasi SIRUP dapat dilihat di menu Moner sebagaimana seperti di bawah ini.

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	680,000,000	680,000,000	680,000,000	0	100,00%
2	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	17,937,248,000	17,657,432,000	17,657,432,000	0	100,00%
3	WA	Program Dukungan Manajemen	1,305,141,000	1,147,337,000	1,147,337,000	0	100,00%

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 item

Keterangan :

- Data terupdate setiap 3 jam setelah menu di akses terakhir kali
- Pagu Pengadaan (selain dari kode akun) : 01 dan taggung NPD otomatis terisi apabila sudah upload RUP

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian capaian persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai PPMHKP Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Biro Umum dan Barang/ Jasa, Setjen KKP melalui draft Nota Dinas, tanggal 7 April 2026 persentase capaian IKU ini adalah 100 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I sebagai berikut :

1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 12 Februari 2026;
2. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan elektronik oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP tanggal 9 Februari 2026 Perihal : Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026, tanggal 11 Februari 2026;

Memperhatikan Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan elektronik oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP Nomor : 141/SJ.7/PL.410/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 Hal: Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026, bersama ini Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar telah menindaklanjuti dengan Surat Plt. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, Nomor : B.529 /BPPMHKP.MKS/PL.410/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 Perihal : Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan Sebesar 100% Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026;

3. Mengikuti Kegiatan Koordinasi Aplikasi SPSE dan Sirup Lingkup KKP melalui Zoom Meeting “ Monitoring Pencatatan SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2026” tanggal 5 Maret 2026;
4. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP dan input perbaikan data yang selisih pagu pengadaan dengan pagu terumumkan pada tanggal 5 Maret 2026;
5. Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/ Jasa melalui zoom meeting tanggal 16, 17, 25 dan 26 Maret 2026.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2026 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi Anggaran dan realisasi Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026 :

- A. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 65.568.000,- yang terdiri dari :
 1. 3987.EBA.994, 002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
 2. 3987.EBA.994, 002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya diblokir sehingga tidak ada realisasi atau Rp 0,- %.
- B. Alokasi anggaran awal untuk mendukung Indikator Kinerja (IKU) ini sebesar Rp. 17.565.000.000,- namun telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.269.500.000,- sehingga alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan I tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 12.295.500.000,- yang terdiri dari :

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Efisiensi	Efisiensi	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	3989.PDC.002, D Pengujian Mutu Hasil Perikanan	365.000.000	255.500.000	109.500.000	31.197.050
	- Belanja Barang Persediaan Bahan Baku	291.500.000	182.000.000	109.500.000	31.197.050
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.500.000	73.500.000	-	-
2.	3989.RAL.001, Sarana Pengujian Mutu	7.200.000.000	2.372.000.000	4.828.000.000	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Lab.)	5.700.000.000	1.622.000.000	4.078.000.000	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Sarana Pendukung Lab.)	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	-
3.	3989.RBQ.001, Prasarana Pengujian Mutu	10.000.000.000	9.668.000.000	332.000.000	527.361.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdiri dari :				
	- Konstruksi Bangunan Gedung Laboratorium.	8.739.000.000	8.739.000.000	-	-
	- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Laboratorium	680.000.000	528.000.000	152.000.000	527.361.000
	- Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium	395.200.000	395.200.000	-	-
	- Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium	185.800.000	5.800.000	180.000.000	-
	Jumlah (1+2+3+)	17.565.000.000	12.295.500.000	5.269.500.000	558.558.050

Pada Triwulan I 2025 Indikator Kinerja (IKU) ini realisasi anggaran 0 % karena anggaran diblokir tidak bisa direalisasikan dan jika dibandingkan pada Triwulan I 2026 IKU ini realisasi anggaran sebesar **Rp. 558.558.050,-** dengan persentase 4,54 %, dan persentase realisasi mengalami kenaikan sebesar 4,54 %.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebesar 99,06 % jika dibandingkan dengan pada Triwulan I Tahun 2026 Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebesar 100,00 %, persentase realisasi IKU ini mengalami kenaikan sebesar 0,94 %

Kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Negara, dimana sebagai negara dengan luas wilayah laut yang mencapai dua pertiga dari total luas wilayah, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang sangat melimpah.

Salah satu sumber daya alam yang paling bernilai adalah hasil perikanan, yang tidak hanya berperan sebagai sumber protein hewani utama bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi jutaan orang

Untuk itu pengelolaan sektor kelautan dan perikanan harus tetap dioptimalkan dalam rangka memastikan sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dan diperlukan upaya yang sangat serius dalam pengelolaannya

(KKP) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor ini, tentunya memerlukan anggaran yang tidak kecil, mengingat luasnya wilayah perairan serta kompleksitas permasalahan di sektor tersebut.

Menghadapi tantangan besar terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas di tengah kebutuhan yang semakin besar. Sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang serba sulit, pemerintah sering kali terpaksa melakukan efisiensi anggaran, yang berpotensi berdampak pada berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Di sisi lain, efisiensi anggaran yang dilakukan dengan tepat dapat memaksimalkan dampak positifnya tanpa mengorbankan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Efisiensi anggaran pemerintah tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sektor

elautan dan perikanan, namun semua itu bukan berarti membuat program pengembangan dan pemberdayaan sektor ini berjalan ditempat atau mapah berhenti.

Sektor kelautan dan perikanan dengan ruang lingkup yang sangat luas memiliki beragam kompleksitas permasalahan di dalamnya.

- Penangkapan Ikan;
- Budidaya Perikanan;
- Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- Penataan Ruang Laut;
- Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan;
- Pengendalian dan Penjaminan Mutu Produk Perikanan;
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Disektor Kelautan dan Perikanan :

Seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, tentunya tidak berlebihan jika banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

Anggaran yang terbatas tentu akan mempengaruhi berbagai program yang telah direncanakan, mulai dari pengelolaan sumberdaya , penguatan pengawasan sumber daya hingga pembangunan infrastruktur kelautan yang sangat dibutuhkan.

Namun, disisi lain kita juga harus menyadari bahwa anggaran yang tidak efisien akan memperburuk masalah yang ada. Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang dilakukan secara bijak harus mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah tanpa mengorbankan program prioritas serta tujuan jangka panjang.

1. Penurunan Kualitas Program : Salah satu dampak utama dari efisiensi anggaran yang diterapkan secara drastis adalah penurunan kualitas program yang ada. Efisiensi anggaran berpotensi mengurangi jumlah atau cakupan program, serta menurunkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dapat merugikan sektor ini dalam jangka panjang
2. Keterbatasan Infrastruktur : Infrastruktur kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan, sarana pengolahan produk, dan fasilitas pengawasan, membutuhkan investasi yang signifikan. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan keterbatasan dana untuk membangun atau memelihara infrastruktur yang sangat penting ini, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan sektor ini
3. Sumber Daya Manusia : Pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan memerlukan dana yang cukup untuk pelatihan, pendidikan, dan penelitian. Efisiensi anggaran yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada para masyarakat pelaku industri perikanan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada produktivitas dan kualitas hasil perikanan.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/SIRUP;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan tranparansi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Hasil Tindakanlanjut rekomendasi rencana tindakanlanjut sebelumnya

Perubahan atau Revisi Kegiatan dan Anggaran (Revisi POK) telah disampaikan oleh bagian Program ke Operator/ Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui chat Whats App (WA).

Akar Masalah

Potensi masalah : Kesalahan Input data relatif tinggi pada pada aplikasi SIRUP

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Melakukan pemutakhiran data SIRUP jika ada revisi DIPA/ RKA-KL.
- Verifikasi data SIRUP dilakukan oleh Kasubag Umum dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Validasi data SIRUP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

IK 12. Indeks kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2021 - 2025					Tahun 2026				
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target Tahun 2026
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai PPMHKP Makassar	-	89,8	91,12	3,77	116,96	3,5	3,5	3,92	112,00	112,00

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14> .

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuaSAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$S = X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)$$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana $df = 1$ dan $\alpha = 5\% = 0.05$
 P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka $P = 0.5$)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$$S = \frac{46.092}{1.076} = 42.766 \approx 43$$

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	120	120	1200	221
15	14	130	144	1300	257
20	19	140	148	1400	292
25	24	150	152	1500	308
30	28	160	155	1600	315
35	32	170	159	1700	313
40	36	180	162	1800	317
45	40	190	165	1900	320
50	44	200	169	2000	322
55	48	210	173	2100	327
60	52	220	177	2200	331
65	56	230	181	2300	335
70	59	240	185	2400	338
75	63	250	189	2500	341
80	66	260	193	2600	344
85	70	270	197	2700	347
90	73	280	201	2800	350
95	76	290	205	2900	352
100	80	300	210	3000	354
110	88	310	214	3100	357
120	96	320	217	3200	361
130	104	330	221	3300	364
140	112	340	224	3400	367
150	120	350	228	3500	369
160	128	360	231	3600	371
170	136	370	234	3700	373
180	144	380	237	3800	375
190	152	390	240	3900	377
200	160	400	243	4000	379
210	168	410	246	4100	380
220	176	420	249	4200	381
230	184	430	251	4300	382
240	192	440	254	4400	383
250	200	450	257	4500	384
260	208	460	260	4600	385
270	216	470	263	4700	386
280	224	480	266	4800	387
290	232	490	269	4900	388
300	240	500	271	5000	389
310	248	510	274	5100	390
320	256	520	277	5200	391
330	264	530	280	5300	392
340	272	540	283	5400	393
350	280	550	286	5500	394
360	288	560	289	5600	395
370	296	570	292	5700	396
380	304	580	295	5800	397
390	312	590	298	5900	398
400	320	600	301	6000	399
410	328	610	304	6100	400
420	336	620	307	6200	401
430	344	630	310	6300	402
440	352	640	313	6400	403
450	360	650	316	6500	404
460	368	660	319	6600	405
470	376	670	322	6700	406
480	384	680	325	6800	407
490	392	690	328	6900	408
500	400	700	331	7000	409
510	408	710	334	7100	410
520	416	720	337	7200	411
530	424	730	340	7300	412
540	432	740	343	7400	413
550	440	750	346	7500	414
560	448	760	349	7600	415
570	456	770	352	7700	416
580	464	780	355	7800	417
590	472	790	358	7900	418
600	480	800	361	8000	419
610	488	810	364	8100	420
620	496	820	367	8200	421
630	504	830	370	8300	422
640	512	840	373	8400	423
650	520	850	376	8500	424
660	528	860	379	8600	425
670	536	870	382	8700	426
680	544	880	385	8800	427
690	552	890	388	8900	428
700	560	900	391	9000	429
710	568	910	394	9100	430
720	576	920	397	9200	431
730	584	930	400	9300	432
740	592	940	403	9400	433
750	600	950	406	9500	434
760	608	960	409	9600	435
770	616	970	412	9700	436
780	624	980	415	9800	437
790	632	990	418	9900	438
800	640	1000	421	10000	439

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 2.649 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 336 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 368, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$.

Jumlah Unsur = 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

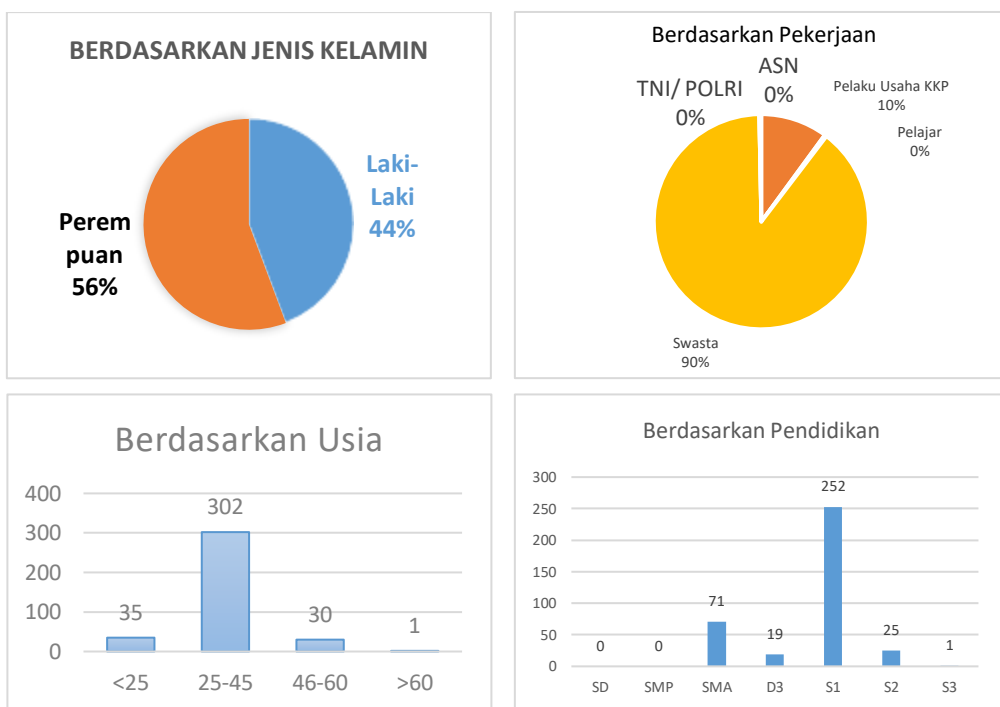
Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai PPMHKP Makassar.

Pada triwulan I Tahun 2026 Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan survey terhadap 368 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM **3,92** atau sebesar **97,96** setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 3,5 atau capaian 112%. Apabila data Hasil IKM Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan TW I Tahun 2026, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan I - 2025	Triwulan I - 2026	
1	Kesesuaian persyaratan	3.733	3,935	↑
2	Kemudahan prosedur	3.731	3,921	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.724	3,924	↑
4	Kesesuaian biaya	3.711	3,902	↑
5	Kesesuaian produk	3.741	3,932	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.706	3,905	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.716	3,908	↑

8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.746	3,921	↑
9	Kualitas isi/sarana	3.706	3,918	↑
	Nilai IKM	93,32	97,96	
	Indeks		3,92	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2026 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kesesuaian biaya**, unsur **Kompetensi Pelayanan**, serta unsur **Perilaku Pelaksana**. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kesesuaian biaya, unsur Kompetensi Pelayanan, serta unsur Perilaku Pelaksana walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai PPMHKP Makassar menggunakan Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi petugas pelayanan dan pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I pada tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan dari **93,32** menjadi **97,96** atau **(3,93)**. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai PPMHP Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan I Tahun 2025 ke Triwulan I 2026 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai PPMHKP Makassar.

Namun demikian dalam kegiatan survey kepuasan Masyarakat ini masih perlu dioptimalkan karena masih terdapat jenis layanan yang belum disurvey terutama bagian sertifikasi hulu, yaitu Sertifikasi CPIB diatas Kapal, Sertifikasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifikasi CPPIB, Sertifikasi SPDI. Berdasarkan realisasi pada Triwulan I tahun 2026, kegiatan sertifikasi CPIB Kapal dan sertifikasi SPDI seharusnya dapat diperoleh data survey karena telah terlealisasi kegiatan Sertifikasi SPIB Kapal sebanyak 5 kegiatan dan Sertifikasi SPDI 1 kegiatan. Petugas telah mengirimkan link survey, namun kesadaran pelaku usaha dalam pengisian survey masih sangat rendah. Sedangkan Sertifikasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifikasi CPPIB belum ada kegiatan pada triwulan I tahun 2026.

Nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan I Tahun 2026. Balai PPMHKP Makassar telah mengintegrasikan sistem penanganan

pengaduan dalam aplikasi LAPOR!. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu ini membuat masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pada Triwulan I tahun 2026, terdapat konsultasi tatap muka sebanyak 6 kali, 10 kali konsultasi melalui telepon/Whatsapp, dan Media Sosial sebanyak 1 kali. Adapun pengaduan melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 17 kali dengan kategori permintaan informasi. Pengaduan melalui tatap muka, telepon/WhatsApp dan aplikasi LAPOR! tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tuntas.

Pada tanggal 12 Februari 2026, Balai PPMHKP Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “INFORMATIF” yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-KP/XII/2025. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Kick Off Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Balai PPMHKP Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- 5 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar memberikan penghargaan Petugas Pelayanan Teladan serta Pegawai Teladan untuk semester II tahun 2025;
- 7 Januari 2026, Customer Service melakukan pendampingan Permintaan informasi tentang tata cara pendaftaran nomor registrasi negara mitra pada Aplikasi SIAPMutu serta melakukan pendampingan mulai dari pembuatan akun PPK Online dan pengisian data dukung PPK Online;
- 12 Januari 2026, Surat dari Sekertariat Jenderal KKP mengenai Pemutakhiran informasi publik berkala pada website PPID Tahun 2026;
- 30 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar melaksanakan kegiatan Kampanye Hemat Energi dan Jumat Bersih (ASRI) sebagai wujud komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mendorong penggunaan energi secara bijak, serta untuk pelayanan publik yang prima;
- 4 Februari 2026, Sharing Session Pelaporan Gratifikasi tentang Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pelaporan Gratifikasi dengan narasumber Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Balai PPMHKP Makassar;

- 5 Februari 2026, Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal melalui Aplikasi SIAP MUTU dihadiri oleh Pengguna Jasa dan Pemangku Kepentingan
- 11 Februari 2026, Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP;
- 12 Februari 2026, Rapat Internal Pembahasan Inovasi Pelayanan Publik Jempol Jala ekspor- Jempol Imut;
- 26 Februari 2026, Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak tahap hulu;
- 26 Februari 2026, Morning Briefing Petugas Pelayanan Dan Inspektur Mutu Balai PPMHKP KKP Makassar.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I 2025 meningkat dari **93,32** menjadi **97,96** atau **(3,93)**. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Diupayakan lebih banyak petambak yang paham terkait budidaya CBIB
- Pelaksanaan uji lab mohon untuk diberitahukan jika sudah selesai
- semoga kedepannya ada layanan call centre seperti app sipetta dulu
- keramahan memberikan pelayanan lebih di tingkatkan lagi

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPPK	12
8.	PJLP	5
	TOTAL	37

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2026 yaitu 3987.EBA.994.02. A. Operasional Perkantoran Dukungan pelayanan publik sebesar **Rp. 1.200.000,-**. Hingga Triwulan I Tahun 2026, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak **Rp. 100.000,-** dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 1.100.000,-.

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 356,509,000,-. Anggaran dari Tahun 2025 dengan tahun 2026 berbeda sangat signifikan.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari

Masyarakat pengguna layanan pada Balai PPMHKP Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai PPMHKP Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

- 20 Januari 2026, Briefing Pagi Petugas Layanan Kantor Balai PPMHKP Makassar tentang sharing informasi mengenai isu-isu global dan meningkatkan pelayanan publik;
- Januari s.d Maret 2026, Customer service melakukan asistensi tata cara pendaftaran nomor registrasi negara mitra aplikasi SIAPMUTU kepada UPI.

Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan I 2025 dari 93,32 dan Triwulan I 2026 menjadi 97,96.

Akar Masalah

Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu yang dilakukan survey kepuasan Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait masukan



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar Triwulan I Tahun 2026, secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar 113,51 (kategori Istimewa). dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar	72	76,20
2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar	72	88,10
3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar	71	74,81
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar	86,2	100
5.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar	77	100
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar	3.5	3,92

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai PPMHKP Makassar pada Triwulan I Tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, untuk melakukan pendekatan terhadap pelaku usaha guna peningkatan komitmen. (IKU 1)
2. Koordinasi dengan UPT DJPT KKP terkait percepatan pelaksanaan sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Selatan. (IKU 2)
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di semester II tahun 2026, melaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor (IKU 3)
4. Melakukan koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional dan bagian keuangan untuk mengakselerasi pembayaran iuran tahunan KAN untuk tahun 2026. (IKU 4)
5. Pegawai yang terlambat akumulasi maksimal 240 menit akan dilakukan panggilan tatap muka
6. TIM Kepegawaian akan mengingatkan kepada pegawai untuk disiplin mengentry data sertifikat pada Whatapp group kantor. (IKU 5)

4.3 Tindakanlanjut

Adapun rekomendasi pada triwulan IV tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi triwulan sebelumnya :
Melaksanakan sosialisasi sertifikasi CPIB dan CBIB kepada penyuluh perikanan dan pelaku usaha. (IKU1)
Tindaklanjutnya : Pada tanggal 26 Januari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya pada penyuluh perikanan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang bertempat di Aula BRPBAPPP Maros
2. Rekomendasi triwulan sebelumnya :
Melakukan koordinasi dengan Pembina mutu daerah dalam rangka pembinaan teknis di tingkat daerah sebelum pengajuan rekomendasi.. (IKU2)

Tindaklanjutnya :

Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2026, terkait teknis pelaksanaan Sertifikasi SKP yang lebih efisien dan efektif.

3. Rekomendasi sebelumnya :

Pertemuan/sharing session inspektur mutu terkait prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi. (IKU5)

Tindaklanjutnya :

Indikator Kinerja Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Ekspor lingkup Balai PPMHKP Makassar sudah tidak ada.

4. Rekomendasi sebelumnya :

Peningkatan kemampuan dan kompetensi analis laboratorium dalam bentuk sharing session ataupun mengikuti pelatihan internal atau eksternal dalam melakukan pengujian laboratorium sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017. (IKU 6)

Tindaklanjutnya :

Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi analis laboratorium untuk ruang lingkup yang akan ditambahkan sebagai laboratorium rujukan wilayah Timur Indonesia berupa pelatihan *Listeria monocytogenes* pada tanggal 18 Februari 2026 oleh DKSH.

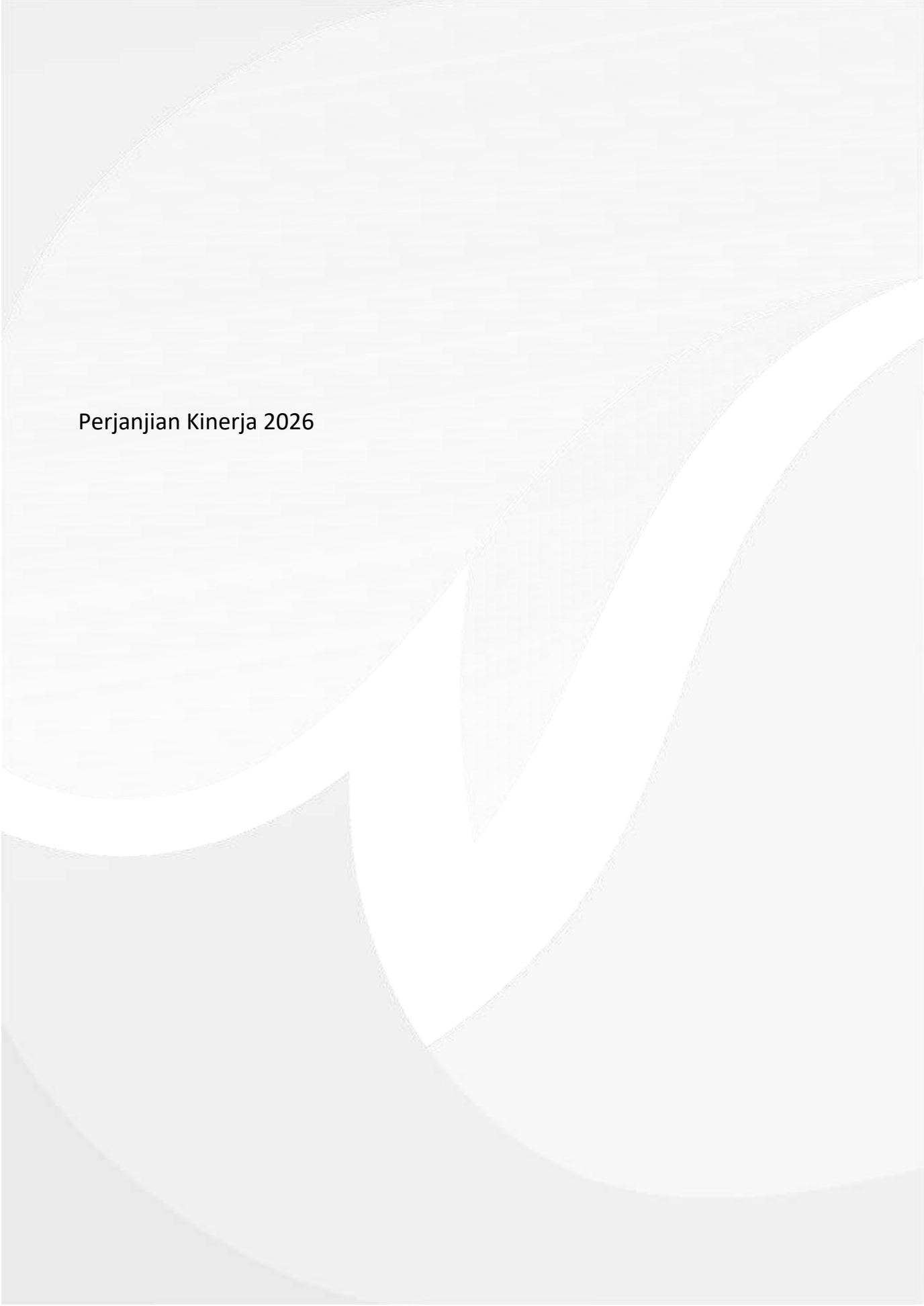
5. Rekomendasi sebelumnya :

Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik. (IKU 16)

Tindaklanjutnya :

- 20 Januari 2026, Briefing Pagi Petugas Layanan Kantor Balai PPMHKP Makassar tentang sharing informasi mengenai isu-isu global dan meningkatkan pelayanan publik;

- Januari s.d Maret 2026, Customer service melakukan asistensi tata cara pendaftaran nomor registrasi negara mitra aplikasi SIAPMUTU kepada UPI.



Perjanjian Kinerja 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Zamrud**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	18.062.270.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	86.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	8.844.872.000
Total Anggaran Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026		26.993.142.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud

Lampiran Form Capaian Kinerja
Triwulan I 2026



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP MAKASSAR MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)
Nama Timja	:	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Realisasi	76,20								
%Capaian	105,83								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
- Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{81,00+70+70+70+90}{5}$$

$$= 76,20$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemananan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB/CDOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

Catatan :

Untuk realisasi output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026 triwulan I sebesar 76,20 % sedangkan realisasi output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 triwulan I tahun 2025 sebesar 100 %. Mengalami penurunan sebesar 23,8 % yang disebabkan oleh perhitungan capaian realisasi IKU tahun 2026 diperoleh dari perhitungan dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPIB Kapal	5	5	100 %
2	Sertifikasi CBIB	0	0	0
3	Sertifikasi CPIB	0	0	0

4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0
5	Sertifikasi CPOIB	0	0	0
6	Sertifikasi CDOIB	0	0	0

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemandirian pangan Triwulan I tahun 2026 adalah 76,20 % sehingga capaian kinerja sebesar 105,83 %.

Realisasi Triwulan I tahun 2026 yaitu 100% jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025. karena seluruh permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti sampai dengan terbitnya sertifikat, namun dari segi anggaran dan jumlah output sertifikasi berbeda.

- Pada Triwulan I tahun 2026 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CBIB,CPPIB,CPOIB dan CDOIB, namun telah dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan pada unit pembudidaya yang telah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) sebanyak 4 unit dari 7 target yang ditetapkan oleh pusat produksi primer. Adapun output kegiatan tersebut berupa Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) telah diterbitkan sebanyak 4 SKHS dan telah disampaikan kepada pelaku usaha. Kegiatan surveilan pada sertifikasi CPIB kapal sebanyak 3 target belum dilaksanakan. Tidak ada program surveilan pada kegiatan sertifikasi untuk pembenihan (CPIB) dan CPPIB.

SDM

- Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi CPIB Kapal pada Triwulan I sebanyak 4 orang, yang terdiri atas 4 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Surveilans CBIB pada TW I sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar
- Pada triwulan I tahun 2026 perwakilan Balai PPMHKP Makassar atas nama Mohammad Zamrud,S.Pi.,MP, Sri Rahayu Setyaningsih S.St.Pi.,M.Sc dan Arfiandi S.Pi menerima Sertifikat Apresiasi dari Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) pada Program Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di kapal rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan.

ANGGARAN DAN ASPEK PEMANFAATANNYA

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal tahun 2026 sebesar Rp. 75.380.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer. Realisasi anggaran TW I Tahun 2026 sebesar Rp. 8.241.000,- atau sebesar 10,93 %, untuk perjalanan dinas inspeksi CPIB Kapal dan surveilan CBIB. Sedangkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.18.820.000 dan belum ada realisasi pada TW I tahun 2025.

PROGRAM NASIONAL

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP " penangkapan ikan terukur berbasis kuota " yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP " pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan " yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Pada tanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan Walikota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut adalah memperkenalkan tugas dan fungsi UPT BPPMHKP secara kelembagaan serta meminta dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir di kota Makassar.
- Pada tanggal 26 Januari 2026 sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya pada penyuluh perikanan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat secara tatap muka dan daring yang bertempat di Aula BRPBAPP Maros.

• Pada tanggal 29 Januari 2026 mengikuti Help Desk Sertifikasi CPPIB, CPOIB dan CDOIB yang dilaksanakan secara Online oleh Pusat Produksi Primer. • Pada tanggal 4 Februari 2026 telah diadakan Sharing Session Cara Budidaya Ikan yang Baik dalam rangka peningkatan kapasitas Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu yang bertempat di aula BPPMHKP Makassar. • Pada tanggal 5 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Sertifikasi CPIB Kapal Melalui Portal SIAPMUTU Versi 1.0.3 – 2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar yang diikuti oleh pengguna layanan BPPMHKP Makassar. • Pada tanggal 6 Februari 2026 mengikuti kegiatan Help desk Koordinasi CPIB 2026 Wilayah 2 yang dilaksanakan secara online oleh Pusat Produksi Primer. • Pada tanggal 26 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Pengisian ceklist CPIB Kapal Melalui Portal SIAPMUTU Versi 1.0.3 – 2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar • Pada tanggal 2-4 Maret 2026 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar an. Sri Rahayu Setyaningsih S.St.Pi.,M.Sc dan Arfiandi S.Pi mengikuti kegiatan Training Of Trainer (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) yang diselenggarakan oleh BPPSDMKP yang bekerja sama dengan BPPMHKP dan DJPT yang dilaksanakan secara online. • Pada tanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPI Paotere. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kota Makassar, Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar yang dihadiri oleh 60 orang nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyadartahuan kepada nelayan tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan Balai PPMHKP Makassar terhadap program Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi modern, produktif dan terintegrasi.	
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)	
Pencapaian sertifikasi penjaminan mutu hulu belum optimal yang disebabkan oleh : • Komitmen pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi penjaminan mutu hulu masih kurang.	
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	
• Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, untuk melakukan pendekatan terhadap pelaku usaha guna peningkatan komitmen.	
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
• Pada tanggal 26 Januari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya pada penyuluh perikanan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang bertempat di Aula BRPBAPPP Maros.	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Sri Rahayu Setyaningsih

DAFTAR SERTIFIKASI CPIB KAPAL
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO.	NAMA KAPAL	NAMA NAHKODA	UKURAN KAPAL	TIPE KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	KOMODITAS	NAMA UPI YANG DIPASOK	NOMOR CPIB	MASA BERLAKU CPIB	GRADE
1	Putri Tunggal 02	Abidin	19	Penangkap	10 Februari 2026	Tuna Segar	PT. Chen Woo Fishery	ID-CPIB-K-73-260052	22 Februari 2026 - 22 Februari 2030	B
2	Ryang 24	Jumardi	24	Penangkap	10 Februari 2026	Lencam Segar	PT. Chen Woo Fishery	ID-CPIB-K-73-260053	22 Februari 2026 - 22 Februari 2030	B
3	Gibran Makmur 02	Mulyadi	28	Penangkap	10 Februari 2026	Cakalang, Baby Tuna Segar	PT. Chen Woo Fishery	ID-CPIB-K-73-260078	23 Februari 2026 - 23 Februari 2030	B
4	Amira Jaya	Ilham	17	Penangkap	14 Februari 2026	Cakalang Segar	PT. Bumi Menara Internusa	ID-CPIB-K-73-260075	23 Februari 2026 - 23 Februari 2030	C
5	Saromase 01	Reza Akbar	19	Penangkap	26 Februari 2026	Tuna Segar	PT. Dwira Masagena	ID-CPIB-K-73-260137	6 Maret 2026 - 6 Maret 2030	C

DAFTAR SURVEILAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Unit Pembudidaya	Jenis Komoditi	Sertifikat
1	Sekolah Kejuruan Negeri Maros	Nila Gesit	ID-CBIB-T-73-240017
2	Anmim Kahal Farm	Udang Vannamei	ID-CBIB-SN-P-001378
3	CV. Senada Horta	Udang Vannamei	ID-CBIB-T-73-250012
4	CV. Esaputlii	Udang Vannamei	ID-CBIB-73-P-250150

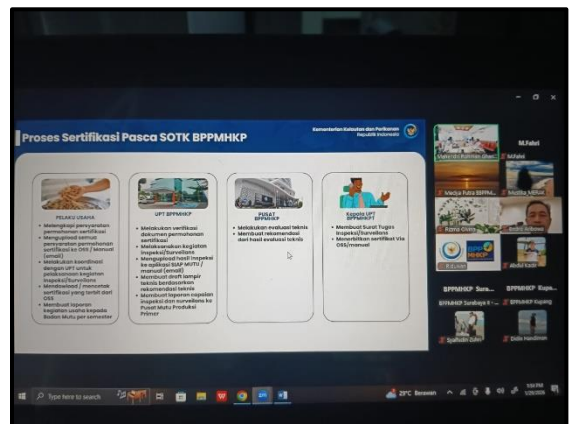
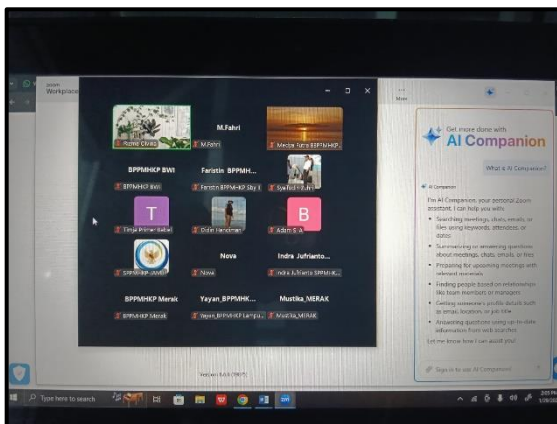
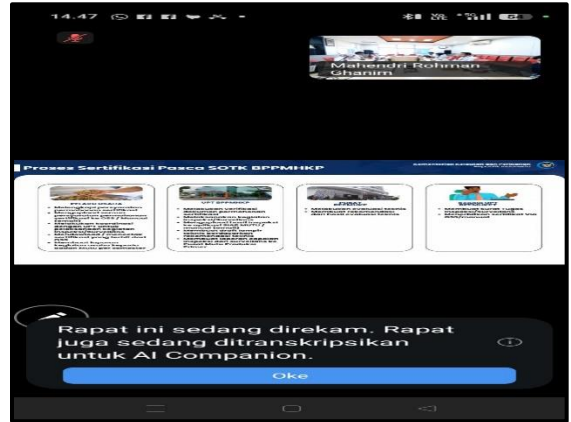
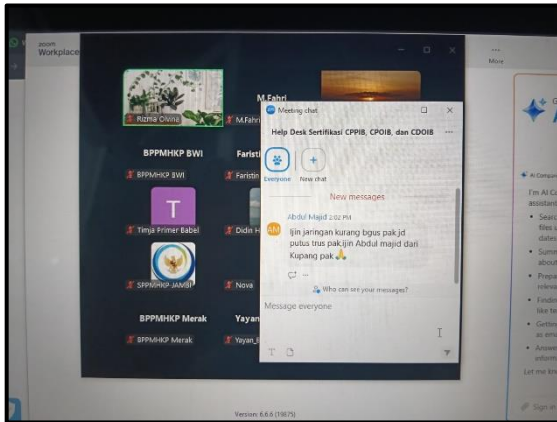
DOKUMENTASI KEGIATAN
AUDIENSI DENGAN WALIKOTA MAKASSAR
05 JANUARI 2026



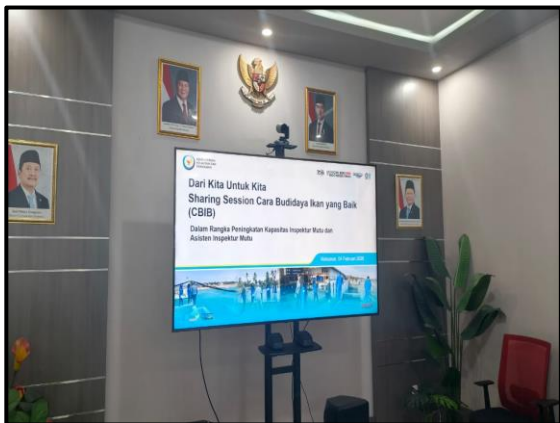
DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI INDIKATOR PENILAIAN CBIB SEBAGAI INSTRUMEN
PENINGKATAN KUALITAS DAN KEAMANAN HASIL BUDIDAYA
26 JANUARI 2026



DOKUMENTASI KEGIATAN **HELP DESK SERTIFIKASI CPPIB, CPOIB DAN CDOIB** **OLEH PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER** **29 JANUARI 2026**



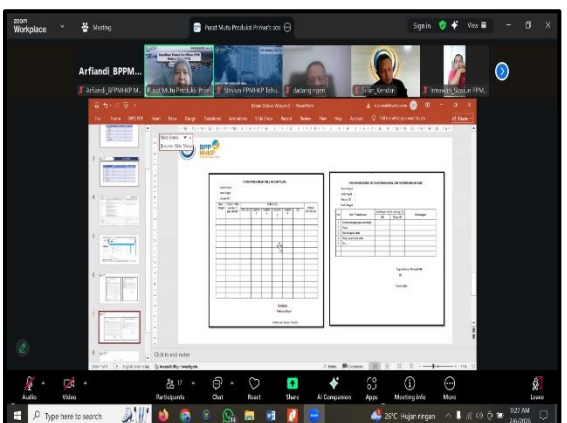
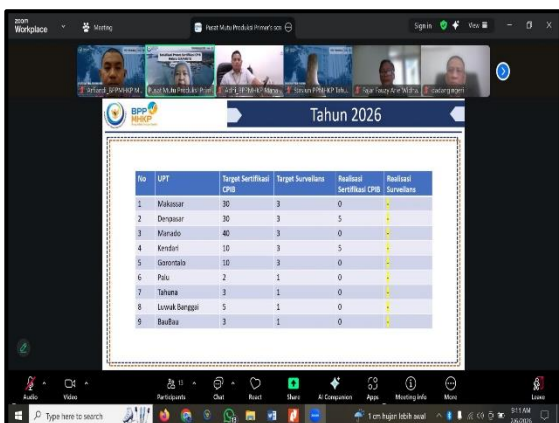
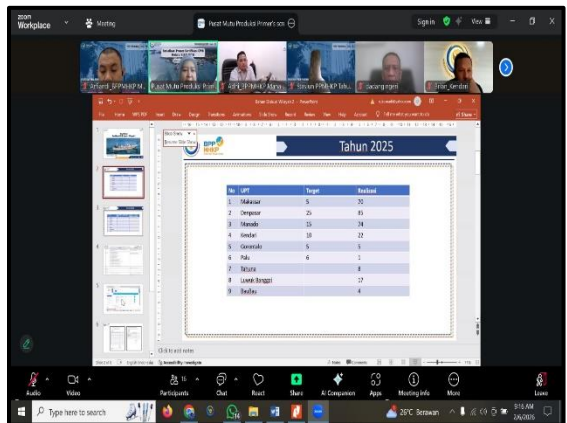
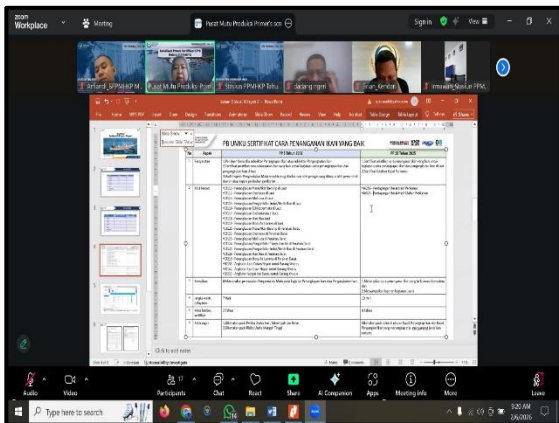
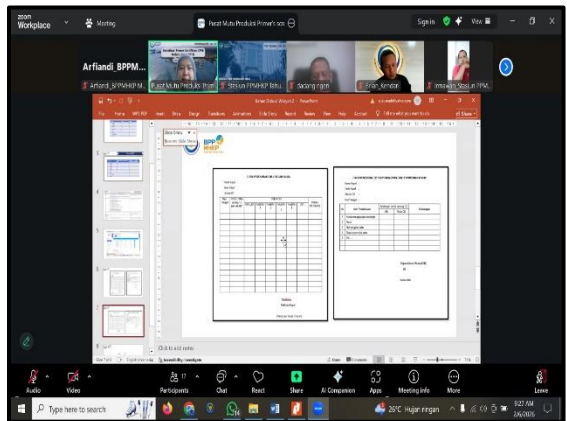
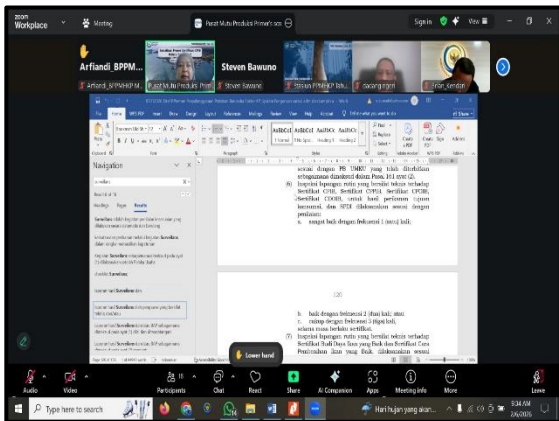
DOKUMENTASI KEGIATAN
SHARING SESSION CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN
KAPASITAS INSPEKTUR MUTU DAN ASISTEN INSPEKTUR MUTU YANG BERTEMPAT DI AULA
BPPMHKP MAKASSAR
4 FEBRUARI 2026



DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI SERTIFIKASI CPIB KAPAL MELALUI PORTAL SIAPMUTU
VERSI 1.0.3 – 2025.12.08 DI AULA KANTOR BPPMHKP MAKASSAR
5 FEBRUARI 2026



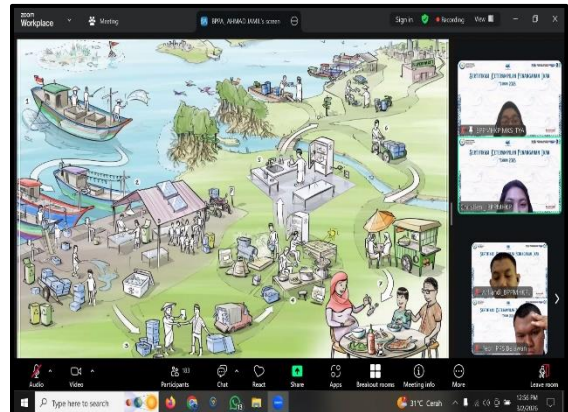
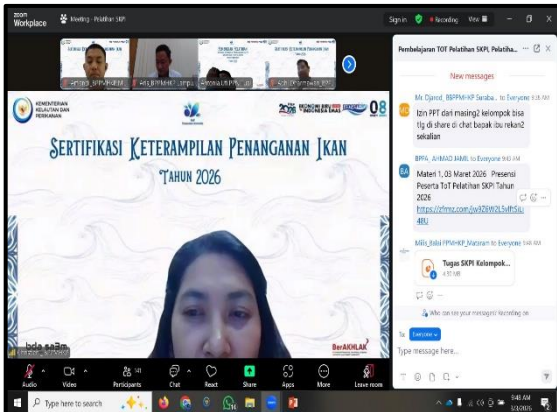
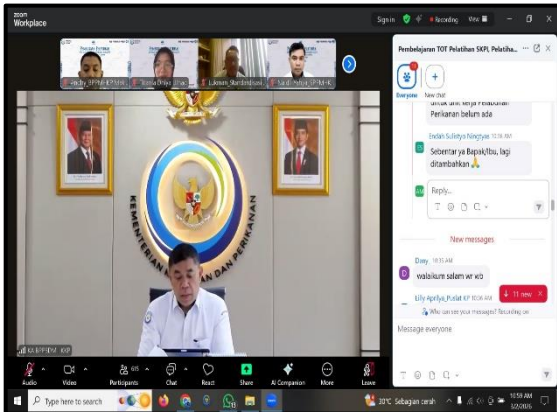
DOKUMENTASI KEGIATAN HELP DESK KOORDINASI SCIPB 2026 WILAYAH 2 SECARA ONLINE OLEH PUSAT PRODUKSI PRIMER. 6 FEBRUARI 2026



DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI PENGISIAN CEKLIS CPIB KAPAL MELALUI PORTAL SIAPMUTU VERSI 1.0.3 –
2025.12.08 DI AULA KANTOR BPPMHKP MAKASSAR
26 FEBRUARI 2026



DOKUMENTASI KEGIATAN TRAINING OF TRAINER (TOT) SERTIFIKASI KETERAMPILAN PENANGANAN IKAN (SKPI) YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPPSDMKP 2-4 MARET 2026



DOKUMENTASI KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION SOSIALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH
BERTEMPAT DI PPI PAOTERE
4 MARET 2026



DOKUMENTASI
SERTIFIKAT APRESIASI DARI ASOSIASI PERIKANAN POLE & LINE
DAN HANDLINE INDONESIA (AP2HI)
KEPADA INSPEKTUR MUTU BPPMHKP MAKASSAR



AP2HI
Asosiasi Perikanan Pole & Line
dan Handline Indonesia
Indonesian Pole & Line Association

SERTIFIKAT APRESIASI



Dengan bangga diberikan kepada:

Mohammad Zamrud, S.Pi, M.P

*(Plt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar)*

Pada Program Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di kapal
rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan,
dalam periode tahun 2025

ABRIZAL ANDREW ANG

Ketua AP2HI



AP2HI
Asosiasi Perikanan Pole & Line
dan Handline Indonesia
Indonesian Pole & Line and Handline Fishermen Association

SERTIFIKAT

APRESIASI



Dengan bangga diberikan kepada:

Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc

(Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda)

Pada Program Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di kapal
rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan,
dalam periode tahun 2025

ABRIZAL ANDREW ANG
Ketua AP2HI



AP2HI
Asosiasi Perikanan Pole & Line
dan Handline Indonesia
Indonesian Pole & Line and Handline Fishermen Association

SERTIFIKAT

APRESIASI



Dengan bangga diberikan kepada:

Arfiandi, S.Pi

(Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil)

Pada Program Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di kapal
rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan,
dalam periode tahun 2025

ABRIZAL ANDREW ANG
Ketua AP2HI

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM
MAKASSAR TAHUN 2026**

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)
Nama Timja	:	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	72								72
Realisasi	88,10								
% Capaian	122,36								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan I 2026 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Produk)
3. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) pada unit distribusi lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
4. Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Surveilen HACCP)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.

CARA PENGUKURAN

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2026 yaitu :

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B+C}{xn} \\ &= \frac{93,75+90,56+80}{3} \\ &= 88,10 \%\end{aligned}$$

Dimana

%X =	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A =	Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B =	Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
C =	Persentase Surak Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan pada unit supplier
xn =	Total dari unsur pembentuk (3)

Catatan:

Data variable perhitungan diperoleh dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan I tahun 2026 terealisasi sebesar 88,10 %, dari target 72 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 122,36 %, dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 115,08 %.

Adapun jumlah sertifikat yang diterbitkan pada Triwulan I sebagai berikut:

1. HACCP sejumlah 43 ruang lingkup sertifikat.
2. SKP sejumlah 22 ruang lingkup sertifikat.
3. SPDI sejumlah 1 ruang lingkup sertifikat.

Pelaksanaan kegiatan SKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (mengatur persyaratan HACCP) serta sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (surveilien HACCP) yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan konsistensi dalam Penerapan System Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan I telah dilaksanakan surveilien HACCP dan pengambilan sampel UJI sebanyak 93 UPI.

Kegiatan pendukung lainnya yang telah dilaksanakan :

1. Pada tanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan Walikota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut adalah memperkenalkan tugas dan fungsi UPT BPPMHKP secara kelembagaan serta meminta dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir di kota Makassar.
2. Pada tanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPI Paotere. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar, Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar yang dihadiri oleh 60 orang nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyadartahuan kepada nelayan tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan Balai PPMHKP Makassar terhadap program Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi modern, produktif dan terintegrasi.
3. Pada tanggal 5 Maret 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi narasumber pada Kegiatan Pelatihan On Line Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Koperasi Sektor Riil Transformasi SDM dan Inovasi Menuju Koperasi Berdaya Saing yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi. Pada kegiatan tersebut Balai PPMHKP Makassar membawakan materi Akselerasi Penerbitan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan Untuk Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan Berbasis Koperasi.
4. Pada tanggal 30 Januari 2026 telah dilakukan rapat persiapan pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) PB Umku dan tindak lanjut PP 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kegiatan ini diadakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen, BPPMHKP KKP;
5. Pada tanggal 11 Maret 2026 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Verifikator Layanan Sistem Distribusi Ikan Online (DISNILINE), kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Mutu pasca Panen, BPPMHKP KKP.

Kegiatan ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu diantaranya untuk kegiatan sertifikasi HACCP sebanyak 15 orang dan kegiatan sertifikasi SKP sebanyak 16 orang serta Sertifikasi SPDI sebanyak 3 orang.

Realisasi Anggaran kegiatan pasca panen Tahun 2026 :

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran setelah revisi	Efisiensi	Realisasi	Sisa Anggaran
a. 3989.PDC.002. A. Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan	30.000.000	12.231.000	17.769.000	1.290.000	10.941.000
b. 3989.PDC.002. B. Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit Pengolahan Ikanskala UMKM dan Menengah Besa	48.125.000	19.689.000	28.436.000	4.954.000	14.735.000
c. 3989.PDC.002. C. Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	68.243.000	68.243.000	-	33.459.000	34.784.000
d. 3989.QIC.003. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	5.000.000	3.500.000	1.500.000	0	3.500.000
TOTAL	151.368.000	103.663.000	47.705.000	39.703.000	63.960.000

Pada Tahun 2026 pagu anggaran sebesar RP. 151.368.000,- setelah dilakukan efisiensi sebesar RP. 103.663.000,- dan realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 39.703.000,- , dibandingkan dengan Tahun 2025 pagu sebesar Rp. 58.196.000 dan terealisasi Rp. 22.365.000,- atau 38,43%.

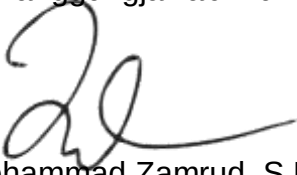
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum terlaksananya Sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sulawesi Selatan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Koordinasi dengan UPT DJPT KKP terkait percepatan pelaksanaan sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Selatan.	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2026, terkait teknis pelaksanaan Sertifikasi SKP yang lebih efisien dan efektif.	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen

Makassar, 13 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

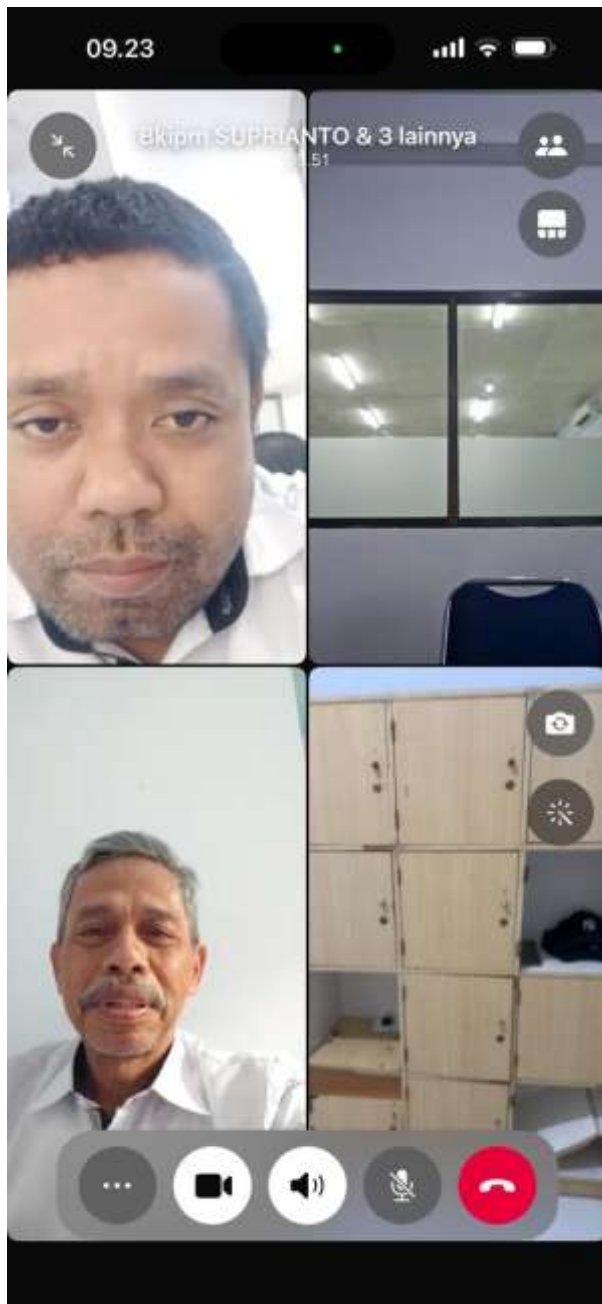

Mohammad Zamrud, S.Pi, MP

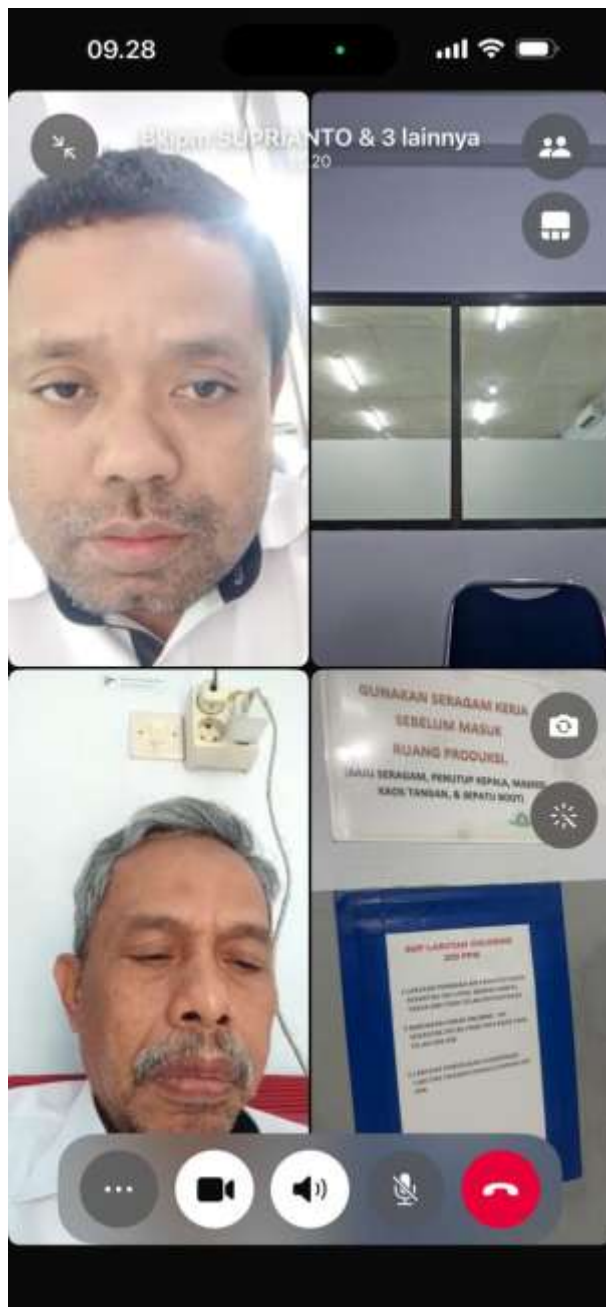
DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI



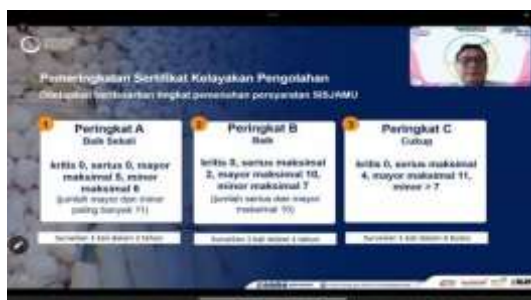


DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN DI UPI





Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025



Dokumentasi Kegiatan SPDI TW I 2026

1. Persiapan pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) PB Umku dan tindak lanjut PP 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pada tanggal 30 Januari 2026 yang diadakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen, BPPMHKP KKP.



2. Rapat Koordinasi Verifikator layanan Sistem Distribusi Ikan Online (DISNILINE), pada tanggal 11 Maret 2026, diselenggarakan oleh Pusat Mutu pasca Panen, BPPMHKP KKP



3. Pelaksanaan sertifikasi SPDI di unit pemasok CV. Nuraeni yang berlokasi di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Februari 2026, dilaksanakan oleh Inspektur Mutu Balai PPMHKP Makassar.



**Dokumentasi Kegiatan Audiensi bersama Walikota Makassar
Pada tanggal 5 Januari 2026**



**Dokumentasi Kegiatan Audiensi bersama Walikota Makassar
Pada tanggal 4 Maret 2026**



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA BALAI PPMHKP MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator (3)	:	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar
Nama Tim Kerja	:	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	71	0	71	0	71	71	71	71	71
Realisasi	74.81								
% Capaian	105%								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian Selama Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV
 Semester I : Capaian Q1 + Capaian Q2
 Semester II : Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan : Capaian Diakhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu :

- I. Program Prioritas Kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana pada kegiatan pengawasan mutu domestik Balai PPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- II. Program Prioritas Ketiga KKP yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu Balai PPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan stakeholder dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain :

1. Pengawasan Mutu: Melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Dalam hal ini, Balai PPMHKP Makassar mengikuti kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan pengawasan mutu impor tahun 2025 dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu perikanan domestik tahun 2026 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat dan Pengawasan Mutu Impor yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen pada tanggal 29 Januari 2026 yang dihadiri oleh seluruh UPT BPPMHKP secara virtual. Secara garis besar pada kegiatan ini Pusat Mutu Pasca Panen melakukan review kegiatan tahun sebelumnya dan berkoordinasi untuk menyamakan persepsi antara Pusat dan UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebesar 71% sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik rencananya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester dan untuk lokasi kegiatan di Pasar Tradisional, Pasar Modern, Pelabuhan atau TPI, dan UMKM Suplier MBG.

Pada triwulan I tahun 2026 berdasarkan Surat dari Pusat Mutu Pasca Panen tanggal 12 Februari 2026 perihal Pelaksanaan Giat Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kabupaten Maros dengan lokus pengawasan yaitu TPI Labuang dan Poklaksar UMKM Cahaya Bandeng.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Perikanan Domestik Tahun 2026, Pengawasan Mutu Impor dan Review Kegiatan Tahun 2025	29 Januari 2026	Pusat Mutu Pasca Panen BPPMHKP
2.	Koordinasi Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros	9 Februari 2026	Balai PPMHKP Makassar
3.	Kunjungan lapangan ke lokasi pengawasan, pengisian check list penilaian sarana, prasarana, sanitasi & hygiene dan pengambilan sampel uji	17 Februari 2026	Balai PPMHKP Makassar

Sampel uji yang diambil pada Lokasi TPI Labuang terdapat 5 (lima) sampel yaitu Cumi-cumi segar, Bandeng segar, Katamba segar, Layang segar dan Udang Vannamei segar sedangkan di Poklaksar UMKM Cahaya Bandeng diambil 2 (dua) sampel produk yaitu Bandeng segar dan Bandeng Tanpa Duri yang selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Balai PPMHKP Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Salmonella spp*, dan

Formalin dan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sudah sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene di TPI Labuang yang memperoleh nilai dengan kriteria **BAIK** dimana lokasi berada ditempat bebas pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat, saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu, transportasi pengangkutan produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga sedangkan di Poklalsar UMKM Cahaya Bandeng memperoleh nilai dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik sektor produksi pasca panen di wilayah RI diperoleh dari hasil penghitungan persentase nilai sarana & prasarana sebesar 60% dan nilai pengujian produk sebesar 40% dengan formula :

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

$$(60\% \times 87.5) + (40\% \times 97) = \mathbf{91,3}$$

Sedangkan nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan bahan berbahaya dan monitoring cemaran lingkungan perairan sektor produksi primer di wilayah RI diperoleh dari hasil penghitungan jumlah pengujian yang dilakukan dibagi jumlah pengujian yang wajib dilakukan dikali 100 dengan formula :

$$X = \frac{(A1:A2) + (B1:B2)}{2} \times 100 \%$$

Dimana :

X : Hasil akhir

A1 : Hasil pengujian yang memenuhi persyaratan

A2 : Jumlah pengujian yang dilakukan

B1 : Skor jumlah pengujian

B2 : Nilai total skor

$$\begin{aligned} X &= \frac{(5:6) + (1:3)}{2} \times 100 \% \\ X &= \frac{83.33 + 33.33}{2} \times 100 \% \\ X &= \frac{116.66}{2} \times 100 \% \\ &= \mathbf{58,33} \end{aligned}$$

Untuk indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan formula :

$$X = \frac{A + B}{2} \times 100 \%$$

Dimana :

X : nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

A : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen di wilayah RI

$$X = \frac{58.33 + 91.3}{2} \times 100 \%$$

$$X = \frac{149.63}{2} \times 100 \%$$

$$= 74.81$$

Pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar mendapatkan nilai 74.81 atau sebesar 105 % jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025

Alokasi anggaran kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2026 sebesar Rp.7.000.000,- bersumber dari dana PNPB yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai PPMHKP Makassar Tahun Anggaran 2026. Walaupun terdapat kebijakan pemerintah pusat yang masih melakukan blokir atau penghematan anggaran diawal tahun 2026 sebesar Rp. 3.972.000 tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Pada pelaksanaan kegiatan di triwulan I tahun 2026 ini anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 1.640.000 atau sebesar 54.16%

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 13 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros, dan Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Maros.

Untuk indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :

1. Hasil Perikanan impor yang diawasi mutunya
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan
3. Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan

I. Hasil Perikanan Impor Yang Diawasi Mutunya

Kegiatan pengawasan mutu impor dilakukan untuk memastikan produk yang masuk ke dalam negeri aman dikonsumsi dan memenuhi standar sanitasi. Balai PPMHKP Makassar memastikan produk yang masuk tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2026 tentang keamanan pangan, Pemasok ikan dari luar negeri wajib teregistrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bahan baku yang masuk memenuhi standar hygiene.

Pengawasan mutu impor juga dilakukan melalui uji laboratorium terhadap cemaran mikroba, residu, dan keamanan pangan. Pada triwulan I tahun 2026 kegiatan pengawasan mutu impor belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2026.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan

Pada triwulan I tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 4 (empat) Unit Pengolahan Ikan yang melakukan kegiatan ekspor produk hasil kelautan dan perikanan, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama UPI	Waktu Pelaksanaan	Petugas
1.	CV. Anugrah Bahari Mandiri	6 Februari 2026	-Waode Suharni, S.Pi -Kamaruddin, S.P,M.
2.	CV. Mitra Sejahtera	24 Februari 2026	-Patmawati, S.St.Pi -Andi Muhammad Haedar
3.	PT. Asia Sejahtera Mina TBK	3 Maret 2026	-Muhammad Irfan Rais, S.Pi -Suprianto, A.Md.Pi.,S.P
4.	PT. Global Maju Pratama	13 Maret 2026	-Mohammad Zamrud, S.Pi.,M.P -Taufiq, S.PKP

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan data yang tersedia pada aplikasi SIAP Mutu dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan Balai PPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha

ekspor. Hasil dari kegiatan moneyv ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 25.000.000 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 15.000.000 atau sekitar 60%. Pada Triwulan I tahun 2026, anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.460.000 atau sekitar 14,6%. Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025, kondisi tersebut berbeda karena pada tahun 2025 terjadi blokir anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui *automatic adjustment*.

III. Pengawasan Cemaran Bahan Berbahaya Di Lingkungan Perairan

Pada triwulan I tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan dengan lokasi kegiatan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring Residu Cemaran Bahan Berbahaya di Perairan Laut Zona PIT dan Perairan Umum WPP-NRI Perairan Darat	2 Februari 2026	Pusat Mutu Primer BPPMHKP
2.	Kunjungan lapangan ke lokasi pengawasan bahan berbahaya dan monitoring cemaran lingkungan perairan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai	5-6 Maret 2026	Balai PPMHKP Makassar

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan target yang disampaikan pada saat rapat persiapan kegiatan pada tanggal 2 Februari 2026 bersama Pusat Mutu Primer yaitu sebanyak 1 (satu) lokasi di TPI Lappa, Kabupaten Sinjai.

Monitoring cemaran perairan merupakan salah kegiatan pendukung IKU utama program prioritas kedua Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang dikonsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun hayati laut dan logam berat dan untuk SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2026 sebanyak 4 orang Inspektur Mutu.

Kegiatan ini dilaksanakan secara onsite dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.500.000, jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp. 27.500.000 atau sekitar 87%, pada triwulan I tahun 2026 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.644.000 atau sekitar 45.72%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan I tahun 2025, kondisi tersebut berbeda karena pada tahun 2025 terjadi blokir anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui *automatic adjustment*.

Tabel Data Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2026

No	Nama Kegiatan	Pagu	Efisiensi	Realisasi
1.	3989.QIA.001. Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya	Rp.7.000.000	Rp. 3.972.000	Rp. 1.640.000 (54.16 %)
2.	3989.QIA.003. Hasil Perikanan impor yang diawasi mutunya	Rp.5.000.000	Rp. 3.000.000	0
3.	3989.QIC.003. Jumlah Produksi Primer yang konsisten menerapkan Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Rp.10.000.000	Rp. 2.924.000	Rp. 1.460.000 (20.63 %)

4.	3989.QIA.002. Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan	Rp. 37.500.000	Rp. 18.594.000	Rp. 8.644.500 (45.72 %)
----	---	----------------	----------------	----------------------------

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah :

- Pengawasan Mutu Domestik : Belum optimalnya kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu domestik
- Pengawasan Mutu Impor : Belum dilaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di semester II tahun 2026. 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor	Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

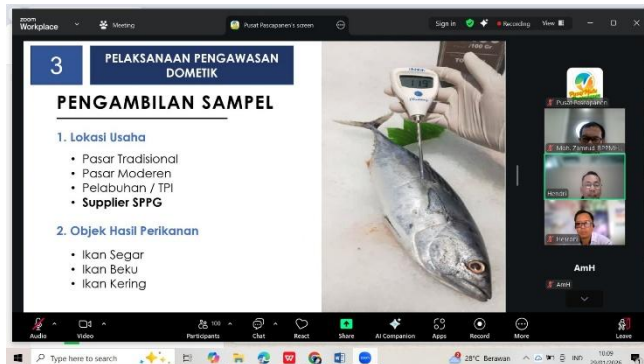
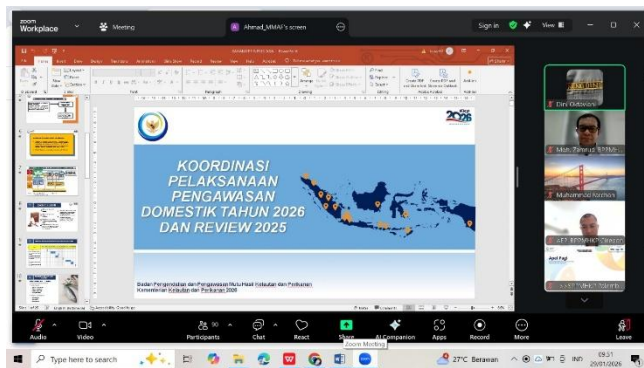
Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros pada tanggal 9 Februari 2026. 2. Penyampaian laporan hasil uji sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut hari natal dan tahun baru ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros pada tanggal 5 Februari 2026.	Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Makassar, 10 April 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Mohammad Zamrud

Dokumentasi Giat Koordinasi Bersama Tim Pusat Mutu Pasca Panen



Giat Koordinasi Bersama Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Maros



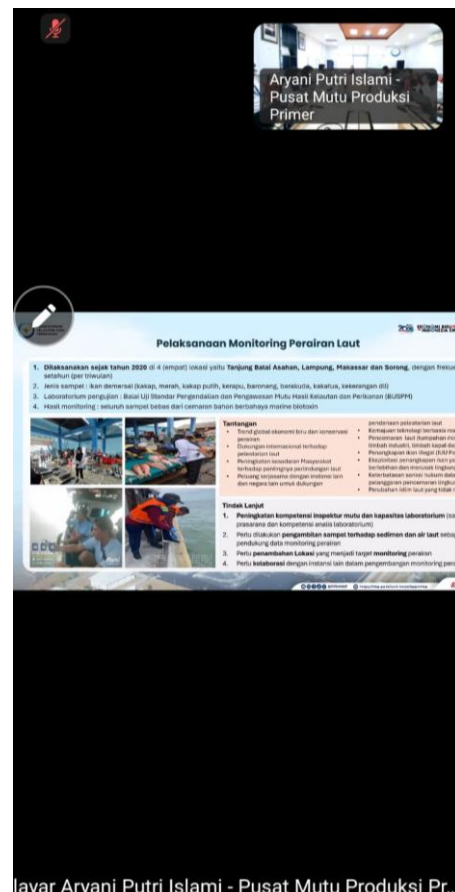
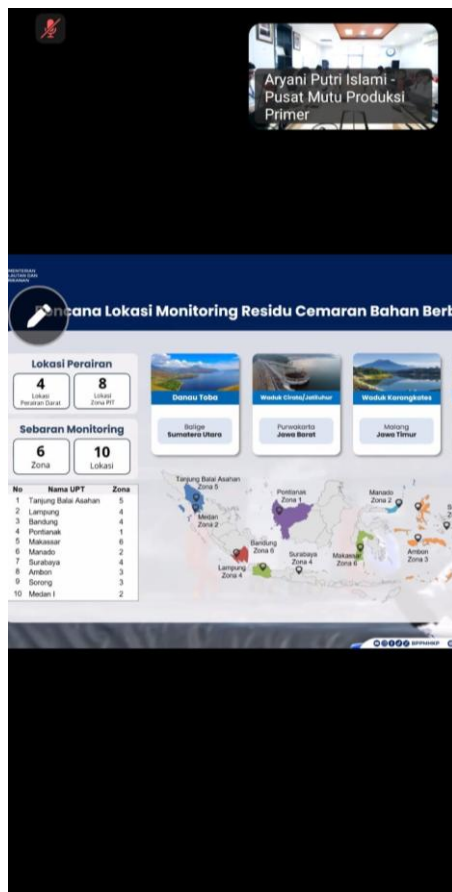
Giat Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik Di TPI Labuang Dan Poklalsar UMKM Cahaya Bandeng



Dokumentasi Giat Monitoring Dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP Pada Unit Pengolahan Ikan



Dokumentasi Giat Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring Residu Cemaran Bahan Berbahaya di Perairan Laut Zona PIT dan Perairan Umum WPP-NRI Perairan Darat



Dokumentasi Giat Pengawasan Bahan Berbahaya Dan Monitoring Cemaran Lingkungan Perairan Di TPI Lappa Kabupaten Sinjai



Hasil Uji Laboratorium

Untuk hasil uji sampel yang dilaksanakan di Laboratorium Penguji Balai PPMHKP Makassar, dari 7 (tujuh) sampel yang diuji tidak ditemukan adanya penyimpangan hasil sesuai dengan laporan hasil uji yang telah diterbitkan sebagai berikut.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 008/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/II/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : Polakshar Cahaya Bandeng
- 2. Alamat/
Address : Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 17 Februari 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Bandeng Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 011/NL/II/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 17 Februari 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Kenampakan	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Tekstur	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Bau	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Daging	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
2	Biologi/ Biology	Angka Lempeng Total (ALT)	1,7 x 10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.3-2015 (Angka Lempeng Total)	
		Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
3	Kimia/ Chemical	Formalin*)	0 ppm	0 ppm	Formaldehyde Teskit	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note ~~This result of the test represent the population taken~~ /This result of the test are only valid for the tested sample **)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
~~Kepala UPT/~~Penanggungjawab Laboratorium**)
~~Head Of TIU/~~Laboratory in Charge**)



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 009/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/II/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : Polakshar Cahaya Bandeng
- 2. Alamat/
Address : Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 17 Februari 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Bandeng Tanpa Duri Beku
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 012/NL/II/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 17 Februari 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Organoleptik/ Organoleptic	Dalam Keadaan Beku				
		Pengeringan (Dehidrasi)	8	Min. 7 (SNI 4110:2020)	SNI 2346:2015	
		Perubahan Warna (Diskolorasi)	8	Min. 7 (SNI 4110:2020)	SNI 2346:2015	
		Sesudah Pelelehan				
		Kenampakan	8	Min. 7 (SNI 4110:2020)	SNI 2346:2015	
		Tekstur	8	Min. 7 (SNI 4110:2020)	SNI 2346:2015	
		Bau	8	Min. 7 (SNI 4110:2020)	SNI 2346:2015	
		Daging	8	Min. 7 (SNI 4110:2020)	SNI 2346:2015	
2	Biologi/ Biology	Angka Lempeng Total (ALT)	1,6 x 10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g (SNI 4110:2020)	SNI 2332.3-2015 (Angka Lempeng Total)	
		Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 4110:2020)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif/25 g	Negatif/25 g (SNI 4110:2020)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
3	Kimia/ Chemical	Formalin*)	0 ppm	0 ppm	Formaldehyde Teskit	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note ~~This result of the test represent the population taken~~ /This result of the test are only valid for the tested sample **)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
~~Kepala UPT/~~Penanggungjawab Laboratorium**)
~~Head Of TIU/~~Laboratory in Charge**)



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 003/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/II/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Labuang Maros
- 2. Alamat/
Address : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 17 Februari 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Layang Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 006/NL/II/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 17 Februari 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Kenampakan	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Tekstur	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Bau	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Daging	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
2	Biologi/ Biology	Angka Lempeng Total (ALT)	2,7 x 10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.3-2015 (Angka Lempeng Total)	
		Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
3	Kimia/ Chemical	Formalin*)	0 ppm	0 ppm	Formaldehyde Teskit	
		Histamin	30,25 mg/kg	Maks. 100 mg/kg (SNI 2729:2021)	ISO 19343:2017 (Kadar Histamin (HPLC)- (Spectrophotometry))	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note ~~This result of the test represent the population taken~~ /This result of the test are only valid for the tested sample **)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
~~Kepala UPT~~/Penanggungjawab Laboratorium**)
~~Head Of TIU~~/Laboratory in Charge**)



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whichever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 004/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/II/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Labuang Maros
- 2. Alamat/
Address : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 17 Februari 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Katamba Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 007/NL/II/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 17 Februari 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Kenampakan	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Tekstur	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Bau	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Daging	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
2	Biologi/ Biology	Angka Lempeng Total (ALT)	2,1 x 10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.3-2015 (Angka Lempeng Total)	
		Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
3	Kimia/ Chemical	Formalin*)	0 ppm	0 ppm	Formaldehyde Teskit	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note ~~This result of the test represent the population taken~~ /This result of the test are only valid for the tested sample **)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
~~This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).~~
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
~~The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).~~

Makassar, 23 Februari 2026
~~Kepala UPT/~~Penanggungjawab Laboratorium **)
~~Head Of TIU/~~Laboratory in Charge **)



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 005/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/II/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Labuang Maros
- 2. Alamat/
Address : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 17 Februari 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Cumi-cumi Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 008/NL/II/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 17 Februari 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Kenampakan	8	Min. 7 (SNI 9192:2023)	SNI 2346:2015	
		Tekstur	8	Min. 7 (SNI 9192:2023)	SNI 2346:2015	
		Bau	8	Min. 7 (SNI 9192:2023)	SNI 2346:2015	
2	Biologi/ Biology	Angka Lempeng Total (ALT)	1,6 x 10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g (SNI 9192:2023)	SNI 2332.3-2015 (Angka Lempeng Total)	
		Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 9192:2023)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 9192:2023)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
3	Kimia/ Chemical	Formalin*)	0 ppm	0 ppm	Formaldehyde Teskit	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This result of the test represent the population taken /This result of the test are only valid for the tested sample**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
Kepala UPT/Penanggungjawab Laboratorium**)
Head Of TIU/Laboratory in Charge^{st)}



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whichever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 006/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/II/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Labuang Maros
- 2. Alamat/
Address : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 17 Februari 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Udang Vannamei Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 009/NL/II/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 17 Februari 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Kenampakan	9	Min. 7 (SNI 2728:2018)	SNI 2346:2015	
		Tekstur	9	Min. 7 (SNI 2728:2018)	SNI 2346:2015	
		Bau	8	Min. 7 (SNI 2728:2018)	SNI 2346:2015	
2	Biologi/ Biology	Angka Lempeng Total (ALT)	1,0 x 10 ⁴ koloni/g	1,0 x 10 ⁴ koloni/g (SNI 2728:2018)	SNI 2332.3-2015 (Angka Lempeng Total)	
		Escherichia coli	<3 APM/g	<3 APM/g (SNI 2728:2018)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2728:2018)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
3	Kimia/ Chemical	Formalin*)	0 ppm	0 ppm	Formaldehyde Teskit	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This result of the test represent the population taken /This result of the test are only valid for the tested sample**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
Kepala UPT/Penanggujawab Laboratorium**)
Head Of TIU/Laboratory in Charge**)



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whichever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 007/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/II/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

1. Pelanggan/
Customer

: TPI Labuang Maros
2. Alamat/
Address

: Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date

: 17 Februari 2026
4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample

: Ikan Bandeng Segar
5. Kode sampel/
Sample Code

: 010/NL/II/2026
6. Tanggal Pengujian/
Testing date

: 17 Februari 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Kenampakan	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Tekstur	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Bau	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
		Daging	8	Min. 7 (SNI 2729:2021)	SNI 2346:2015	
2	Biologi/ Biology	Angka Lempeng Total (ALT)	2,6 x 10 ⁴ koloni/g	10 ⁵ koloni/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.3-2015 (Angka Lempeng Total)	
		Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
3	Kimia/ Chemical	Formalin*)	0 ppm	0 ppm	Formaldehyde Teskit	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note ~~This result of the test represent the population taken~~ /This result of the test are only valid for the tested sample **)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
~~Kepala UPT/~~Penanggungjawab Laboratorium**)
~~Head Of TIU/~~Laboratory in Charge**)



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA
JALAN RAYA SETU NOMOR 1, SETU CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR 13880
TELEPON (021) 8446861
LAMAM www.kkp.go.id SUREL busppmhkp.jkt@kkp.go.id



HASIL UJI

TEST RESULT

Nomor/Number: 0281/BUSKIPM/KI.210/IV/2026

Menyatakan/ :

This is certify that

1. Nama Pelanggan / Customer : BBKIPM Makassar
2. Alamat / Address : Jl. Dakota No. 24 Sudiang Raya - Makassar
Telp. 081341443690, Email: bbki.hasanuddin@gmail.com
3. Tanggal Penerimaan / Receipt Date : 01 April 2026
4. Kode Contoh Uji / Test Sample Code : 0281
5. Tanggal Pengujian / Date of analysis : 01 April 2026

No	Bidang Pengujian / Test Field	Nama Contoh uji / Test sample Name	Bentuk Contoh uji / Test sample form	Parameter / Parameter	Hasil (Satuan) / Result (unit)	Persyaratan Mutu / Quality Requirement	Metode Acuan / Reference Method	Keterangan / Information
1	Lab. Kimia	Kerapu 015 A	Segar	Ciguatoxin Non Ruang Lingkup	Tidak Terdeteksi		Mouse Bioassay	
2	Lab. Kimia	Kerapu 015 A	Segar	Pb Masuk Ruang Lingkup	< 0,011 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	
3	Lab. Kimia	Kerapu 015 A	Segar	Cd Masuk Ruang Lingkup	< 0,0039 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	
4	Lab. Kimia	Baronang 016 A	Segar	Ciguatoxin Non Ruang Lingkup	Tidak Terdeteksi		Mouse Bioassay	
5	Lab. Kimia	Baronang 016 A	Segar	Pb Masuk Ruang Lingkup	< 0,011 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	
6	Lab. Kimia	Baronang 016 A	Segar	Cd Masuk Ruang Lingkup	< 0,0039 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	
7	Lab. Kimia	Kakatua 017 A	Segar	Ciguatoxin Non Ruang Lingkup	Tidak Terdeteksi		Mouse Bioassay	
8	Lab. Kimia	Kakatua 017 A	Segar	Pb Masuk Ruang Lingkup	< 0,011 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	
9	Lab. Kimia	Kakatua 017 A	Segar	Cd Masuk Ruang Lingkup	0,006 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	
10	Lab. Kimia	Kakap Merah 018 A	Segar	Ciguatoxin Non Ruang Lingkup	Tidak Terdeteksi		Mouse Bioassay	
11	Lab. Kimia	Kakap Merah 018 A	Segar	Pb Masuk Ruang Lingkup	< 0,011 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	
12	Lab. Kimia	Kakap Merah 018 A	Segar	Cd Masuk Ruang Lingkup	< 0,0039 mg/Kg		SNI 2354.5:2011 (AAS)	

Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji**)

Note This result of the test represent the population taken/This result of the test are only valid for the tested sample.

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (Satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original Sign).

3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala Balai Uji Standar KIPM (Stempel Copy)

The report of test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Head of fish Quarantine and Inspection Standard Testing Laboratory (Copy Sign)

Jakarta, 08 April 2026
Penanggungjawab Laboratorium**)



Hutomo Widiatmojo, S.Far
NIP. 19870509 201012 1 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 003/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/III/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Lappa Sinjai
- 2. Alamat/
Address : Jl. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 06 Maret 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Kerapu Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 015/NL/III/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 06 Maret 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
2	Kimia/ Chemical	Merkuri (Hg)	ND (LOD : 0,0247 mg/kg)	Maks. 0,50 mg/kg (SNI 2729:2021)	SNI 2354.6:2016 (Spektrofotometri Serapan Atom)	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This result of the test represent the population taken /This result of the test are only valid for the tested sample**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 13 Maret 2026
~~Kepala UPT/Penanggungjawab Laboratorium**)~~
~~Head Of TIU/Laboratory in Charge**)~~



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 004/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/III/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Lappa Sinjai
- 2. Alamat/
Address : Jl. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 06 Maret 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Baronang Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 016/NL/III/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 06 Maret 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
2	Kimia/ Chemical	Merkuri (Hg)	ND (LOD : 0,0247 mg/kg)	Maks. 0,50 mg/kg (SNI 2729:2021)	SNI 2354.6:2016 (Spektrofotometri Serapan Atom)	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This result of the test represent the population taken /This result of the test are only valid for the tested sample**)
- 2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
 - 3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 13 Maret 2026
~~Kepala UPT/Penanggungjawab Laboratorium**)~~
~~Head Of TIU/Laboratory in Charge**)~~



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whichever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 005/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/III/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Lappa Sinjai
- 2. Alamat/
Address : Jl. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 06 Maret 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Kakatua Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 017/NL/III/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 06 Maret 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
2	Kimia/ Chemical	Merkuri (Hg)	ND (LOD : 0,0247 mg/kg)	Maks. 0,50 mg/kg (SNI 2729:2021)	SNI 2354.6:2016 (Spektrofotometri Serapan Atom)	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This result of the test represent the population taken /This result of the test are only valid for the tested sample**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 13 Maret 2026
~~Kepala UPT/Penanggungjawab Laboratorium**)~~
~~Head Of TIU/Laboratory in Charge**)~~



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whichever does not apply



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR



JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor / Number : 006/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/III/2026

Menyatakan bahwa/
This is certify that

- 1. Pelanggan/
Customer : TPI Lappa Sinjai
- 2. Alamat/
Address : Jl. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
- 3. Tanggal Penerimaan/
Receipt Date : 06 Maret 2026
- 4. Jenis Contoh Uji/
Type of Sample : Ikan Kakap Putih Segar
- 5. Kode sampel/
Sample Code : 018/NL/III/2026
- 6. Tanggal Pengujian/
Testing date : 06 Maret 2026

No.	Bidang Pengujian/ Test Field	Parameter/ Parameter	Hasil (satuan) Result (unit)	Persyaratan Mutu/ Quality Requirement	Metode Acuan/ Reference Method	Keterangan/ Information
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologi/ Biology	Escherichia coli	<1 APM/g	1 APM/g (SNI 2729:2021)	SNI 2332.1:2015 (Identifikasi Escherichia coli)	
		Salmonella spp	Negatif / 25 g	Negatif / 25 g (SNI 2729:2021)	SNI 01-2332.2-2006 (Salmonella)	
2	Kimia/ Chemical	Merkuri (Hg)	ND (LOD : 0,0247 mg/kg)	Maks. 0,50 mg/kg (SNI 2729:2021)	SNI 2354.6:2016 (Spektrofotometri Serapan Atom)	

- Catatan/ : 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This result of the test represent the population taken /This result of the test are only valid for the tested sample**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 13 Maret 2026
~~Kepala UPT/Penanggungjawab Laboratorium**)~~
~~Head Of TIU/Laboratory in Charge**)~~

 Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whichever does not apply

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator	:	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target							71		71
Realisasi									
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional. - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar diperoleh dari rata-rata dari nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS), nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017, dan nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP pada Balai PPMHKP Makassar. - Nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi. - SNI ISO/IEC 17025:2017 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (SNI ISO/IEC 17025:2017) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi: - Ruang Lingkup; - Acuan Normatif; - Persyaratan Umum; - Persyaratan Struktural; - Persyaratan Sumber Daya; - Persyaratan Proses; - Persyaratan Sistem Manajemen - SNI ISO/IEC 17020:2012 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

- Untuk menghitung nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu maka digunakan rumus :

$$X = \frac{A + B + C}{3} \times 100\%$$

Dimana :

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Makassar

A = Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012

B = Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017

C = Presentase Nilai Penerapan Quality Management System (QMS)

- Pada Triwulan I Tahun 2026, Pusat Manajemen Mutu belum melakukan verifikasi penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012, verifikasi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, maupun verifikasi penerapan Quality Management System (QMS) di Balai PPMHKP Makassar sehingga belum ada nilai realisasi yang dapat disampaikan.
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 berupa surveilan penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan. Selama Triwulan I Tahun 2026 terdapat 93 kali surveilan penerapan HACCP yang terdiri dari :
 1. Bulan Januari sebanyak 35 kali
 2. Bulan Februari sebanyak 35 kali
 3. Bulan Maret sebanyak 23 kali
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 berupa kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan I Tahun 2026, terdapat 2.846 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :
 1. Bulan Januari sebanyak 1.007 kali
 2. Bulan Februari sebanyak 1.316 kali
 3. Bulan Maret sebanyak 523 kali
- Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini dilaksanakan oleh 29 orang mulai dari Manager Puncak, inspektur mutu, hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017.
- Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
- IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar sebesar Rp. 86.000.000 yang mendapatkan efisiensi sebesar Rp. 38.750.000 sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 47.250.000. Pada Triwulan I tahun 2026 belum ada anggaran yang terealisasi karena belum ada kegiatan akreditasi, uji profisiensi, dan iuran tahunan sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu integrasi.
- Pada Triwulan I Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi laboratorium diantaranya :
 - a. 14/01/2026 Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium oleh Labmania
 - b. 21/01/2026 Pengenalan ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen oleh Balai Besar Uji Standar KHIT
 - c. 21/01/2026 Implementasi ISO 11133:2014/AMD2:2020 untuk Jaminan Kualitas Media Mikrobiologi oleh Maja Sains
 - d. 22/01/2026 Webinar Salmonella Detection Based on ISO 6579 oleh DKSH
 - e. 05/02/2026 Webinar ISO 6887 Preparation for microbiological examination oleh JLPPI BPOM
 - f. 18/02/2026 Detection and Enumeration of Listeria oleh DKSH
 - g. 24/02/2026 Basic & Teknik Analisa dengan Instrument AAS oleh Maja Sains
 - h. 12/03/2026 Analisa Kualitatif & Kuantitatif dengan FITR oleh Maja Sains
- Pada Triwulan I Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi lembaga inspeksi diantaranya :
 - a. 29/01/2026 Evaluasi Pelaksanaan Surveilans HACCP (sharing session)

- b. 03/03/2026 Harmonisasi Daftar Periksa Inspeksi Rumput Laut oleh UNIDO – GQSP
- Pada Triwulan I tahun 2026 terdapat kunjungan praktik kerja lapang di Laboratorium Balai PPMHKP Makassar oleh siswa/mahasiswa sebagai berikut :
 - a. Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 10 orang
 - b. Prodi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 5 orang
 - c. Prodi Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan Fakultas Vokasi Unhas sebanyak 4 orang
 - d. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unhas sebanyak 3 orang
 - e. Jurusan Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 1 orang
- Selama Triwulan I tahun 2026, terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang melaksanakan magang berdasarkan program pemagangan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program magang ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Sebagai laboratorium penguji dan juga sebagai lembaga inspeksi yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional, Balai PPMHKP Makassar wajib membayar biaya iuran tahunan sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Potensi masalah terjadi dengan adanya kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia yang memangkas banyak pos anggaran pemerintah. Selain itu pos anggaran iuran tahunan di DIPA Balai PPMHKP Makassar merupakan anggaran yang bersumber dari PNBPN yang memerlukan surat penetapan Maksimum Pencairan (MP) PNBPN dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Jika tidak segera dibayarkan paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahun maka status akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 dapat dibekukan dan diberikan denda terhadap keterlambatan pembayaran.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional dan bagian keuangan untuk mengakselerasi pembayaran iuran tahunan KAN untuk tahun 2026.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi analis laboratorium untuk ruang lingkup yang akan ditambahkan sebagai laboratorium rujukan wilayah Timur Indonesia berupa pelatihan <i>Listeria monocytogenes</i> pada tanggal 18 Februari 2026 oleh DKSH.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 15 April 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja


 Muhammad Irfan Rais

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI ANALIS LABORATORIUM DETECTION AND ENUMERATION OF LISTERIA IN FOOD BASED ON ISO 11290

SIG

Detection and Enumeration of Listeria in Food base on ISO 11290

18 Februari 2026

WWW.SIG-LABORATORY.COM

SIG

PERALATAN

Pengujian *Listeria monocytogenes* dan *Listeria spp.* (ISO 11290)

1 Autoclave, 2 Inkubator dan Oven, 3 Waterbath, 4 pH meter, 5 Mikrotiter, 6 Sterile loops, 7 Petri dishes, 8 Mikroskop, 9 Refrigerator

SIG

UJI KINERJA MEDIA

Metode Pengujian Kuantitatif

1. PRODUKTIVITAS

Tingkat perolehan suatu mikroorganisme target pada medium bakikan dalam kondisi yang ditetapkan.

Rasio Produktivitas (P_R) ditetapkan:

$$P_R = N_t / N_0$$

Keterangan:

- N_t : Jumlah total koloni yang diperoleh pada atau dalam media bakikan yang sedang diuji, misal jumlah koloni di cawan tegak
- N_0 : Jumlah total koloni yang diperoleh pada atau dalam media bakikan acuan yang ditetapkan, diperoleh dari satu atau lebih cawan, dan harus sekitar 100 rfu.

2. SELEKTIVITAS

Tingkat penghambatan dari suatu mikroorganisme non-target pada atau dalam suatu medium bakikan selektif dalam kondisi yang ditetapkan.

- Media bakikan selektif dan medium acuan non-selektif dibandingkan dengan pengenceran yang berbeda dari organisme non-target.

Faktor selektivitas S_p dihitung sbb:

$$S_p = D_0 - D_5$$

Keterangan:

- D_0 : Pengenceran tertinggi yang menunjukkan pertumbuhan pada medium acuan non-selektif
- D_5 : Pengenceran tertinggi yang menunjukkan pertumbuhan yang sebanding pada medium uji selektif.

S_p , D_0 dan D_5 Diekspresikan dalam unit log(1)

SIG

UJI KINERJA B

Interpretasi Hasil Pengujian Kuantitatif

- Hasil akan diterima sebagai valid jika kondisi berikut terpenuhi:
 - ✓ Setiap ulangan harus memberikan hasil **kuantitatif positif** (bakteri target tumbuh)
 - ✓ Setiap hasil yang dilaporkan **termasuk dalam kisaran standar analisis** (hingga 100 koloni untuk metode filtrasi dan hingga 150 koloni untuk metode permukaan).
- Untuk menginterpretasikan hasil, hitung rasio produktivitas (P_R), dan bila perlu, faktor selektivitas (S_p):
 - P_R harus $\geq 0,50$ untuk perbandingan media selektif dengan medium acuan non-selektif
 - P_R harus $\geq 0,70$ untuk perbandingan medium non-selektif dengan medium acuan non-selektif
 - Jika P_R melebihi 1,4 **identifikasi penyebabnya**
 - S_p mikroorganisme non-target minimal 2.

SIG

SIG **DKSH**

DKSH Monthly Microbiology Webinar

SIG **DKSH**

DKSH Monthly Microbiology Webinar

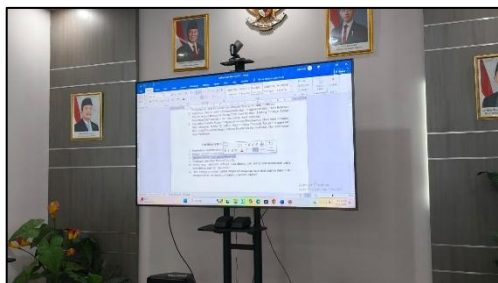
SIG **DKSH**

Webinar interface showing multiple participants in a grid layout.

Webinar interface showing multiple participants in a grid layout.

Webinar interface showing multiple participants in a grid layout.

**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN SURVEILAN HACCP
TANGGAL 29 JANUARI 2026**



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) TW I BALAI PPMHKP MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator (11)	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
Nama Tim/ja	:	Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel di Lingkup Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target			75			82,5	82,5		82,5
Realisasi									
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, TW2, TW3 dan TW4
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
DESKRIPSI Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada: 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan 6. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Target Tahunan IP ASN Tahun 2026 adalah 82,5 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 75 dan Semester II nilai target 82,5

Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan I 2026 belum terealisasi, menunggu sistem aplikasi siap operasional

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai PPMHKP Makassar berupaya melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

Pemanfaatan sumber daya internal :

1. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dengan narasumber jabatan Inspektur Mutu Balai PPMHKP Makassar.
2. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025 dengan narasumber penelaah teknis kebijakan.
3. Sharing session Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
4. Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak tahap hulu
5. Morning briefing petugas pelayanan dan inspektur mutu sebagai bagian dari implementasi core values ASN Berakhlak sebelum memulai aktivitas kerja
6. Briefing Pagi Mengidentifikasi kendala terkait kelancaran Tugas dan Fungsi Dukungan Manajerial Tahun 2026 oleh Plt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM dukungan Manajerial
7. Briefing Pagi Tim Dukungan Manajerial terkait tindak lanjut indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) tahun 2026 oleh Plt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM dukungan Manajerial.

Optimalisasi teknologi (tabel terlampir)

1. Webinar Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Melalui Aplikasi CoreTax
2. Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium
3. Pelatihan Tech Savvy pada ASN kelautan dan Perikanan
4. Pelatihan Pengantar analisis laporan keuangan
5. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025
6. Diseminasi Pengenalan ISO 19011:2018 - Pedoman Audit Sistem Manajemen
7. Webinar Salmonella Detection Based on ISO 6579 Standards
8. Webinar Panduan Pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax
9. Sosialisasi Indikator Penilaian CBIB
10. Webinar Refreshment ISO 6887
11. Sosialisasi Sertifikasi kompetensi okupasi Ahli Budidaya Perairan
12. Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi
13. Bimtek Pengelolaan SIKN dan JIKN tahun 2026
14. Webinar Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Badan beserta Koreksi Fiskal
15. Webinar Teknis Pembuatan Media Mikrobiologi
16. Webinar Detection and Enumeration of Listeria
17. Bimtek Teknis Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan
18. Webinar Kesehatan Aktivitas fisik yang aman dan menyehatkan selama kegiatan kantor
19. Webinar Basic & Teknik Analisa dengan Instrumen AAS
20. E-Learning Dasar-Dasar Keuangan
21. Pelatihan pemanfaatan media sosial dan edukasi publik oleh ASN
22. Pelatihan Dasar dasar keuangan
23. Microlearning Membangun Komitmen Hijau ASN
24. Webinar Panduan Mudah Pelaporan SPT Tahunan Badan Untuk Sektor Manufaktur
25. Webinar Menjamin Mutu dan Keamanan Produk Perikanan Melalui Penerapan SNI Pakan Ikan
26. Elearning Dasar dasar keuangan.

Perencanaan strategis dan kolaborasi :

1. Sosialisasi Penilaian CBIB kepada Penyuluh Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan bersama dengan Balai PPMHKP Makassar.

2. Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal melalui Aplikasi SIAP MUTU yang dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Pelabuhan Perikanan Untia, Satwas PSDKP Makassar, penyuluh perikanan, Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Balai PPMHKP Makassar sebagai narasumber.
3. Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih, kolaborasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar dan Balai PPMHKP Makassar sebagai narasumber.
4. Forum Desa Bisa Ekspor Chapter Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dan BPPMHKP Makassar sebagai narasumber dan peserta.
5. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros melakukan kunjungan ke Laboratorium Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Makassar untuk melakukan kunjungan untuk melihat proses pengujian laboratorium bidang mikrobiologi dan berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengujian laboratorium mutu dan keamanan hasil perikanan
6. Penandatanganan Kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dengan Balai PPMHKP Makassar

Balai PPMHKP Makassar Terima Penghargaan Dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sendiri merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan yang dilaksanakan akan menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BPPMHKP Makassar, meliputi:

Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan S-3 = -

Pendidikan S-2 :

S2 Keahlian : 7 orang :

1. Ir Habrin Yake, M.M
2. Andi Rahmaniar Dj, ST.,M.Si
3. Kamaruddin, S.P, M.S
4. Kamdani, S.Pi, M.M
5. Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P
6. Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
7. Fatima Tayang, S.St.Pi, MM

S2 Pelaksana : 1 orang

1. Rahma Tenri Aben

Pendidikan S-1 /D-IV :

S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang

1. Waode Suharni, S.Pi
2. Bakhtiar, S.Pi
3. Moh. Fahri, S. Pi
4. Wara Zakaria Sapan, A.PI
5. Muhammad Irfan Rais, S.Pi
6. Patmawati M, S.St.Pi
7. Erlina Kadang, S.Kom
8. Junaedi, S.E
9. Muzakir, S.Pi

10. Taufiq, S.PKP
11. Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi
12. Suprianto, A.Md.Pi., S.Pi
13. S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
14. Karwit, S.Pi

S-1 /D-IV Keterampilan : 1 orang

1. Arfiandi, S.Pi

S-1 /D-IV Pelaksana : 5 orang

1. Darmawan, SP
2. Hapi, SAP
3. Muhammad Arman, SAP
4. Arniyanti, A.Md, SAP
5. Oktovianus, SAP

Pendidikan D-III ;

D-III Keterampilan : 4 orang

1. Idawati Barung
2. Rosdiana
3. Zulyana Arlina
4. Ardiana

D-III Pelaksana : 1 orang

1. Jumhana

Pendidikan SLTA :

SLTA Keterampilan : 2 orang

1. Erwin Wijaya
2. Andi Muhammad Haedar

SLTA Pelaksana : 4 orang

1. Halim
2. Niza Mahaputri Zainal
3. Irma Syam
4. Muh. Arfah

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Full Waktu dan Paruh Waktu)

Pendidikan S-3 = -

Pendidikan S-2 = -

Pendidikan S-1 =

S-1 / D-IV Pelaksana : 5 orang

1. Syahribulan, SE
2. Aisyah Nur, S.Kom
3. Syumra Hatima Ma'mun,S.Si.
4. Iqbal Harun Pratama, S. Pi
5. Andi Arfini, S.Kom

Pendidikan D-III = 5 orang

1. Dedi Junaidi,A.Md.Pi
2. Kaharuddin, A.Md.Pi
3. Mamak Tamsil, A.Md
4. Agus Alim, A.Md.Pi
5. Andi Rahman,A.Md.Pi

Pendidikan SLTA = 7 orang

1. Athul Azwar
2. Tri Saputradin Madiara
3. Randi
4. Nurwahidah

5. Saharuddin
6. Hamka
7. Arsyad

Pendidikan SMP = 1 orang

1. Junaedi Saleh

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BPPMHKP Makassar pada tahun 2026 adalah BAIK dan SANGAT BAIK

2. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan menunggu sistem aplikasi siap operasional

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai PPMHKP Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 56 orang yang terbagi atas 2 kategori yaitu PNS dan PPPK, pegawai mutasi masuk sebanyak 1 orang yang UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Ternate an Muh Arfah dan penambahan PPPK full waktu dan PPPK paruh waktu sebanyak 18 Orang

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	3
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1

12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	10
15.	PPPK Full waktu	12
16.	PPPK Paruh waktu	6
	Total	56

Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

1. Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
2. Anggran setelah blokir Rp. 0

Triwulan I

1. Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp.0
2. Realisasi Rp. 0

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2026 :

Anggaran Awal :

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 7.406.000
2. Gaji dan Tunjangan : Rp. 7.058.809.000
3. Pembinaan Kepegawaian : Rp. 50.000.000
4. Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 267.200.000

Realisasi Triwulan I

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 4.955.800
2. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.204.499.498
3. Pembinaan Kepegawaian : Rp.0
4. Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 60.208.000

Program Nasional

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita yaitu manajemen talenta dengan pemetaan potensi dan kompetensi menggunakan sistem digital seperti profilin ASN untuk mengetahui kemampuan, minat dan rekam jejak pegawai secara objektif. Manajemen talenta adalah cara untuk memastikan bahwa birokrasi menjadi lebih profesional, efisien dan mampu menjalankan seluruh program asta cita dengan baik.

Aspek Pemanfaatan

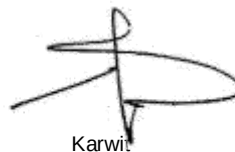
Pemanfaatan kompetensi ASN mencakup aspek yang saling terhubung, mulai dari penempatan posisi hingga pengembangan karier. Menempatkan ASN pada jabatan atau tugas sesuai keahlian/potensi yang dimiliki dan menggunakan data profil kompetensi seperti manajemen talenta sebagai dasar pengambilan Keputusan.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Kurangnya kedisiplinan dalam kehadiran pegawai terlihat dari pegawai yang terlambat datang dijam kantor yang telah ditentukan
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyASN tepat waktu perlu ditingkatkan

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Pegawai yang terlambat akumulasi maksimal 240 menit akan dilakukan panggilan tatap muka - TIM Kepegawaian akan mengingatkan kepada pegawai untuk disiplin mengentry data sertifikat pada Whatapp group kantor.	Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1. Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan Sertifikat dan surat tugas pada Triwulan I. 2. Pelatihan dengan pemanfaatan sumberdaya internal telah dilakukan pada tanggal 4 Februari 2026 tentang Peningkatan kompetensi IMUT dan AIMUT terkait CBIB dengan narasumber ibu Patmawati M, S.St.Pi 3. Evaluasi pasca pelatihan : - sistem manajemen mutu (Pengenalan ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen untuk Jaminan Kualitas Media Mikrobiologi) telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2026 - Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Gratifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026	Ketua TIM Kerja Subbagian Tata Usaha

Makassar, 10 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwi

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR
TAHUN 2026**

Nama Indikator (6)	:	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar
Nama Timja	:	Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar

T/R	Tahun 2026							Capaian 2026	Target 2026
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	-	-	-	-	-	-	77	-	77
Realisasi	77,59	-	-	-	-	-	-	-	-
% Capaian	100,77	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Tw.1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;
 Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2;
 Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4;
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Deskripsi :

- Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PANRB kepada unit kerja instansi pemerintah yang berhasil menyelenggarakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, WBBM berfokus pada pencegahan korupsi (KKN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima;
- Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;

- Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Balai PPMHKP) Makassar yang dulu masih bernama Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018, dan tahun 2019 dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1025 Tahun 2019. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai PPMHKP Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai PPMHKP Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Nomor B.656/BPPMHKP.1/OT.730/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 Hal Penilaian Kembali Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPPMHKP Tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar bersama 5 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang dilaksanakan penilaian kembali unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPMHKP (pasca reorganisasi) oleh Tim Penilai Internal KKP Tahun 2025-2026;
- Berdasarkan surat Sekretaris Badan PPMHKP Nomor B.1030/BPPMHKP.1/KP.750/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 Hal Penilaian Kembali Rencana Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar diusulkan sebagai unit kerja memperoleh predikat zona integritas menuju WBBM dari Menteri PAN RB;
- Target indikator kinerja bersifat tahunan, namun pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan pengukuran secara mandiri, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
1.	Nilai Total Komponen Pengungkit	41,75
2.	Nilai Total Komponen Hasil	35,84
	Nilai Evaluasi Zona Integritas	77,59

Uraian penilaian zona integritas triwulan I tahun 2026 disajikan pada gambar matrik berikut ini.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS						
UNIT KERJA BPPMHKP MAKASSAR						
	Area	Sub-area	Score	Percentage	Status	Penyelesaian
A	PENGUNGKIT		41,75			
1	MANAJEMEN PERUSAHAAN		8,50	85,00%	RESUME BERSUKSES	
2	PENATAAN TATAKARANG		7,00	70,00%	RESUME BERSUKSES	
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER APARATUR		10,00	100,00%	RESUME BERSUKSES	
4	PENGUKUTAN AKTIVITAS/TAJAS		10,00	100,00%	RESUME BERSUKSES	
5	PENGUKUTAN PENGAWASAN		10,00	100,00%	RESUME BERSUKSES	
6	PENGUKUTAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		10,00	100,00%	RESUME BERSUKSES	
	TOTAL PENGUNGKIT		41,75	83,50%	RESUME BERSUKSES	
B	HASIL		35,84			
1	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		17,92	89,60%	RESUME BERSUKSES	
2	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Elektronik) (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)		17,92	89,60%	RESUME BERSUKSES	
3	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya		0,00	0,00%	RESUME BERSUKSES	
4	Pelayanan Publik yang Prima		17,92	89,60%	RESUME BERSUKSES	
5	Nilai Survei Kualitas Pelayanan (Survei Elektronik) (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)		17,92	89,60%	RESUME BERSUKSES	
	TOTAL HASIL		35,84	89,60%	RESUME BERSUKSES	
	SKOR EVALUASI ZONA INTEGRITAS		77,59			

Jika dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2025 yang realisasinya 0, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai Zona Integritas	
		Triwulan I Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026
1.	Nilai Total Komponen Pengungkit	-	41,75
2.	Total Nilai Komponen Hasil	-	35,84
	Nilai Evaluasi Zona Integritas	-	77,59

Kegiatan yang Dilaksanakan :

- Pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud implementasi zona integritas WBK pada Balai PPMHKP Makassar, diantaranya adalah :
 - (a) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan ruang tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster pengelolaan pengaduan;
 - (b) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala PPMHKP Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
 - (c) Pada apel pagi tanggal 5 Januari 2026, dirangkaikan dengan seremoni penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan I, II dan III periode semester II tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026;
 - (d) Guna mendukung penerapan nilai-nilai integritas, pada tanggal 4 Februari 2026 dilaksanakan sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber Penanggung Jawab Unsur V (Penguatan Pengawasan) yang diikuti oleh seluruh pegawai secara hibrid (tatap muka dan zoom meeting);
 - (e) Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;
 - (f) Pada tanggal 23 Februari 2026 dilakukan verifikasi dan validasi dokumen penerapan WBK unsur V (Penguatan Pengawasan);
 - (g) Tanggal 24 Februari 2026 dilakukan rapat pembahasan pemenuhan dokumen penerapan zona integritas WBK yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar dan diikuti oleh seluruh tim pembangunan zona integritas WBK, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi dokumen penerapan WBK unsur III (Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur);
 - (h) Pada tanggal 25 Februari 2026 telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi dokumen penerapan zona integritas WBK untuk unsur IV (Penguatan Akuntabilitas) dan unsur V (Penguatan Pengawasan);
 - (i) Dalam upaya mendukung konsistensi penerapan WBK pada Balai PPMHKP Makassar, pada tanggal 26 Februari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Ketua KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber
 - (j) Pada tanggal 26 Februari 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur I (Manajemen Perubahan);
 - (k) Tanggal 26 Februari 2026 dilakukan briefing kepada petugas pelayanan dan Inspektur Mutu lingkup Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan arahan,

meningkatkan motivasi kerja bagi petugas pelayanan dan Inspektur Mutu serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat petugas pelayanan dan Inspektur Mutu terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;

- (l) Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan diadakan briefing adalah untuk meningkatkan pemahaman, menyampaikan regulasi terkini, memberikan arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;
- (m) Sebagai salah satu wujud penerapan nilai integritas, dalam momen peringatan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah menerbitkan surat kepada instansi terkait (stakeholder), dan nota penyampaian dinas kepada seluruh pegawai Balai PPMHKP Makassar, yang substansinya adalah dalam upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi;
- (n) Pada tanggal 12 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur II (Penataan Tatalaksana);
- (o) Tanggal 16 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK untuk unsur VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);
- (p) Pemenuhan kewajiban LHKPN untuk pegawai wajib lapor LHKPN sebanyak 6 pegawai dan pemenuhan kewajiban melaporkan pajak tahunan melalui aplikasi Coretax bagi seluruh pegawai yang memiliki NPWP;
- (q) Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.91/MEN-SJ/HK.410/II/2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai PPMHKP Makassar berkomitmen dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, tertib dan indah sekaligus mempresentasikan tanggung jawab Balai PPMHKP Makassar dalam menjaga kelestarian sumberdaya yang dimiliki.
Sejalan dengan hal tersebut, Agen Perubahan pada Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI, dengan aktivitas :
 - (1) Menginisiasi kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kerja;
 - (2) Penataan ruang kerja pegawai dan ruang pelayanan;
 - (3) Kampanye hemat energi di lingkungan kantor;
 - (4) Penataan lingkungan kerja yang rapi dan sehat;
 - (5) Pengelolaan sampah dengan pemilahan jenis sampah;
 - (6) Penerapan keselamatan kerja (penyediaan alat pemadam kebakaran dan Kotak P3K);
 - (7) Menjaga keamanan kantor.

- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
 - (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - (3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
 - (4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;

(5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya Manusia :

- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai PPMHKP Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ASN (PNS 37 orang, PPPK 12 orang, dan PPPK Paruh Waktu 6 orang), serta pegawai non ASN 5 orang;

Anggaran :

- Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2026 sebesar Rp. 17.573.000,-, (WA.3987.EBA.962.051.0C. Layanan rumah tangga dan perlengkapan), sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.415.000,- atau 8,05%, yang digunakan untuk biaya pengadaan alat tulis kantor dan suplies komputer, biaya transpor urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta biaya transpor kegiatan pimpinan.
Pada tahun 2025, indikator kinerja ini tidak mendapatkan alokasi anggaran, anggaran yang semula Rp. 12.489.000,- dilakukan efisiensi secara keseluruhan.

Program Nasional :

- Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai PPMHKP Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Aspek Pemanfaatan :

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
 - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
 - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
 - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
 - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
 - (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Akar Masalah (Mengapa Hal Tersebut Terjadi ?)

- Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur lambat mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggung jawabnya;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Berikutnya

- Seluruh penanggung jawab unsur WBK (Unsur 1-6 dan Hasil) melakukan pemutakhiran dokumen penerapan WBK;
- Mengajukan akun e-ZI ke Inspektorat Jenderal KKP melalui Sekretariat Badan PPMHKP untuk memudahkan pemantauan dan penilaian WBK;
- Tim sekretariat WBK melakukan verifikasi terhadap dokumen penerapan WBK yang disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab unsur.

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya

- Nota Dinas Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar Nomor B.598/BPPMHKP.MKS/ TU.330/II/2026 tanggal 19 Februari 2026, Hal Dokumen Penerapan WBK;
- Himbauan Ketua Tim WBK kepada seluruh penanggung jawab unsur terkait pemenuhan dokumen penerapan WBK;
- Penataan fasilitas pendukung penerapan WBK (penataan ruangan dan meubelair, alat pengolah data, banner, penataan ruangan pelayanan dan ketersediaan jaringan internet);

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Makassar, 10 April 2026

Penanggung Jawab Indikator Kinerja,



Karwit

Dokumentasi Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	2	3	4
1	05-01-2026	Penyerahan Penghargaan Kepada Pegawai Teladan Periode Semester II Tahun 2025	
2	05-01-2026	Penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026	
3	07-01-2026	Briefing pegawai lingkup Dukungan Manajerial	
4	23-02-2026	Verifikasi dokumen penerapan ZI WBK unsur V (Penguatan Pengawasan)	

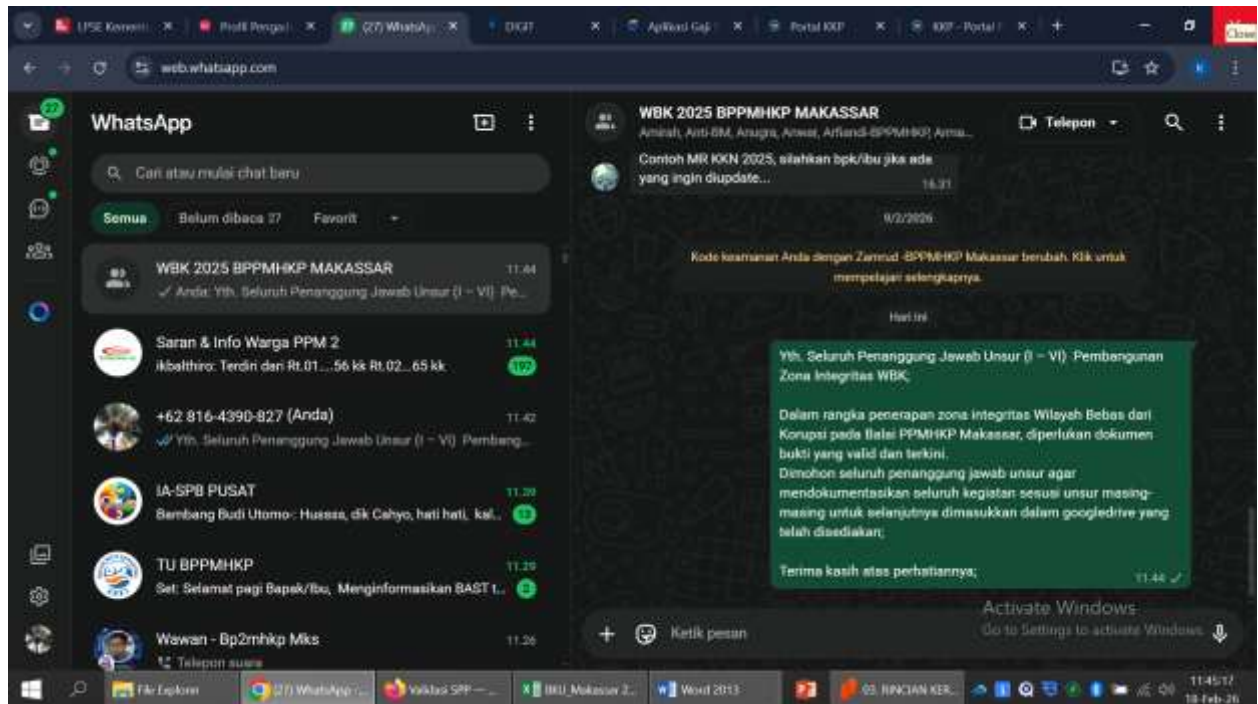
5	24-02-2026	Rapat Pembahasan Dokumen Bukti Implementasi Pembangunan Zona Integritas WBK	
6	24-02-2026	Verifikasi dokumen penerapan ZI WBK unsur III (Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur)	
7	25-02-2026	Verifikasi dokumen penerapan ZI WBK unsur IV (Penguatan Akuntabilitas)	
8	25-02-2026	Verifikasi dokumen penerapan ZI WBK unsur V (Penguatan Pengawasan)	
9	26-02-2026	Verifikasi dokumen penerapan ZI WBK unsur 1 (Manajemen Perubahan)	

10	26-02-2026	Briefing petugas pelayanan dan Inspektur Mutu	DOKUMENTASI BRIEFING PAGI PETUGAS PELAYANAN DAN INSPEKTUR MUTU TANGGAL 26 FEBRUARI 2026 
11	26-02-2026	Sosialisasi Peraturan Ketua KPK Nomor 1 Tahun 2026	
12	03-03-2026	Briefing pegawai lingkup Dukungan Manajerial	
13	11-03-2026	Penyampaian Nota Dinas Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H. kepada Pegawai Lingkup Balai PPMHKP Makassar	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR NOTA DINAS NOMOR 01/PPMHPK/AR/KP.230/0028 Tha : Seluruh Pegawai Balai PPMHPK Makassar (PES, PPTK, PPTK Penguji Mutu dan PJP) Dit : Pj, Kepala Balai PPMHPK Makassar Hal : Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Lampiran : Tanggal : 11 Maret 2025 Dalam rangka mendukung program WER (Wayah Beka dan Pongka) menuju WERB (Wayah Beka dan Pongka) pada Balai PPMHPK Makassar, serta mendukung total effort Program Kerja Pencegahan Korupsi tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Tahunan Hari Raya, maka disampaikan kepada seluruh pegawai bahwa tidak menerima hadiah, uang, barang, jasa, dan lain sebagainya dari pihak ketiga dengan alasan apapun. Bagi pegawai yang tidak menerima pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan kewenangan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Gendian akan sampaikan, dan perlunya disampaikan kepada:  Kepala Balai PPMHPK Makassar Mansur Zainul

14	11-03-2026	Penyampaian Surat Dinas Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H. kepada Stakeholder/Mitra Kerja Balai PPMHKP Makassar	
15	12-03-2026	Verifikasi dokumen penerapan ZI WBK unsur II (Penataan Tatalaksana)	

16	16-03-2026	Verifikasi dokumen penerapan ZI WBK unsur VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	
----	------------	---	--

Pemberitahuan Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas WBK Kepada Seluruh Anggota Tim
Hal Pemenuhan Dokumen Penerapan WBK
Tanggal 18 Februari 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR

NOTA DINAS

NOMOR B. 598 /BPPMHKP.MKS/TU.330/II/2026

Yth. : Para Penanggung Jawab Unsur Pembangunan Zona Integritas WBK
(Unsur I-VI dan Unsur Peningkatan Hasil)
Dari : Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas WBK
Lampiran : -
Hal : Dokumen Penerapan WBK -
Tanggal : 19 Februari 2026

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penerapan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada Balai PPMHKP Makassar, diperlukan dokumen bukti yang valid dan terkini. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti pertemuan yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : Pukul 08.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Balai PPMHKP Makassar
Jl. Dakota No. 24 Makassar
Agenda : - Pembahasan dokumen bukti implementasi WBK;
- Hal-hal yang berkembang dalam pertemuan.

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, dimohon peserta dapat hadir tepat waktu dan menyiapkan bahan yang diperlukan. Dokumentasi kegiatan sesuai unsur masing-masing dapat diupload dalam googledrive sebagai berikut:

1. Dokumen Implementasi WBK :

<https://drive.google.com/drive/folders/1B-udL6p-HFEMXanTpkYoFmreoxWRX-Pv?usp=sharing>

2. Lembar Kerja Evaluasi WBK :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvAIL2pasDt8ySUANwBDyV_W2XdGV8_c/edit?usp=sharing&ouid=105269510382430198888&rtpof=true&sd=true

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud

**Lampiran 7. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR M MAKASSAR
TAHUN 2026**

Nama Indikator	:	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
Nama Timja	:	Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	0	0	86		86,2
Realisasi	53,41								
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha- usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %
Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :
Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.
Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2026 yaitu : penyusunan RKAKL, Renja, Rencana Aksi dan Renstra mencapai 30 %.
2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %
Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :
Penyusunan Manual IKU tahun 2026 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%
3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %
Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2026, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I sehingga realisasi tercapai 3 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %
Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai PPMHKP Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai PPMHKP Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Parameter ini belum dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026.

Bobot realisasi capaian :

= Parameter 1 (30 %) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (3 %) + parameter 4 (0 %)
= 63 %.

Realisasi capaian = $\frac{\text{Bobot realisasi capaian}}{\text{Target}} \times 100 \%$

$$\begin{aligned} &= \frac{63}{86,2} \times 100 \\ &= 53,41 \% \end{aligned}$$

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2026 yaitu

- Tanggal 2 Januari 2026 Nomor surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

- Penyusunan SK Indikator Kinerja Balai PPMHKP Makassar Nomor B.198/BPPMHKP.MKS/RC.610/I/2026 tanggal 14 Januari 2026.
- Pada tanggal 5 Februari 2026 sesuai dengan Undangan Rapat PLT. Balai PPMHKP Makassar Nomor B.433/BBKIPM.MKS/TU.330/II/2026 telah dilakukan rapat Dialog Kinerja dan Matrik Peran Hasil terhadap Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) Sasaran Kinerja dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja
- Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai PPMHKP Makassar.
- IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.

Capaian Indkator ini perhitungannya berdasarkan Tahunan

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2026 :

Kegiatan	Pagu Defenitif	Efesiensi	Setelah efesiensi	Realisasi
3987.EBA.962. B. Tata Usaha	Rp 2.516.000	-	Rp 2.516.000	0
3987.EBA.962. D. Evaluasi dan Pelaporan	Rp 16.515.000	-	Rp 16.515.000	Rp 4.501.000
3987.EBA.994.02. F. Pas Bandara	Rp. 5.075.000	-	Rp 5.075.000	Rp 44.000
3987.EBA.994.02. G. Pertemuan/ Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	Rp. 54.000.000	-	Rp 54.000.000	Rp 11.899.401
Jumlah	Rp 75.592.516	-	Rp 75.592.516	Rp16.444.401

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini tahun 2026 sebesar Rp 75.592.516 dan terealisasi sebesar Rp 16.444.401 atau sebesar 21,75 % jika dibandingkan tahun 2025 pada triwulan I pagu anggaran sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Potensi masalah - Evaluasi AKIP belum dilakukan secara berjenjang

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melibatkan unsur manajemen dalam evaluasi AKIP, koreksi pimpinan terhadap Laporan Kinerja	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1. Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi; 2. Briefing personil dukungan manajerial terkait monitoring output dan realisasi anggaran pada tanggal 3 Maret 2026.	Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Makassar, 13 April 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit

Dokumentasi kegiatan



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP MAKASSAR

TAHUN 2026

Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
Nama Timja	:	Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dilingkup Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	86								<u>86</u>
Realisasi	100								
% Capaian	116,28								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
Diskripsi :	Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat vital dalam menjamin keberhasilan suatu organisasi. Secara esensial, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan tetap berada pada jalur yang direncanakan (<i>on track</i>). Melalui proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang sistematis, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada upaya preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai PPMHKP Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang Dilakukan :

Pada triwulan I tahun 2026 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. Jika dibandingkan dengan pencapaian nilai Indikator Kinerja pada triwulan yang sama pada Tahun 2025 sama-sama mencapai nilai 100.

Sebagai upaya preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel, telah dilakukan kegiatan antara lain : Manajemen Resiko Lingkup Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026 Tanggal 12 – 13 Januari 2026, Briefing Pagi Dukungan Manajerial Lingkup BPPMHKPM Makassar Tanggal 07 Januari 2026 dan 03 Maret 2026.

Anggaran :

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2026 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A Operasional Perkantoran, dengan pagu anggaran Rp. 285.384.000,- yang sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026 terealisasi sebesar Rp. 50.084.555,- atau 17,55% yang digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari perkantoran, dukungan kebersihan dan keamanan, penggandaan/penjilidan, dan pencetakan.

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.502.912.000,- maka terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 81,01%. Demikian pula dengan besaran persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan periode yang sama triwulan I tahun 2025 yang sudah mencapai 26,81%.

Sumberdaya Manusia :

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Program Nasional, Budaya Kerja dan Pemanfaatan :

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba”.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai PPMHKP Makassar yaitu “Akuntabel” dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

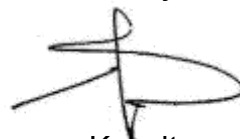
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.
- Masih terdapat sisa temuan Itjen sebesar Rp. 9.00,- pada aplikasi SIDAK KKP.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala. - Membuat surat resmi ke Itjen KKP dalam rang penyelesaian sisa temuan Rp. 9.00,- pada aplikasi SIDAK KKP..	Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode Triwulan I Tahun 2026.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

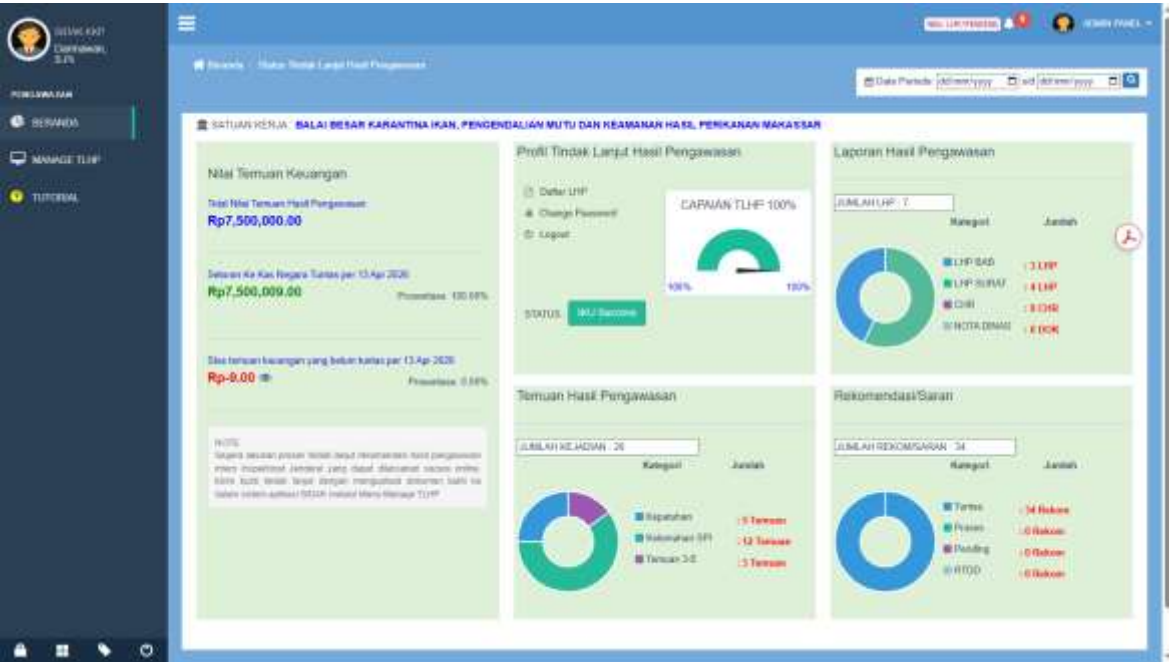
Makassar, 14 April 2026
 Penanggungjawab Indikator
 Kinerja



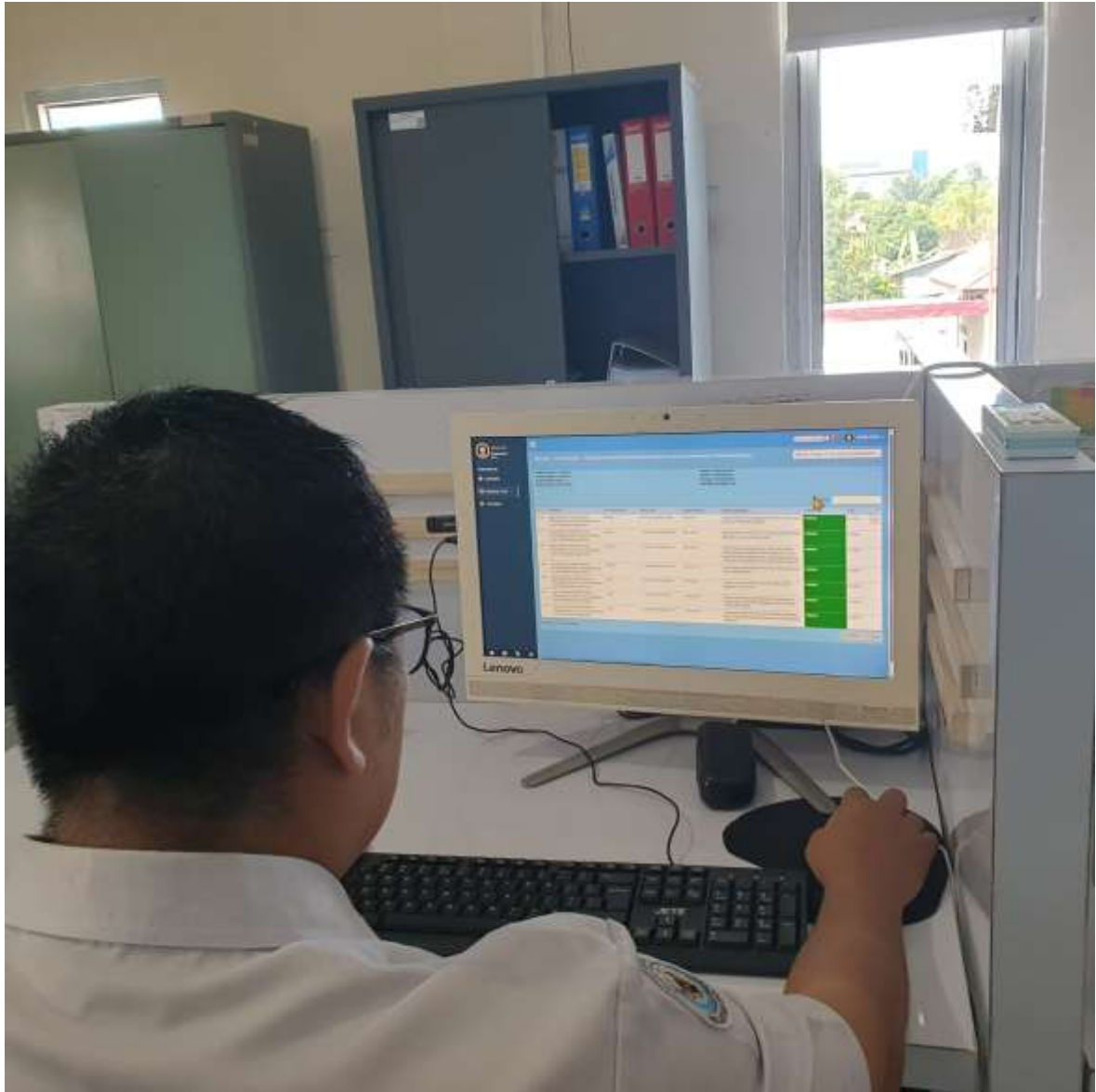
Karwit

Tampilan layar pada aplikasi SIDAK

<https://sidak.kkp.go.id/beranda/9/373>



Jumlah Laporan: 7 Dokumen						Status: 34 Dokumen	
Jumlah Temuan: 26 Temuan						Proses: 6 Dokumen	
Jumlah Rekomendasi: 34						Pending: 0 Rekomendasi	
Nilai Keuangan: Rp7,500,000						Saluran Keuangan: Rp0	
No		Jenis Pengawasan		Tanggal Pengawasan		Status	
Isi		Berkas LHP		Isi		Aksi	
1728	BALAI DESA KAGATITRA KAWI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Chesari	8.107114.000.000.000	2020-05-27	Evaluasi Proses Pengawasan Penerimaan Publik Tahun 2020 pada KPPN-BP Makassar	TUNJUK	Download
1475	BALAI DESA KAGATITRA KAWI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Chesari	8.107114.000.000.000	2020-11-26	Evaluasi PMP TL 2021 dan TL 2020 pada Balai PPKNBP Makassar. Penerimaan Sistemik	TUNJUK	Download
1487	BALAI DESA KAGATITRA KAWI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Chesari	8.107114.000.000.000	2020-04-10	Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMPK) Tahun 2021-2022 pada Balai Desa Kawatittra KAWI, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Desa KAWI Makassar)	TUNJUK	Download
1489	BALAI DESA KAGATITRA KAWI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Chesari	8.107114.000.000.000	2020-05-21	Hasil Evaluasi Implementasi Penerimaan Publik pada Balai Desa KAWI Makassar	TUNJUK	Download
1476	BALAI DESA KAGATITRA KAWI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Asli	8.107114.000.000.000	2020-06-20	Laporan Hasil Audit Internal pada Balai Desa KAWI Makassar 12.2020.2021	TUNJUK	Download
128	BALAI DESA KAGATITRA KAWI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Asli	8.107114.000.000.000	2019-05-06	Profil Hasil Pengawasan Kelangkaan Penerimaan Pengawasan Kelangkaan Penerimaan Publik di UPT-PSU KKP Provinsi DKI Jakarta	TUNJUK	Download
179	BALAI DESA KAGATITRA KAWI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Asli	8.107114.000.000.000	2019-04-16	Laporan Hasil Audit Internal pada Balai Desa Kawatittra KAWI, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	TUNJUK	Download



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR TAHUN 2026**

Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar
Nama Timja	:	Sub Bagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Tw1	Tw2	Sm.1	Tw3	Tw4	Sm.2	Tahunan		
Target			83			92,1	92,1		<u>92,1</u>
Realisasi	58,46								
%Capaian									

Catatan :

Sm 1 = Capaian Tw 1 + Capaian Tw2

Sm2 = Capaian Tw 3 + Capaian Tw4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN yang sekarang diganti menjadi aplikasi My Interest. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

- Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - Revisi DIPA bobot 10 %
 - Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
- Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - Penyerapan anggaran bobot 20%
 - Belanja Kontraktual bobot 10%
 - Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%

- e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Capaian nilai IKPA Balai PPMHKP Makassar pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 58,46 persen dari target 83 Persen. Capaian Kinerja IKPA di peroleh sebagai berikut :

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA.

Adapun Rincian nilai IKPA TW I 2026 Balai PPMHKP Makassar sebagai berikut:

Capaian kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran TW I tahun 2026 pada Balai PPMHKP Makassar.

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Capaian Output	
Nilai	100	56,40	50,00	100	100	100	0	0,00	58,46
Bobot	10	15	20	10	10	10	0	25	
Nilai Akhir	10	8,46	10	10	10	10	0	0,00	
Nilai Aspek	78,20		87,50					0,00	

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW I 2026

Indikar kinerja	Bobot	Periode		Kenaikan /Penurunan
		TW I 2025	TW I 2026	
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	0.00
Deviasi Hal III DIPA	15	15	8.46	7.46
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	20	10	-0.50
Belanja Kontraktual	10	10	10	0.00
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	0.00
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	10	0.00
Dispensasi SPM	0	0	0	0.00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	0	-1.00
Nilai Total	100	100	58.46	-0.415

Pada tabel diatas terlihat adanya Penurunan nilai IKPA pada TW I 2026 dibandingkan TW I 2025 sebesar 0,415 %. Penurunan ini dipengaruhi karena adanya perbedaan nilai perolehan pada masing-masing indikator TW I 2025 dan indikator TW I 2026. Perbedaan tersebut adalah :

- Deviasi Hal. III DIPA
Tw I 2025 Deviasi Hal. III DIPA memperoleh nilai 15 sedangkan Tw I 2026 memperoleh nilai 8.46.
Penurunan di Tw I 2026 disebabkan karena realisasi anggaran tidak memenuhi target RPD pada hal. III DIPA

- Capaian Output
Tw I 2025 memperoleh nilai 25 sedangkan Tw I 2026 memperoleh nilai 0.
Penurunan di Tw I 2026 disebabkan karena Pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI belum bisa dilaksanakan karena masih proses penyempurnaan.
Sehingga nilai total IKPA Tw I 2026 mengalami penurunan dibandingkan nilai total IKPA TW I 2025.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai PPMHKP Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.028/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2026 tanggal 2 januari 2026. Tim terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Penugasan Personil Sebagai Pejabat Pengadaan TA 2026 Nomor B.13/SJ.7/KP.340/I/2026 tanggal 4 januari 2026.

ANGGARAN DAN ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan perbendaharaan dan Administrasi Keuangan, Layanan Daya Jasa, Perawatan Kendaraan Bermotor, Perawatan Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Perbendaharaan dan administrasi keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.220.000 telah realisasi sebesar Rp. 8.980.000
- Layanan Daya dan Jasa
Kegiatan ini didukung dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 363.408.000 telah realisasi sebesar Rp.58.166.803
- Perawatan Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.745.000 telah terealisasi sebesar Rp.17.166.268.000.
- Perawatan Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.269.000 telah terealisasi sebesar Rp. 864.000

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp26.301.198.000 dengan realisasi anggaran Tw I 2026 Rp. 2.383.488.655 atau 9,06 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.879.526.000 dengan realisasi anggaran triwulan I 2025 sebesar 1.997.000.161 atau 28,50 persen. terdapat peningkatan jumlah anggaran dan realisasi pada Triwulan I 2026 dibandingkan jumlah anggaran Tw I 2025. Hal ini disebabkan terdapat penambahan anggaran untuk pembangunan Laboratorium Rujukan, penambahan anggaran gaji pegawai dan hal lainnya.

PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2026. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

LAMPIRAN KEGIATAN TRIWULAN I 2026 IKU 10

- Tangkap Layar IKPA Triwulan I 2026 pada Aplikasi My Interest

MyInterest

Cari Menu, contoh: Rincian Neraca Tidak Balance

Tahun Anggaran: 2026

RAHMA TENRI
SATKER -427598

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Lainnya

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter

PDF

XLSX

Filter Aktif: SAMPAI DENGAN: MARET

Cari di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI DPM PENGURANGAN	
							REVISI DPM	DEVIASI HALAMAN II DPM	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGESLOAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				NILAI ASPEK
1	03 Maret	136	032	427598	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUATAN DAN PERKAWASAN MAKASSAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	56,40 8,46	79,20	50,00 20 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	8750 25 0,00	0,00	0,00	58,46	100,00%	0,00

S

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Target RPD tidak terpenuhi
- Pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI belum dilaksanakan karena aplikasi SAKTI masih dalam penyempurnaan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2026

- Dibentuk tim Tekhnis Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung percepatan realisasi anggaran.
- Operator komitmen melakukan penginputan data target dan capaian output satker pada aplikasi SAKTI maupun modul komitmen

Penanggung Jawab

Sub Bagian Tata Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan IV 2025

- Melaksanakan monitoring melalui briefing pagi tim dukungan manajerial terkait IKPA pada tanggal 3 maret 2026

Penanggung Jawab

Sub Bagian Tata Usaha

Makassar, 13 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit, S.Pi

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
Nama Tim/ja	:	Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar.
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target							71,75		71,75
Realisasi									
% Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran pada instansi pemerintah, khususnya Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memastikan bahwa anggaran disusun dengan baik dan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tersebut berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan tersusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Tujuan utama dari pengukuran nilai kinerja perencanaan anggaran adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di masa mendatang. Melalui evaluasi yang sistematis dan objektif, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor

pendukung dan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKAK/L). Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk perbaikan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya, serta dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada instansi pemerintah memiliki beberapa indikator kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan efektivitas pengelolaan serta pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator ini membantu dalam mengidentifikasi area yang berkinerja baik dan area yang memerlukan perbaikan.

Indikator utama yang menjadi fokus dalam Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai seberapa baik anggaran disusun dan direncanakan. Aspek yang dievaluasi meliputi:

- **Kesesuaian Rencana dengan Pelaksanaan:** Sejauh mana rencana anggaran yang telah dibuat sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- **Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan:** Menilai apakah dokumen perencanaan anggaran (seperti RKAK/L) disusun secara komprehensif, realistis, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran selama periode pelaksanaan. Beberapa sub-indikatornya adalah:

- **Penyerapan Anggaran:** Tingkat penyerapan dana anggaran yang menunjukkan seberapa aktif anggaran digunakan untuk kegiatan.
- **Pencapaian Output/Outcome:** Sejauh mana target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tercapai.
- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:** Menilai apakah sumber daya (dana, waktu, tenaga) digunakan secara optimal tanpa pemborosan.
- **Kepatuhan Terhadap Peraturan:** Menilai apakah pelaksanaan anggaran mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prosedur pengadaan, pembayaran, dan pelaporan.

3. Kualitas Hasil (Outcome)

Selain *output*, evaluasi juga melihat dampak atau hasil yang lebih luas dari pelaksanaan anggaran. Ini mencakup:

- **Pencapaian Sasaran Strategis:** Sejauh mana pelaksanaan anggaran berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.
- **Dampak Program/Kegiatan:** Menilai dampak positif yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran terhadap masyarakat atau lingkungan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Indikator ini menilai sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan.

- **Kualitas Pelaporan Keuangan:** Menilai akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.
- **Keterbukaan Informasi:** Sejauh mana informasi terkait anggaran dan pelaksanaannya dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.

5. Pengelolaan Risiko Anggaran

Evaluasi juga dapat mencakup penilaian terhadap kemampuan instansi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.

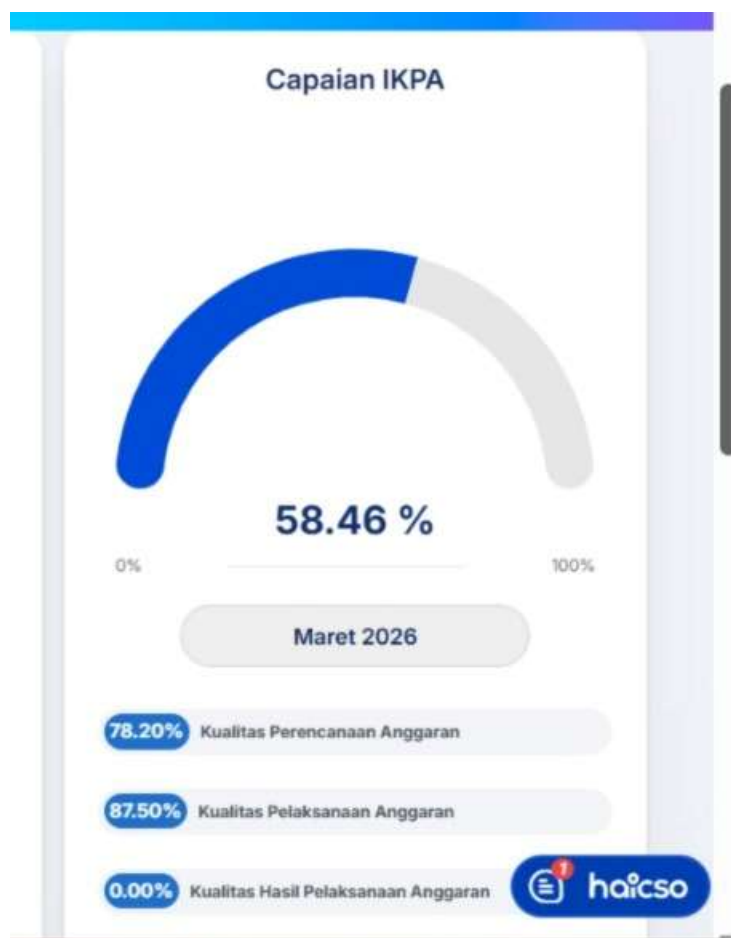
Secara umum, hasil evaluasi kinerja anggaran memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja pengelolaan keuangan negara, serta menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran di masa mendatang.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Balai PPMHKP Makassar untuk triwulan I tahun 2026 telah melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Untuk Nilai Kualitas perencanaan anggaran di triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 78,20%, data tersebut dapat kita lihat dalam aplikasi MyIntress.

Jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 100% maka nilai Kualitas perencanaan mengalami penurunan di triwulan I sebesar 21,80%



No	Kategori	Kode	Nama	Uraian	Mata Anggaran	Pembayaran				Pembelian				Pembelian				Total	Saldo	Saldo	Saldo
						Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026				
1	TS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- b. Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Pada tanggal 12 Januari 2026 melaksanakan breafing pagi berupa Dalog Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Manajemen Risiko Lingkup BPPMHKP Makassar Tahun 2026 bersama tim Dukungan Manajemen Balai PPMHKP Makassar yang dipimpin langsung Plt Kepala Balai PPMHKP Makassar.
- d. Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Data Poyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN yang dilaksanakan oleh direktorat pembiayaan syariah kementerian Keuangan secara daring.
- e. Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti rapat pembahasan tindak lanjut proyek SBSN TA 2026 Pasca Blokir yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara daring.
- f. Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan kegiatan Breafing pagi bersama Tim Dukungan manajerial terkait pembahasan tindak lanjut indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang dipimpin langsung Plt Kepala Balai PPMHKP Makassar.
- g. Telah dilakukan revisi DIPA Tahun 2026 sebanyak dua kali yaitu pada tanggal posting Span 5 Januari 2026 dan pada tanggal 11 Februari 2026,

The screenshot shows the SAKTI web application interface. The top navigation bar includes the SAKTI logo, a clock showing the date and time (Senin, 6 April 2020, 16:18:18), and the user's name (KURNIAH). The main menu on the left lists various system functions, with 'Monitoring' currently selected. The main content area displays a table titled 'Monitoring Migrasi Data' with columns for 'Tglang', 'Rute', 'Deskripsi', 'no', 'status', 'Total', 'Error Msg', 'Tgl Awal', and 'Tgl Penutup DIPA'. The table contains three rows of data, all with a status of 'Success'. Below the table, there are pagination controls showing '1' of 10 items, and buttons for 'Detail' and 'Tutup'.

Tglang	Rute	Deskripsi	no	status	Total	Error Msg	Tgl Awal	Tgl Penutup DIPA
2018	427588	SALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL BELAUTAN DAN PERMAINAN MAKASAE	3	Success	26,391,198,000	Success Import SAKTI	11-02-2018	11-02-2018
2018	427588	SALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL BELAUTAN DAN PERMAINAN MAKASAE	1	Success	26,391,198,000	Success Import SAKTI	31-12-2018	09-01-2019
2018	427588	SALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL BELAUTAN DAN PERMAINAN MAKASAE	0	Success	26,391,198,000	Success Import SAKTI		29-11-2018

Below the table, there are pagination controls showing '1' of 10 items, and buttons for 'Detail' and 'Tutup'.

h. Untuk tabel III DIPA telah tergambar rencana penarikan dana (RPD) sebagai berikut :

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-032.13.2.427598/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Sektor : (427598) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR

Halaman : 18.1
(dalam ribuan rupiah)

No	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	427598	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	322.229	888.461	1.008.522	1.003.636	739.927	9.329.960	1.069.893	6.239.669	790.369	827.211	9.898.899	8.312.269	29.321.799
		01 BELANJA PEGAWAI	274.794	696.376	826.446	873.489	873.489	837.235	873.489	873.489	884.439	117.497	109.399	888.717	7.399.899
		02 BELANJA BARANG DAN	47.435	120.877	182.076	220.939	182.139	181.899	123.999	199.271	229.879	143.999	143.992	352.932	2.943.999
		03 BELANJA MODAL	0	158.208	0	399.451	0	2.211.739	759.919	3.499.919	0	79.194	5.279.899	5.199.919	17.299.919
	322.13.0C.3098	Pengembangan dan Penguasaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.239	133.977	89.939	899.279	99.139	2.273.439	799.917	3.339.393	27.997	11.232	9.129.149	3.299.299	17.391.249
		01 BELANJA BARANG DAN JASA	3.232	23.992	99.139	999.799	99.139	99.271	99.919	99.919	27.997	11.232	9.129.149	3.299.299	17.391.249
		03 BELANJA MODAL	0	158.208	0	399.451	0	2.211.739	759.919	3.499.919	0	79.194	5.279.899	5.199.919	17.299.919
	322.13.0C.7019	Manajemen Mutu	0	0	0	0	0	17.939	9.932	29.232	19.939	1.939	0	19.939	99.239
		01 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	17.939	9.932	29.232	19.939	1.939	0	19.939	99.239
	322.13.0A.3097	Dukungan Manajemen Internal Logistik Berbasis Pengembangan dan Penguasaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	313.999	699.399	949.999	999.239	877.999	949.992	999.277	674.919	139.214	924.499	939.492	1.639.239	8.399.919
		01 BELANJA PEGAWAI	274.794	696.376	826.446	873.489	873.489	837.235	873.489	873.489	884.439	117.497	109.399	888.717	7.399.899
		02 BELANJA BARANG DAN JASA	39.239	102.974	119.539	99.739	994.511	119.839	83.999	191.271	119.779	107.232	101.999	179.497	1.393.141
		PERKIRAAN PENERIMAAN	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	2.949.979
		- PRBP (322098)	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	179.999	2.949.979

Uraian	Rencana Penarikan Dana			Total
	Januari	Februari	Maret	
Belanja Pegawai	274.794.000	569.376.000	826.446.000	1.670.616.000
Belanja Barang	47.435.000	120.877.000	182.076.000	350.388.000
Belanja Modal	0	158.208.000	0	158.208.000
Jumlah	322.229.000	848.461.000	1.008.522.000	2.179.212.000

Sampai bulan Maret tahun 2026, Rencana Penarikan Dana sesuai yang tergambar dalam table III DIPA adalah sebesar Rp.2.179.212.000,-

- Untuk Laporan Realisasi Anggaran sampai periode Maret 2026 yang terdapat dalam aplikasi SAKTI dan MYIntress sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2026 (DALAM RUPIAH)									
KEMENTERIAN/LEMBAGA :		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 932							
ESKELON I :		BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13							
SATUAN KERJA :		BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR 427888							
		Tgl Data : 10/04/26 9:28 AM Tgl Cetak : 10/04/26 12:47 PM Halaman : 1 file_xls_bare_sukbar_new_pos							
URAIAN	2026				2025				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWANG ANGGARAN)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWANG ANGGARAN)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Pertambahan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Pendapatan Pemerintah Negara Bukan Pajak	2.046.879.000	595.796.000	(1.450.879.000)	29.11	3.432.430.000	911.488.000	(2.520.942.000)	17.71	
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Hak-hak Negara Dipertahankan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan SLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Pemerintahan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	3.432.430.000	911.488.000	(2.520.942.000)	17.71	
II. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.B + A.II)	2.046.879.000	595.796.000	(1.450.879.000)	29.11	3.432.430.000	911.488.000	(2.520.942.000)	17.71	
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belanja Pemerintah Pusat	26.301.198.000	2.383.488.655	(22.917.709.345)	9.09	11.879.620.000	2.116.248.710	(9.763.371.290)	17.81	
1. Belanja Pegawai	7.058.809.000	1.940.573.169	(5.118.235.831)	27.49	8.993.299.000	1.905.793.320	(6.987.505.680)	22.30	
2. Belanja Barang	2.042.389.000	284.707.186	(1.757.681.814)	13.94	4.896.387.000	910.483.780	(3.985.903.220)	10.43	
3. Belanja Modal	17.200.000.000	158.208.300	(17.041.791.700)	0.92	0	0	0	0	
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi s/d Periode Maret 2026	%
1	Belanja Pegawai	7.058.809.000,-	1.940.573.169,-	27,49
2	Belanja Barang	2.042.389.000,-	284.707.186,-	13,94
3	Belanja Modal	17.200.000.000,-	158.208.300,-	0,92
Jumlah		26.301.198.000,-	2.383.488.655,-	9,06

j. Deviasi RPD dan Realisasi Anggaran sampai triwulan I adalah sebagai berikut :

Uraian	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Selisih	%
Belanja Pegawai	1.670.616.000	1.940.573.169	269.957.169	16,16
Belanja Barang	350.388.000	284.707.186	65.680.814	18,75
Belanja Modal	158.208.000	158.208.300	300	0,00
Jumlah	2.179.212.000	2.383.488.655	204.276.655	9,37

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai PPMHKP Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai sesuai Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.028/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:

- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
- 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
- 3 Orang Staf KPA dan;
- 2 Orang Staf PPK

ANGGARAN

Untuk mendukung kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMKHP Makassar Tahun 2026, anggaran tersedia pada Akun 3987.EBA.962.E. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dengan Pagu awal sebesar Rp.22.630.000,- dan tidak terdapat blokir anggaran atau perubahan/efisiensi anggaran. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 dan saat ini telah terealisasi sebesar Rp.22.630.000,- atau telah tercapai sebesar 100%.

Perbandingan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 170.811.000 dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.18.458.459,-

Besaran nilai perbandingan anggaran triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 turun sebesar (Rp.148.181.000,-) atau turun sebesar (654,79%).

Besaran nilai perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 turun naik sebesar Rp.4.171.541,- atau naik sebesar 22,59%.

PROGRAM NASIONAL

Secara teknis, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran bukanlah sebuah Program Prioritas Nasional namun, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah merupakan instrumen pendukung utama dan indikator kualitas untuk memastikan seluruh Program Prioritas Nasional dapat terlaksana dengan baik.

ASPEK PEMANFAATANNYA

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) memiliki aspek pemanfaatan penting dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu :

- **Pengukuran Kualitas Perencanaan Anggaran:**

untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Hal ini mencakup kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

- **Evaluasi Kinerja Anggaran:**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga tingkat kementerian/lembaga.

- **Dasar Penyusunan Kebijakan:**

Digunakan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan. Selain itu, juga digunakan dalam penyusunan reviu angka dasar, alokasi anggaran tahun berikutnya, dan penyesuaian anggaran tahun berjalan.

- **Peningkatan Akuntabilitas:**

Sebagai alat untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara profesional kepada pemangku kepentingan.

- **Identifikasi Faktor Pendukung dan Kendala:**

Evaluasi kinerja anggaran membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

- **Pengambilan Keputusan:**

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran, seperti pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi⁴.

- **Mendorong Efisiensi:**

Dengan adanya penilaian NKPA, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

- **Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara:**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) berkontribusi dalam membangun tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk TW I tahun 2026 belum dapat terinput pada capaian kinerja modul komitmen di aplikasi SAKTI karena saat ini di aplikasi SAKTI untuk capaian kinerja pada modul komitmen sampai TW I tahun 2026 tersebut masih dalam proses penyempurnaan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan II 2026

Melakukan penginputan target dan realisasi capaian kinerja bulan Januari sampai Maret 2026 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen;

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

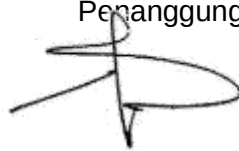
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan IV 2025

Rapat/briefing terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Penanggung Jawab Indikator Kinerja



Karwit, S.Pi

LAMPIRAN KEGIATAN

**Briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen
terkait Tugas dan Fungsi Dukungan Manajerial tahun 2026
tanggal 7 Januari 2026**



**Breafing pagi berupa Dalog Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan
Manajemen Risiko Lingkup BPPMHKP tanggal 12 Januari 2026**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 5, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710 ; TELEPON (021) 3516296,
(021) 3449230 PSW. 2502; FAKSIMILE (021) 3510728; LAMAN www.djppr.kemenkeu.go.id

Nomor : UND-7/PR.4/2026 9 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Bimbingan Teknis Pengisian Data Proyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan proyek melalui SBSN dan persiapan pelaksanaan proyek SBSN tahun 2026, bersama ini kami harapkan kehadiran Saudara/Pejabat yang mewakili serta admin aplikasi yang telah ditunjuk untuk hadir pada kegiatan Panduan Pengisian Data Proyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara virtual sebagai berikut:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Media : Ms. Teams melalui tautan <https://s.kemenkeu.go.id/BimtekEmonev2026>
(Meeting ID: 447 507 354 935 72 ; Passcode: 7CF2d2Ct)
Agenda : Bimbingan Teknis Pengisian Data Proyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN

mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, diharapkan kiranya untuk dapat hadir tepat pada waktunya.

Admin Satker diharapkan dapat mengikuti rapat ini dengan menggunakan laptop/PC agar dapat langsung mencoba melakukan pengisian data pada Aplikasi e-Monev dan dapat menyiapkan data untuk diinput sebagai berikut:

1. **Identitas Proyek:** Nama Proyek, Tujuan Pembiayaan, Output dan Outcome (Dokumen Perencanaan Proyek);
2. **Dokumen DIPA** : Nomor, Pagu, Rencana Penarikan DIPA;
3. **Data Kontrak** (apabila ada); dan
4. **Identitas KPA dan PPK.**

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembiayaan Syariah



Ditandatangani secara elektronik
Deni Ridwan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
2. Sekretaris Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan



14.53

83%

sbsn

Ikball Sekretaris New

satu.kemenkeu.go.id

<https://satu.kemenkeu.go.id/rapat/hadiri/online/89e87679-e8d1-4bc4-bfc1-e077665dcaba>

satu.kemenkeu.go.id

Yth Bapak Ibu PIC SBSN Proyek TA 2026

Mohon perkenan untuk dapat mengisi presensi Bimbingan Teknis Pengisian Data Proyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN melalui :

Link Untuk Presensi Online Internal :
<https://satu.kemenkeu.go.id/rapat/hadiri/online/89e87679-e8d1-4bc4-bfc1-e077665dcaba>

Link Untuk Presensi Online Eksternal:
<https://satu.kemenkeu.go.id/rapat/eksternal/online/89e87679-e8d1-4bc4-bfc1-e077665dcaba>

Materi terkait pengelolaan proyek SBSN termasuk Aplikasi e-Monev dapat diakses pada link:
<https://bit.ly/PengelolaanSBSNProyek>

terima kasih

12.12

Anthy_pegawai Baru-buski

Diteruskan

mohon bantuan bapak ibu utk upload



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-00485/Dt.07.02/PA.05.05/01/2026 Jakarta, 9 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Proyek
SBSN TA 2026 Pasca Blokir

Yth.

-Mohon Lihat Lampiran-
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 hal Penguatan Dukungan Pelaksanaan Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 dan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025, bersama ini kami mengundang Saudara/i pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : **Daring : Zoom Teleconference**
Meeting ID : 844 3012 5017
Passcode : SBSN
<https://link.bappenas.go.id/SBSN2026>
Agenda : Pembahasan Tindak Lanjut Proyek SBSN KKP TA 2026 Pasca Blokir

Berkaitan dengan rencana tersebut, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Haidar (HP: 0877-8502-9693).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Kelautan dan Perikanan,



Mohamad Rahmat Mulianda

Tembusan:

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (sebagai laporan)

**DOKUMENTASI KEGIATAN
BRIEFING PAGI DUKUNGAN MANEJERIAL TERKAIT TINDAKLANJUT INDIKATOR
KINERJA PELAKSANA ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2026
LINGKUP BALAI PPMHKP MAKASSAR
TANGGAL 3 MARET 2026**



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) TW I
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR
TAHUN 2026

Nama Indikator	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
Nama Tim Kerja	:	Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Akuntabel di lingkup Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja (11)	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

T/R	TAHUN							Capaian	Target
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan	Th. 2026	Th. 2026
Target	77	77	77	77	77	77	77	77	77,00
Realisasi	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
% Capaian	129,87	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 19.484.769.000}}{\text{Rp. 19.484.769.000}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan I adalah sebesar 100 % dari target 77 % atau capaiannya sebesar 129,87 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan pada triwulan I yang nilai pagu paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah sama.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai PPMHKP Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada triwulan I telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebanyak 45 paket dengan sebesar Rp. 19.484.769. 000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Paket Penyedia sebanyak 3 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 65.000.000,-
- Paket Penyedia sebanyak 15 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.258.232.000,-
- Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 1.147.337.000,-
- Paket E-Purchasing sebanyak 2 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 7.200.000.000,-
- Paket Seleksi sebanyak 3 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.075.200.000,-
- Paket Tender sebanyak 1 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 8.739.000.000,-

Pada Tahun Anggaran 2026 nilai paket pengadaan barang dan jasa Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp. 19.484.769. 000,-.. Keadaan dan posisi realisasi RUP sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program (Rp.)	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu terumumkan (Rp.)	Selisih (Rp.)	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	680,000,000	680,000,000	680,000,000	0	100 %
2	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	17,937,248,000	17,657,432,000	17,657,432,000	0	100 %
3	WA	Program Dukungan Manajemen	1,305,141,000	1,147,337,000	1,147,337,000	0	100 %

Untuk mengetahui capaian persentase pengadaan barang dan jasa yang telah diupload dan diumumkan di Aplikasi SIRUP dapat dilihat di menu Moner sebagaimana seperti di bawah ini.

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu terumumkan	Selisih	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	680,000,000	680,000,000	680,000,000	0	100.00%
2	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	17,937,248,000	17,657,432,000	17,657,432,000	0	100.00%
3	WA	Program Dukungan Manajemen	1,305,141,000	1,147,337,000	1,147,337,000	0	100.00%

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entry

Keterangan :

- Data terupdate setiap 3 jam setelah menu di akses terakhir kali
- Pagu Pengadaan (selain dari kode akun : 51 dan taggung NP) otomatis terisi apabila sudah upload RRA.

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian capaian persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai PPMHKP Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Biro Umum dan Barang/ Jasa, Setjen KKP melalui draft Nota Dinas, tanggal 7 April 2026 persentase capaian IKU ini adalah 100 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I sebagai berikut :

1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 12 Februari 2026;
2. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan elektronik oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP tanggal 9 Februari 2026 Perihal : Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026, tanggal 11 Februari 2026;

Memperhatikan Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan elektronik oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP Nomor : 141/SJ.7/PL.410/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 Hal: Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026, bersama ini Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar telah menindaklanjuti dengan Surat Plt. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, Nomor : B.529 /BPPMHKP.MKS/PL.410/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 Perihal : Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan Sebesar 100% Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026;

3. Mengikuti Kegiatan Koordinasi Aplikasi SPSE dan Sirup Lingkup KKP melalui Zoom Meeting “ Monitoring Pencatatan SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2026” tanggal 5 Maret 2026;
4. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP dan input perbaikan data yang selisih pagu pengadaan dengan pagu terumumkan pada tanggal 5 Maret 2026;
5. Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/ Jasa melalui zoom meeting tanggal 16, 17, 25 dan 26 Maret 2026.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2026 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi Anggaran dan realisasi Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026 :

A. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 65.568.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya diblokir sehingga tidak ada realisasi atau Rp 0,- %.

B. Alokasi anggaran awal untuk mendukung Indikator Kinerja (IKU) ini sebesar Rp. 17.565.000.000,- namun telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.269.500.000,- sehingga alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan I tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 12.295.500.000,- yang terdiri dari :

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Efisiensi	Efisiensi	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	3989.PDC.002, D Pengujian Mutu Hasil Perikanan	365.000.000	255.500.000	109.500.000	31.197.050
	- Belanja Barang Persediaan Bahan Baku	291.500.000	182.000.000	109.500.000	31.197.050
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.500.000	73.500.000	-	-
2.	3989.RAL.001, Sarana Pengujian Mutu	7.200.000.000	2.372.000.000	4.828.000.000	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Lab.)	5.700.000.000	1.622.000.000	4.078.000.000	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Sarana Pendukung Lab.)	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	-
3.	3989.RBQ.001, Prasarana Pengujian Mutu	10.000.000.000	9.668.000.000	332.000.000	527.361.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdiri dari :				
	- Konstruksi Bangunan Gedung Laboratorium.	8.739.000.000	8.739.000.000	-	-
	- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Laboratorium	680.000.000	528.000.000	152.000.000	527.361.000
	- Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium	395.200.000	395.200.000	-	-
	- Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium	185.800.000	5.800.000	180.000.000	-
	Jumlah (1+2+3+)	17.565.000.000	12.295.500.000	5.269.500.000	558.558.050

Pada Triwulan I 2025 Indikator Kinerja (IKU) ini realisasi anggaran 0 % karena anggaran diblokir tidak bisa direalisasikan dan jika dibandingkan pada Triwulan I 2026 IKU ini realisasi anggaran sebesar **Rp. 558.558.050,-** dengan persentase 4,54 %, dan persentase realisasi mengalami kenaikan sebesar 4,54 %.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebesar 99,06 % jika dibandingkan dengan pada Triwulan I Tahun 2026 Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebesar 100,00 %, persentase realisasi IKU ini mengalami kenaikan sebesar 0,94 %

Kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Negara, dimana sebagai negara dengan luas wilayah laut yang mencapai dua pertiga dari total luas wilayah, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang sangat melimpah.

Salah satu sumber daya alam yang paling bernilai adalah hasil perikanan, yang tidak hanya berperan sebagai sumber protein hewani utama bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi jutaan orang

Untuk itu pengelolaan sektor kelautan dan perikanan harus tetap dioptimalkan dalam rangka memastikan sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dan diperlukan upaya yang sangat serius dalam pengelolaannya

(KKP) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor ini, tentunya memerlukan anggaran yang tidak kecil, mengingat luasnya wilayah perairan serta kompleksitas permasalahan di sektor tersebut.

Menghadapi tantangan besar terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas di tengah kebutuhan yang semakin besar. Sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang serba sulit, pemerintah sering kali terpaksa melakukan efisiensi anggaran, yang berpotensi berdampak pada berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Di sisi lain, efisiensi anggaran yang dilakukan dengan tepat dapat memaksimalkan dampak positifnya tanpa mengorbankan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Efisiensi anggaran pemerintah tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sektor elautan dan perikanan, namun semua itu bukan berarti membuat program pengembangan dan pemberdayaan sektor ini berjalan ditempat atau malah berhenti.

Sektor kelautan dan perikanan dengan ruang lingkup yang sangat luas memiliki beragam kompleksitas permasalahan di dalamnya.

- Penangkapan Ikan;
- Budidaya Perikanan;
- Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- Penataan Ruang Laut;
- Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan;
- Pengendalian dan Penjaminan Mutu Produk Perikanan;
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Di sektor Kelautan dan Perikanan :

Seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, tentunya tidak berlebihan jika banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

Anggaran yang terbatas tentu akan mempengaruhi berbagai program yang telah direncanakan, mulai dari pengelolaan sumberdaya , penguatan pengawasan sumber daya hingga pembangunan infrastruktur kelautan yang sangat dibutuhkan.

Namun, disisi lain kita juga harus menyadari bahwa anggaran yang tidak efisien akan memperburuk masalah yang ada. Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang dilakukan secara bijak harus mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah tanpa mengorbankan program prioritas serta tujuan jangka panjang.

1. Penurunan Kualitas Program : Salah satu dampak utama dari efisiensi anggaran yang diterapkan secara drastis adalah penurunan kualitas program yang ada. Efisiensi anggaran berpotensi mengurangi jumlah atau cakupan program, serta menurunkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dapat merugikan sektor ini dalam jangka panjang
2. Keterbatasan Infrastruktur : Infrastruktur kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan, sarana pengolahan produk, dan fasilitas pengawasan, membutuhkan investasi yang signifikan. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan keterbatasan dana untuk membangun atau memelihara infrastruktur yang sangat penting ini, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan sektor ini

3. Sumber Daya Manusia : Pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan memerlukan dana yang cukup untuk pelatihan, pendidikan, dan penelitian. Efisiensi anggaran yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada para masyarakat pelaku industri perikanan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada produktivitas dan kualitas hasil perikanan.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/SIRUP;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan tranparansi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- | |
|--|
| - Potensi masalah : Kesalahan Input data relatif tinggi pada pada aplikasi SIRUP |
|--|

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Melakukan pemutakhiran data SIRUP jika ada revisi DIPA/ RKA-KL. - Verifikasi data SIRUP dilakukan oleh Kasubag Umum dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). - Validasi data SIRUP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Perubahan atau Revisi Kegiatan dan Anggaran (Revisi POK) telah disampaikan oleh bagian Program ke Operator/ Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui chat Whats App (WA).	Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Makassar, 13 April 2026
Penanggung jawab Indikator Kinerja,



Karwit, S.Pi

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TRIWULAN I - 2026

SAPUP LKPP : 01-04-2026

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN

TAHUN ANGGARAN : 2026

K/L/PD:	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Satuan Kerja:	Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
PA/KPA	Mohammad Zamrud, S.Pi., MP 196710021992032001

Data yang terlampir pada bentuk ini dipaparkan secara anonim oleh SARP pada tanggal 01-04-2020 15.30.30. Berkas ini berisi data publikasi Rencana Umum Pengadaan yang telah direvisi melalui surat. Untuk pengisian dokumen ini, per yang masih berupa draft. Untuk melihat publikasi yang telah diserahkan dan telah berkarya, silakan kunjungi link ini <http://dpp.kemendagri.go.id/infopublikasi/hasildata/submit/14017> dan klik Daftar Riwayat yang ada pada halaman tersebut untuk melihat publikasi yang terlampir.

1. Paket Penyedia

1.1. Paket Penyedia Terumumkan

No	Regulasi	Kode BGR	Barang Paket	Sumbu Data	Ukuran	Keterangan	Persentase Pengisian	Pagu
1	Dukungan Manajemen Internal (Lengkap) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	04524547	Barang Bahan	AP/BL AP/BL	Makassar (Kota)	Volume 10 Paket TIGRIL Ya 1. Penggantian / perbaikan 1. PKT. @ 500.000 2. ATK @ 500.000	Pengadaan Langsung	5.207,00
2	Dukungan Manajemen Internal (Lengkap) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	04519632	Barang Bahan	AP/BL	Makassar (Kota)	Volume 12 Paket TIGRIL Ya 1. Konsumsi perjalanan / penggantian komputer 11. PKT. @ 30.000	Pengadaan Langsung	480,00
3	Dukungan Manajemen Internal (Lengkap) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	04519190	Barang Bahan	AP/BL AP/BL	Makassar (Kota)	Volume 2 Paket TIGRIL Ya 1. Perbaikan 1. PKT. @ 3.000.000 2. Perbaikan penggantian 1. PKT. @ 1.350.000	Pengadaan Langsung	2.880,00
4	Dukungan Manajemen Internal (Lengkap) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	04524906	Barang Barang Pemakaian Barang Konsumsi	AP/BL	Makassar (Kota)	Volume 12 Paket TIGRIL Ya 1. ATK dan komputer supplies 12. BLN. @ 500.000	Pengadaan Langsung	6.000,00
5	Dukungan Manajemen Internal (Lengkap) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	04535161	Barang Barang Pemakaian Barang Konsumsi	AP/BL AP/BL	Makassar (Kota)	Volume 14 Paket TIGRIL Ya 1. Komputer supplies 12. BLN. @ 275.000 2. Perbaikan Marchet Tampung Kassa 12. BLN. @ 175.000	Pengadaan Langsung	9.000,00
6	Dukungan Manajemen Internal (Lengkap) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	04522539	Barang Barang Pemakaian Barang Konsumsi	AP/BL AP/BL	Makassar (Kota)	Volume 24 Paket TIGRIL Ya 1. ATK 12. BLN. @ 500.000 2. Komputer supplies 12.	Pengadaan Langsung	12.000,00

Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Balai Besar Kuantitas Nelayan Pengerikan Mutu, Dan Keasmanan Hasil Perikanan Nelayan

GROUP LKFP : 01-04-2020

7	Dukungan Manajemen Internal Lengkap: Badan Pengawasan dan Pengawasan Mutu Hasil Penelitian Dan Perkiraan	60303580	Bekasw Jassa Laksana	APBN	Makassar (Kudu)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Rencana Jassa Laksana 1. Semangat kolaborasi dan Daya Teroristik Program di 30.000.000	Pengadaan Langsung	30.000.000
8	Dukungan Manajemen Internal Lengkap: Badan Pengawasan dan Pengawasan Mutu Hasil Penelitian Dan Perkiraan	60223143	Bekasw Jassa Probo	APBN APBN	Makassar (Kudu)	Volume: 2 CM dan 1 OU TKDN: Ya 1. Hutan-hutan Rukunawati 2. CM, di 40.000.000 3. Hutan-hutan Nancawati (Pengadaan 1 unit di 1.000.000)	Pengadaan Langsung	1.000.000
9	Dukungan Manajemen Internal Lengkap: Badan Pengawasan dan Pengawasan Mutu Hasil Penelitian Dan Perkiraan	60730755	Bekasw Regerikan Perkembangan	APBN APBN	Makassar (Kudu)	Volume: 10 Unit TKDN: Ya 1. Bekasw Regerikan Perkembangan Pengadaan: 57500 Kondisi: 100.000.000 2. Bekasw Regerikan Perkembangan: 57500 Kondisi: 100.000.000 3. Bekasw Regerikan Perkembangan: 57500 Kondisi: 100.000.000	Pengadaan Langsung	14.000.000
10	Dukungan Manajemen Internal Lengkap: Badan Pengawasan dan Pengawasan Mutu Hasil Penelitian Dan Perkiraan	60358111	Bekasw Regerikan Perkembangan	APBN APBN APBN APBN APBN APBN	Makassar (Kudu)	Volume: 30 (10.000.000) TKDN: Ya 1. Regerikan Regerikan Perkembangan: 30.000.000 2. Regerikan Regerikan Perkembangan: 30.000.000 3. Regerikan Regerikan Perkembangan: 30.000.000 4. Regerikan Regerikan Perkembangan: 30.000.000 5. Regerikan Regerikan Perkembangan: 30.000.000 6. Regerikan Regerikan Perkembangan: 30.000.000 7. Regerikan Regerikan Perkembangan: 30.000.000	Pengadaan Langsung	114.000.000

Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Sosial Negara Kemerdekaan Baru Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pemeriksaan Makroskopis

11	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	6803773	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	A/PBN, A/PBN, A/PBN, A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 30 unit dan 1 Tahun TKDN: Ya 1. Pemeliharaan Personal Computer Notebook (30, Unit, @ 200.000) 2. Pemeliharaan Genset Merk 1000 Watt (1 Unit, @ 1.500.000) 3. Pemeliharaan Printer (25, Unit, @ 100.000) 4. Pemeliharaan AC split (1 Tahun, @ 5.500.000) 5. Pemeliharaan Maintenance alat laboratorium (1 Tahun, @ 25.729.000)	Pengadaan Langsung	51.429.000
12	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	6803880	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	A/PBN, A/PBN, A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 16 Unit TKDN: Ya 1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Bata 4 x 5 Unit @ 15.500.000 - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Bata 4 Double (Jendel = 1 unit @ 17.000.000) - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Bata 2 x 5 Unit @ 840.000	Pengadaan Langsung	98.745.000
13	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	68034005	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos-Posal	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 12 Bulan TKDN: Ya 1. Pengiriman dan pengiriman barang dan dokumen dinas (12, BLN, @ 140.000)	Pengadaan Langsung	1.680.000
14	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	6803887	Konsumsi Kantor, Pengemudi dan Praktek Bakti	A/PBN, A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 1 Tahun dan 60 Bulan TKDN: Ya Belanja Jasa Lainnya 1. Uang Lembur dan Uang Makan lembur P.J.P 1 Tahun @ 15.000.000 2. P.J.P 5 orang x 15 hari 60 bulan @ 3.880.000	Pengadaan Langsung	267.200.000

Keterangan Keluaran Dan Perikanan: Hasil Besar Karantina dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Mekasar

15	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	62231001	Langganan air	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 12, BLN TKDN: Ya 1. Langganan air (12, BLN, @ 1000.000)	Pengadaan Langsung	12.000.000
16	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	62230999	Langganan jasa internet	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 12 Bulan TKDN: Ya Langganan jasa internet	Pengadaan Langsung	54.408.000
17	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	6803821	Langganan Listrik	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 12, BLN TKDN: Ya 1. Langganan Listrik (12, BLN, @ 22.750.000)	Pengadaan Langsung	285.000.000
18	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	62231030	Langganan Telepon	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 12, BLN TKDN: Ya 1. Langganan Telepon (12, BLN, @ 1000.000)	Pengadaan Langsung	12.000.000
19	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	64646278	Pen-Bender Udara	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 1 Tahun TKDN: Ya 1. Belanja Barang Operasional Lainnya - Pen. Kendaraan 5 Unit dan Baga Tol Kog. Kantor TKDN: Ya 1. Belanja Barang Operasional Lainnya - Pen. Kendaraan 5 Unit x 150.000 - Baga Tol Kogasan Kantor 15 Unit x 165.000	Pengadaan Langsung	5.075.000
20	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	64660674	Pemrosesan Gedung dan Bangunan	A/PBN, A/PBN, A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 1 Tahun TKDN: Ya 1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Berlingkar (Gedung Selandi) 1 Tn @ 42.309.000 - Pemeliharaan Gedung Bangunan Laboratorium Berlingkar (Gedung Selandi) 1 Tn @ 40.000.000 - Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor (Gedung Selandi) 1 Tn @ 8.000.000	Pengadaan Langsung	90.769.000

Keterangan Keluaran Dan Perikanan: Hasil Besar Karantina dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Mekasar

21	Dukungan Manajemen Internal Langkah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Dan Perikanan.	68033615	Pembelian/ Jasa Delegasi Misi Tim	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 12 BLN TKDN: Ya 1. Belanja Barang Operasional Lainnya @ 4.500.000	Pengadaan Langsung	54.000.000
22	Manajemen Mutu.	68038615	Belanja Bahan	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 1 Paket TKDN: Ya 1. Paket Pengangkutan (1, Pkt, @ 3.500.000)	Pengadaan Langsung	3.500.000
23	Manajemen Mutu.	68035208	Belanja Jasa Lainnya	A/PBN, A/PBN, A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 3 Paket dan 4 OH TKDN: Ya 1. Biaya Pembelian (3, Paket, @ 10.000.000) 2. Biaya Akreditasi (4, OH, @ 3.500.000) 3. Biaya Tahunan (1, Paket, @ 1.500.000) 4. Up. Profesional/ Up. Benda (1, Paket, @ 10.000.000)	Pengadaan Langsung	35.500.000
24	Manajemen Mutu.	68038647	Belanja Jasa Lainnya	A/PBN, A/PBN, A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 2 Paket dan 6 OH TKDN: Ya 1. Biaya Tahunan (1, PKT, @ 1.500.000) 2. Biaya Akreditasi (6, OH, @ 3.500.000) 3. Biaya Pembelian (1, Paket, @ 5.500.000)	Pengadaan Langsung	28.000.000
25	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan.	68700198	Pembiayaan Pembangunan Gedung Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan Berarif Internasional Wajah Timur	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 1 Paket TKDN: Ya Membangun Jasa Konsultasi Konstruksi Pembiayaan Pembangunan Gedung Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan Berarif Internasional Wajah Timur	Sekolah	680.000.000
26	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan.	68036548	Belanja Bahan	A/PBN	Mekasar (Kota)	Volume 1 Paket TKDN: Ya 1. Belanja Pengangkutan Mutu Hasil Perikanan Domestik (1, Paket, @ 700.000)	Pengadaan Langsung	700.000

Keterangan Keluaran Dan Perikanan: Hasil Besar Karantina dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Mekasar

13	Pengadaan dan Pengerahan Mutu Hasil Kuis dan Perkuliahan	64087318	Belanja Bahan	APBN APBN	Makassar (Kota)	Volume 01 Paket TKDN: Ya 1. Peningkatan perilaku akademik kemampuan penalaran kognitif (1, PKT, @ 1.000.000) 2. Keaslian sistem penalaran mutu dan kemampuan hasil perkuliahan (50, PKT, @ 10.000)	Pengadaan Lampung	3.000.000
14	Pengadaan dan Pengerahan Mutu Hasil Kuis dan Perkuliahan	64541980	Belanja Bahan	APBN	Makassar (Kota)	Volume 1 Paket TKDN: Ya Peningkatan kegiatan akademik kuis dan perkuliahan CPNS (1, PKT, @ 1.000.000)	Pengadaan Lampung	1.000.000
15	Pengadaan dan Pengerahan Mutu Hasil Kuis dan Perkuliahan	66087331	Belanja Bahan	APBN	Makassar (Kota)	Volume 1 Paket TKDN: Ya 1. Peningkatan perilaku akademik kemampuan penalaran kognitif (1, PKT, @ 1.000.000)	Pengadaan Lampung	1.000.000
16	Pengadaan dan Pengerahan Mutu Hasil Kuis dan Perkuliahan	64541788	Belanja Bahan	APBN	Makassar (Kota)	Volume 1 Paket TKDN: Ya 1. Bahan pendukung perkuliahan kuis dan perkuliahan CPNS (1, PKT, @ 1.100.000)	Pengadaan Lampung	1.100.000
17	Pengadaan dan Pengerahan Mutu Hasil Kuis dan Perkuliahan	64085334	Belanja Barang-Persediaan Bahan Baku	APBN	Makassar (Kota)	Volume 10 Paket TKDN: Ya 1. Bahan uji laboratorium mutu hasil perkuliahan (10, pkT, @ 20.100.000)	Pengadaan Lampung	201.000.000
18	Pengadaan dan Pengerahan Mutu Hasil Kuis dan Perkuliahan	64086071	Belanja Jasa Lainnya	APBN	Makassar (Kota)	Volume 4 Paket TKDN: Ya Riset pengujian (4, PKT, @ 1.500.000)	Pengadaan Lampung	6.000.000

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Besar Karantina Negeri, Persampahan Mula Dan Rasmantan Hasil Perikanan Mekar

Total	16.465.799.000
-------	----------------

1.2. Draft Paket Penyedia

No.	Regulasi	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pembayar Penyedia	Page
Total								8

SiRUP>

2. Paket Swakelola

2.1. Paket Swakelola Terumumkan

No.	Regulasi	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Page
Total							

2.2. Draft Paket Swakelola

No.	Regulasi	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Page
Total							

SiRUP>

3. Paket Penyedia Dalam Swakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan

No.	Regulasi	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pembayar Penyedia	Page
Total								8

3.2. Draft Paket Penyedia Dalam Swakelola

No.	Regulasi	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pembayar Penyedia	Page
Total								8

SiRUP>

1. Foto Dokumentasi Kegiatan : Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 12 Februari 2026



2. Berkas pendukung kegiatan: Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan eletronik oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP Perihal : Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS Nomor 141/SJ.7/PL.410/2026 Yth. : 1. Sekretaris Inspektoral Jenderal 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 5. Sekretaris Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 6. Kepala Biro Urusan, Sekretariat Jenderal 7. Kepala Loka Pengawasan Kelautan Perikanan 8. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan 9. Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar 10. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura 11. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Dari Lampiran Hal Tanggal Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sesuai berkas Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026 9 Februari 2026 Selubungan dengan kewajiban satuan kerja dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 pada website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas kami sebelumnya nomor B.135/SJ.7/PL.410/2026 tanggal 23 Januari 2026, diampikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumumkan RUP pada website SIRUP per tanggal 30 Januari 2026 sebagaimana ketentuan tercantum dalam Surat Sekretaris Utama Lembaga	2 Kabupaten Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LAPP) nomor 1159/SE/01/2025 tanggal 19 Januari 2026; 2. Tanggal 11 (sebelas) satuan kerja dengan status RUP Terumumkan Tidak 100% (selah Kurang atau Lebih Terumumkan) sebagaimana terlampir; 3. Berdasarkan point 2, diimbau agar Satuan segera membuat surat justifikasi penjelasan terkait selah Persentase RUP Tahun Anggaran 2026 Kurang atau Lebih Terumumkan yang diujikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa paling lambat tanggal 11 Februari 2026. Surat tersebut merupakan data dukung yang akan diampikan kepada LAPP sebagai dokumen verifikasi atas keseragaman persentase RUP Terumumkan yang tidak mencapai 100% di dalam website SIRUP, untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi: Sri M. Fachrizal Herlambang (HP : 081230729029 atau Sri Tejo (HP : 0816400996), Ety Yuliantono (HP : 081290742698). Demiakan diampikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. s.d. Sekretaris Jenderal Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa  Teguh Wibisono Tembusan: Sekretaris Jenderal
---	---

Lampiran 1
Nomor: 141/SL.7/PL.410/1/2026
Tanggal: 11 Februari 2026

Daftar Saluran Kerja yang Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan status
Setelah Terumunkan (Perumunkan) dan 100% per tanggal 01 Januari 2026

No	Saluran Kerja	Anggaran 2025	Anggaran 2026	Status	Anggaran 2026	Anggaran 2026
1	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
2	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
3	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
4	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
5	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
6	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
7	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
8	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
9	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
10	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
11	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
12	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
13	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
14	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
15	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
16	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
17	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
18	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
19	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
20	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
21	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
22	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
23	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
24	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
25	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
26	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
27	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
28	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
29	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
30	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
31	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
32	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
33	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
34	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
35	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
36	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
37	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
38	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
39	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
40	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
41	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
42	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
43	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
44	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
45	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
46	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
47	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
48	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
49	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
50	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
51	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
52	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
53	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
54	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
55	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
56	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
57	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
58	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
59	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
60	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
61	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
62	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
63	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
64	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
65	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
66	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
67	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
68	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
69	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
70	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
71	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
72	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
73	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
74	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
75	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
76	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
77	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
78	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
79	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
80	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
81	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
82	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
83	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
84	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
85	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
86	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
87	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
88	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
89	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
90	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
91	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
92	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
93	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
94	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
95	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
96	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
97	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
98	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
99	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000
100	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	1.000.000

Disamping ini ada lampiran yang terdapat anggaran artikel lainnya yang ada di dalam dan tidak terdapat (SLK), dan lain-lain dan lain-lain.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR
JALAN DIRAJA NOMOR 34 MAKASSAR 90012
TELEPON (0411) 4611562, 4611563, 588130, FAKS (0411) 533138
LAMAR balai.makassar@kpp.go.id

Nomor : B.525/BPPM-RUP.MKS/PL.410/1/2026 11 Februari 2026
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumunkan Sebesar 100%
Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026

Yth. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Merindakanjuki Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor
141/SL.7/PL.410/1/2026 tanggal 9 Februari 2026, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Pada awal tahun anggaran 2026, Balai PPM-RUP Makassar telah mengumumkan
RUP tahun 2026 pada aplikasi SRUP LKPP sebesar 100%.
2. Karena adanya revisi anggaran terkait efisiensi/blokir, maka dilakukan generasi
terhadap aplikasi SRUP sehingga RUP yang diumumkan akan mencapai 100%
(100.00%).
3. Kekurangan persentase RUP yang diumumkan tersebut dikarenakan harga pagu
pengadaan yang tidak dibayar yang diumumkan, sedangkan anggaran yang dibayar
tidak diumumkan.
4. Bersama ini kami sampaikan kertas kerja perhitungan RUP tahun 2026 dengan
 rincian:
Pagu Pengadaan Rp. 19.146.141.000,-
Pagu Terumunkan Rp. 13.592.326.000,-
Selain Pagu Pengadaan dan Pagu Terumunkan Rp. 5.643.813.000,-

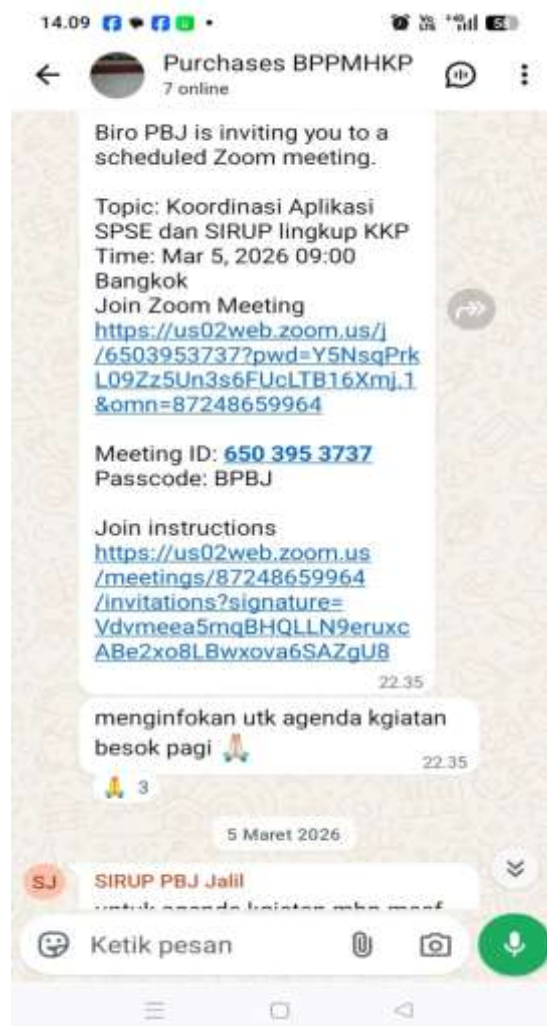
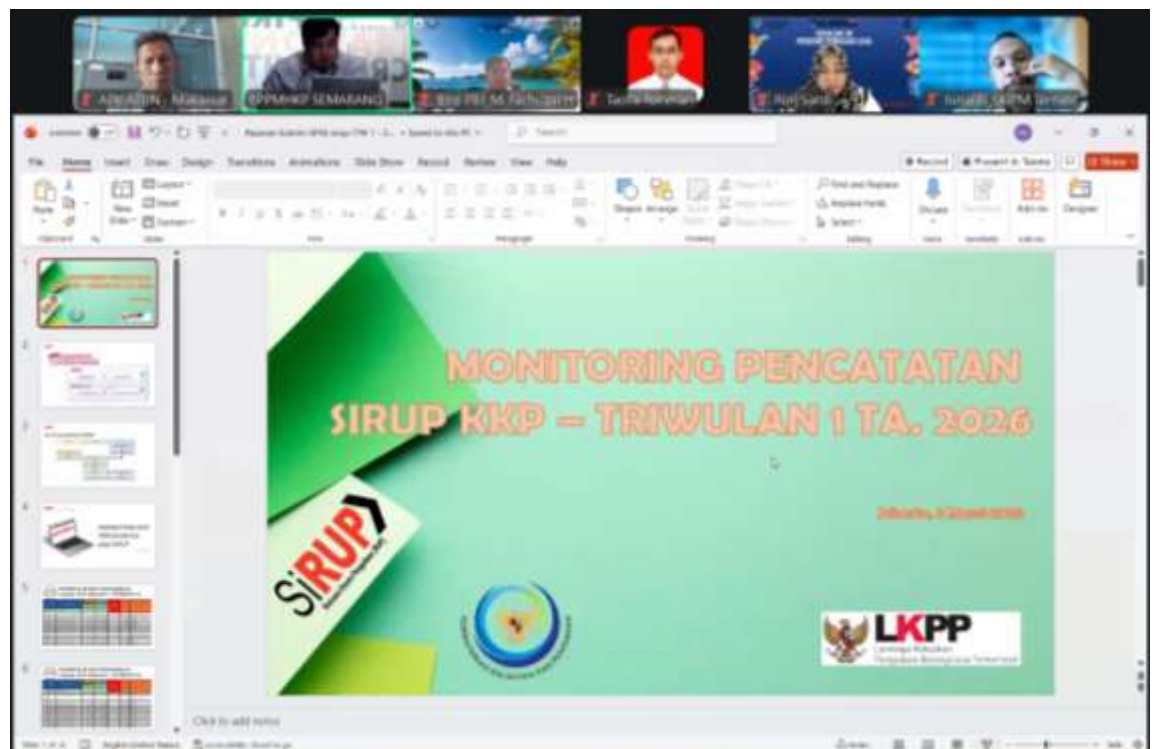
Demiikian justifikasi kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pl. Kepala Balai PPM-RUP Makassar,

Muhammad Zamrud

RUP (Rencana Umum Pelaksanaan)		RUP (Rencana Umum Pelaksanaan)		RUP (Rencana Umum Pelaksanaan)	
No	Saluran Kerja	Anggaran 2025	Anggaran 2026	No	Saluran Kerja
001-001	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-001	Saluran Kerja
001-002	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-002	Saluran Kerja
001-003	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-003	Saluran Kerja
001-004	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-004	Saluran Kerja
001-005	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-005	Saluran Kerja
001-006	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-006	Saluran Kerja
001-007	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-007	Saluran Kerja
001-008	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-008	Saluran Kerja
001-009	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-009	Saluran Kerja
001-010	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-010	Saluran Kerja
001-011	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-011	Saluran Kerja
001-012	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-012	Saluran Kerja
001-013	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-013	Saluran Kerja
001-014	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-014	Saluran Kerja
001-015	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-015	Saluran Kerja
001-016	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-016	Saluran Kerja
001-017	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-017	Saluran Kerja
001-018	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-018	Saluran Kerja
001-019	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-019	Saluran Kerja
001-020	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-020	Saluran Kerja
001-021	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-021	Saluran Kerja
001-022	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-022	Saluran Kerja
001-023	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-023	Saluran Kerja
001-024	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-024	Saluran Kerja
001-025	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-025	Saluran Kerja
001-026	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-026	Saluran Kerja
001-027	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-027	Saluran Kerja
001-028	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-028	Saluran Kerja
001-029	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-029	Saluran Kerja
001-030	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-030	Saluran Kerja
001-031	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-031	Saluran Kerja
001-032	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-032	Saluran Kerja
001-033	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-033	Saluran Kerja
001-034	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-034	Saluran Kerja
001-035	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-035	Saluran Kerja
001-036	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-036	Saluran Kerja
001-037	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-037	Saluran Kerja
001-038	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-038	Saluran Kerja
001-039	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-039	Saluran Kerja
001-040	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-040	Saluran Kerja
001-041	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-041	Saluran Kerja
001-042	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-042	Saluran Kerja
001-043	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-043	Saluran Kerja
001-044	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-044	Saluran Kerja
001-045	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-045	Saluran Kerja
001-046	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-046	Saluran Kerja
001-047	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-047	Saluran Kerja
001-048	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-048	Saluran Kerja
001-049	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-049	Saluran Kerja
001-050	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-050	Saluran Kerja
001-051	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-051	Saluran Kerja
001-052	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-052	Saluran Kerja
001-053	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-053	Saluran Kerja
001-054	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-054	Saluran Kerja
001-055	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-055	Saluran Kerja
001-056	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-056	Saluran Kerja
001-057	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-057	Saluran Kerja
001-058	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-058	Saluran Kerja
001-059	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-059	Saluran Kerja
001-060	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-060	Saluran Kerja
001-061	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-061	Saluran Kerja
001-062	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-062	Saluran Kerja
001-063	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-063	Saluran Kerja
001-064	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-064	Saluran Kerja
001-065	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-065	Saluran Kerja
001-066	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-066	Saluran Kerja
001-067	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-067	Saluran Kerja
001-068	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-068	Saluran Kerja
001-069	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-069	Saluran Kerja
001-070	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-070	Saluran Kerja
001-071	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-071	Saluran Kerja
001-072	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-072	Saluran Kerja
001-073	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-073	Saluran Kerja
001-074	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-074	Saluran Kerja
001-075	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-075	Saluran Kerja
001-076	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-076	Saluran Kerja
001-077	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-077	Saluran Kerja
001-078	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-078	Saluran Kerja
001-079	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-079	Saluran Kerja
001-080	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-080	Saluran Kerja
001-081	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-081	Saluran Kerja
001-082	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-082	Saluran Kerja
001-083	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-083	Saluran Kerja
001-084	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-084	Saluran Kerja
001-085	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-085	Saluran Kerja
001-086	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-086	Saluran Kerja
001-087	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-087	Saluran Kerja
001-088	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-088	Saluran Kerja
001-089	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-089	Saluran Kerja
001-090	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-090	Saluran Kerja
001-091	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-091	Saluran Kerja
001-092	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-092	Saluran Kerja
001-093	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-093	Saluran Kerja
001-094	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-094	Saluran Kerja
001-095	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-095	Saluran Kerja
001-096	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-096	Saluran Kerja
001-097	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-097	Saluran Kerja
001-098	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-098	Saluran Kerja
001-099	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-099	Saluran Kerja
001-100	Saluran Kerja	1.000.000	1.000.000	001-100	Saluran Kerja

3. Foto Dokumentasi Kegiatan : Mengikuti Kegiatan Koordinasi Aplikasi SPSE dan Sirup Lingkup KKP melalui Zoom Meeting “ Monitoring Pencatatan SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2026” tanggal 5 Maret 2026.



4. Foto Dokumentasi Kegiatan : Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP dan input perbaikan data yang selisih pagu pengadaan dengan pagu terumumkan pada tanggal 5 Maret 2026.



5. Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/ Jasa melalui zoom meeting tanggal 16, 17, 25 dan 26 Maret 2026. Surat Undangan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/Jasa dan Foto Zoom Meeting



7. Berkas pendukung “ Draff Nota Dinas Capaian IKU RUP TW I 2026 Lingkup KKP “

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. :

1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Daya Saling Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari Hal :

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
2. Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 7 April 2026

Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah keharusan hukum bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/instansi daerah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 156 (seratus lima puluh enam) satuan kerja Pengelola DIPA Aktif dan tersebar pada 10 (sepuluh) Unit Kerja Eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan kegiatan identifikasi belanja pengadaan yang dicatatkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Target dari kegiatan tersebut adalah memperoleh persentase pengumuman RUP atau RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP 100% sebagaimana hal tersebut telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi *mandatory* penilaian.

2

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik
Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

4

Lampiran 2
Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026
Tanggal : 7 April 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP	STATISTIK MONITOR	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONITOR)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TERUMUMKAN	PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
01	SEKRETARIAT JENDERAL		470.008.437,000	470.008.437,000			
1	622006	Balai Pengadaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14.473.800,000	14.473.800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622061	BIRO UMUM SETIEN KAP	447.234.322,000	447.234.322,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	600006	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.300.305,000	8.300.305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP	STATISTIK MONITOR	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONITOR)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304.871.258,000	304.871.258,000			
1	627506	BALAI BESAR KPM DAN KHP MAKASSAR	19.464.769,000	19.464.769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	667610	BALAI KPM DAN KHP BALIKPAPAN	1.143.921,000	1.143.921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KPM DAN KHP LAHPLUNG	1.628.385,000	1.628.385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KPM DAN KHP AMBON	1.339.462,000	1.339.462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KPM DAN KHP BANGKARASIR	1.057.310,000	1.057.310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Indeks)
Nama Timja	:	Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan	:	Triwulan I 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Indeks)

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	3,5								3,5
Realisasi	3,92								
%Capaian	112								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14 . Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuASAN masyarakat) melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana. Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu: - Laporan hasil uji mutu produk perikanan - Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) - Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) - Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) - Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$S = X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana df = 1 dan $\alpha = 5\% = 0.05$
P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5)
N = Jumlah Populasi
d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$$S = \underline{46.092} = 42.766 \approx 43$$

IFUSDATIN, IKKP, 2023

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	16	240	148	1400	302
25	20	250	152	1500	306
30	24	260	156	1600	310
35	28	270	159	1700	313
40	32	280	162	1800	317
45	36	290	166	1900	320
50	40	300	169	2000	322
55	44	310	173	2100	327
60	48	320	177	2200	331
65	52	330	181	2300	334
70	56	340	186	2400	338
75	60	350	191	2500	341
80	64	360	196	2600	346
85	68	370	201	2700	348
90	72	380	205	2800	351
95	76	390	210	2900	354
100	80	400	214	3000	357
110	88	410	217	3100	361
120	96	420	226	3200	364
130	104	430	234	3300	367
140	112	440	242	3400	368
150	120	450	248	3500	370
160	128	460	254	3600	375
170	136	470	260	3700	377
180	144	480	265	3800	379
190	152	490	269	3900	380
200	160	500	274	4000	381
210	168	510	278	4100	382
		520	285	4200	384

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 2.649 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 336 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 368, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

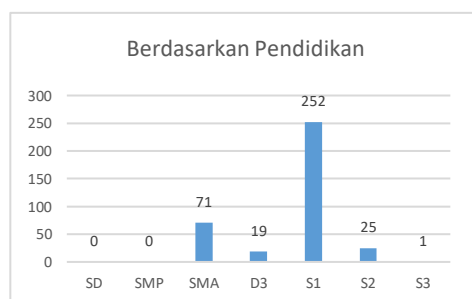
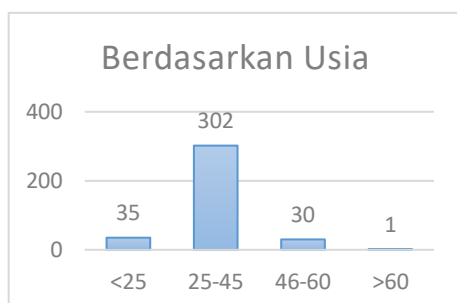
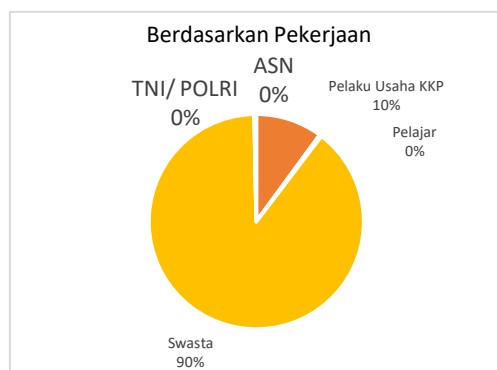
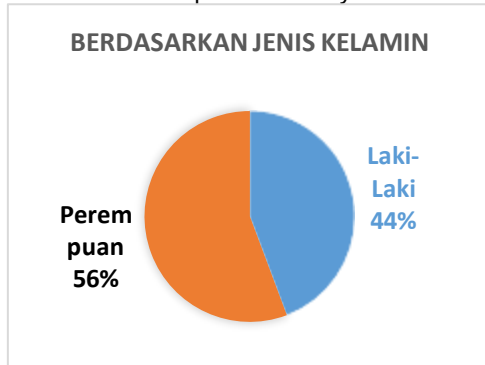
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai PPMHKP Makassar.

Pada triwulan I Tahun 2026 Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan survey terhadap 368 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM **3,92** atau sebesar **97,96** setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 3,5 atau capaian 112%. Apabila data Hasil IKM Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan TW I Tahun 2026, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan I - 2025	Triwulan I - 2026	
1	Kesesuaian persyaratan	3.733	3,935	↑
2	Kemudahan prosedur	3.731	3,921	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.724	3,924	↑
4	Kesesuaian biaya	3.711	3,902	↑
5	Kesesuaian produk	3.741	3,932	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.706	3,905	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.716	3,908	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.746	3,921	↑
9	Kualitas isi/sarana	3.706	3,918	↑
	Nilai IKM	93,32	97,96	
	Indeks		3,92	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2026 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kesesuaian biaya**, unsur **Kompetensi Pelayanan**, serta unsur **Perilaku Pelaksana**. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kesesuaian biaya, unsur Kompetensi Pelayanan, serta unsur Perilaku Pelaksana walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai PPMHKP Makassar menggunakan Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi petugas pelayanan dan pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I pada tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan dari **93,32** menjadi **97,96** atau **(3,93)**. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai PPMHP Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan I Tahun 2025 ke Triwulan I 2026 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai PPMHKP Makassar.

Namun demikian dalam kegiatan survey kepuasan Masyarakat ini masih perlu dioptimalkan karena masih terdapat jenis layanan yang belum disurvei terutama bagian sertifikasi hulu, yaitu Sertifikasi CPIB diatas Kapal, Sertifikasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifikasi CPPIB, Sertifikasi SPDI. Berdasarkan realisasi pada Triwulan I tahun 2026, kegiatan sertifikasi CPIB Kapal dan sertifikasi SPDI seharusnya dapat diperoleh data survey karena telah terlealisasi kegiatan Sertifikasi SPIB Kapal sebanyak 5 kegiatan dan Sertifikasi SPDI 1 kegiatan. Petugas telah mengirimkan link survey, namun kesadaran pelaku usaha dalam pengisian survey masih sangat rendah. Sedangkan Sertifikasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifikasi CPPIB belum ada kegiatan pada triwulan I tahun 2026.

Nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan I Tahun 2026. Balai PPMHKP Makassar telah mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan dalam aplikasi LAPOR!. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu ini membuat masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pada Triwulan I tahun 2026, terdapat konsultasi tatap muka sebanyak 6 kali, 10 kali konsultasi melalui telepon/Whatsapp, dan Media Sosial sebanyak 1 kali. Adapun pengaduan melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 17 kali dengan kategori permintaan informasi. Pengaduan melalui tatap muka, telepon/WhatsApp dan aplikasi LAPOR! tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tuntas.

Pada tanggal 12 Februari 2026, Balai PPMHKP Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-KP/XII/2025. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Kick Off Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Balai PPMHKP Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- 5 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar memberikan penghargaan Petugas Pelayanan Teladan serta Pegawai Teladan untuk semester II tahun 2025;
- 7 Januari 2026, Customer Service melakukan pendampingan Permintaan informasi tentang tata cara pendaftaran nomor registrasi negara mitra pada Aplikasi SIAPMutu serta melakukan pendampingan mulai dari pembuatan akun PPK Online dan pengisian data dukung PPK Online;
- 12 Januari 2026, Surat dari Sekertariat Jenderal KKP mengenai Pemutakhiran informasi publik berkala pada website PPID Tahun 2026;
- 30 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar melaksanakan kegiatan Kampanye Hemat Energi dan Jumat Bersih (ASRI) sebagai wujud komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mendorong penggunaan energi secara bijak, serta untuk pelayanan publik yang prima;
- 4 Februari 2026, Sharing Session Pelaporan Gratifikasi tentang Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan narasumber Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Balai PPMHKP Makassar;
- 5 Februari 2026, Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal melalui Aplikasi SIAP MUTU dihadiri oleh Pengguna Jasa dan Pemangku Kepentingan
- 11 Februari 2026, Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP;
- 12 Februari 2026, Rapat Internal Pembahasan Inovasi Pelayanan Publik Jempol Jala ekspor-Jempol Imut;
- 26 Februari 2026, Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak tahap hulu;
- 26 Februari 2026, Morning Briefing Petugas Pelayanan Dan Inspektur Mutu Balai PPMHKP KKP Makassar.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I 2025 meningkat dari **93,32** menjadi **97,96** atau **(3,93)**. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Diupayakan lebih banyak petambak yang paham terkait budidaya CBIB
- Pelaksanaan uji lab mohon untuk diberitahukan jika sudah selesai
- semoga kedepannya ada layanan call centre seperti app sipetta dulu
- keramahan memberikan pelayanan lebih di tingkatkan lagi

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPPK	12

8.	PJLP	5
	TOTAL	37

Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2026 yaitu 3987.EBA.994.02. A. Operasional Perkantoran Dukungan pelayanan publik sebesar **Rp. 1.200.000,-**. Hingga Triwulan I Tahun 2026, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak **Rp. 100.000,-** dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 1.100.000,-.

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 356,509,000,-. Anggaran dari Tahun 2025 dengan tahun 2026 berbeda sangat signifikan.

Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai PPMHKP Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

ASN BERAHLAK

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai PPMHKP Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

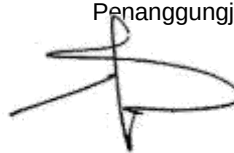
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu yang dilakukan survey kepuasan Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait masukan	Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik.	
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- 20 Januari 2026, Briefing Pagi Petugas Layanan Kantor Balai PPMHKP Makassar tentang sharing informasi mengenai isu-isu global dan meningkatkan pelayanan publik; - Januari s.d Maret 2026, Customer service melakukan asistensi tata cara pendaftaran nomor registrasi negara mitra aplikasi SIAPMUTU kepada UPI. Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan I 2025 dari 93,32 dan Triwulan I 2026 menjadi 97,96.	Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Makassar, Maret 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

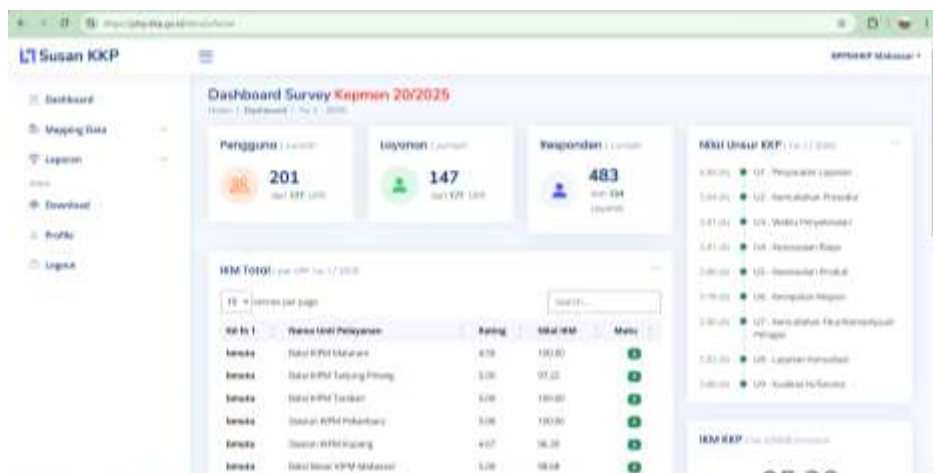


Karwit

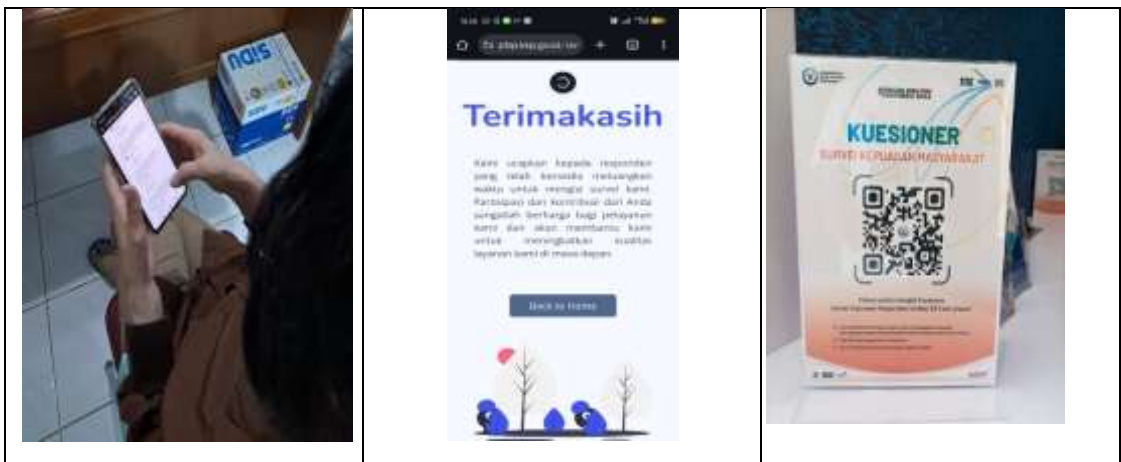
DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2026



Infografis Nilai IKM Triwulan I Tahun 2026



Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP



DOKUMENTASI PENGHARGAAN PETUGAS PELAYANAN TELADAN & PEGAWAI TELADAN SEMESTER II TH 2025



DOKUMENTASI KAMPANYE HEMAT ENERGI & JUMAT BERSIH DI LINGKUNGAN BADAN MUTU KKP MAKASSAR



DOKUMENTASI SOSIALISASI SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) KAPAL MELALUI APLIKASI SIAP MUTU



DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL PEMBAHASAN INOVASI SIJEMPOL



DOKUMENTASI MORNING BRIEFING PETUGAS PELAYANAN DAN INSPEKTUR MUTU BADAN MUTU KKP MAKASSAR



DOKUMENTASI MORNING BRIEFING PETUGAS PELAYANAN DAN INSPEKTUR MUTU BADAN MUTU KKP MAKASSAR



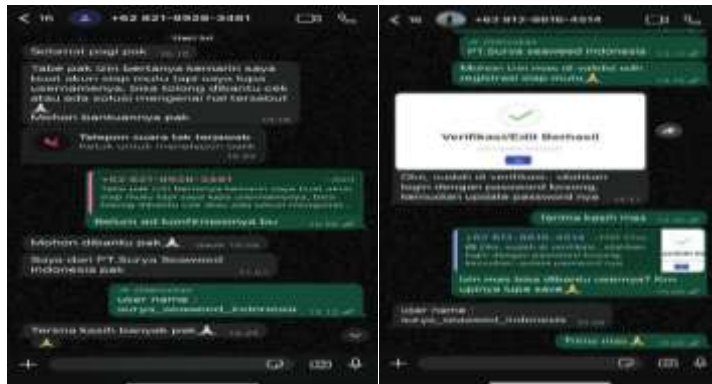
DOKUMENTASI ASISTENSI KEPADA PENGGUNA APLIKASI SIAP MUTU TRIWULAN I TAHUN 2026

Januari 2026

Februari 2026



Maret 2026



DOKUMENTASI POSTINGAN PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PREDIKAT “INFORMATIF”



DOKUMENTASI POSTINGAN

Sharing Session Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

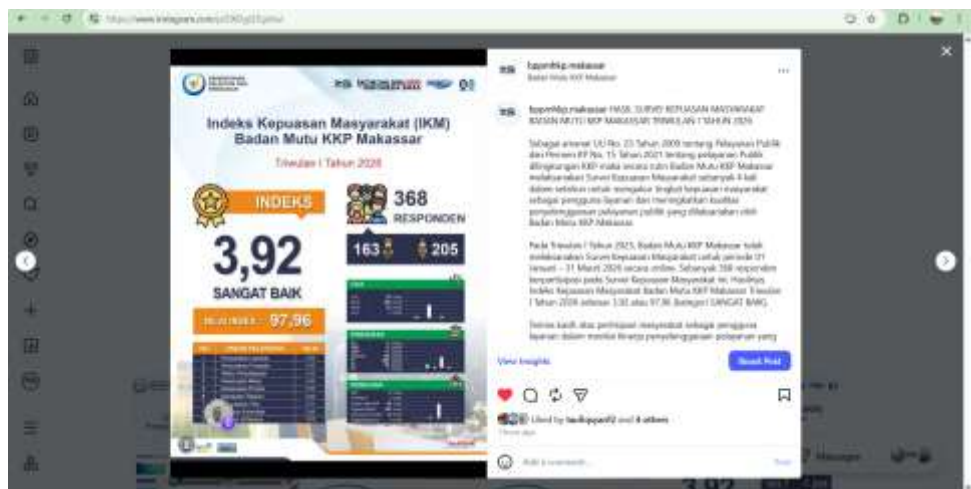


DOKUMENTASI KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPINGAN PRA SKP PADA UMKM PERIKANAN



DOKUMENTASI PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2026

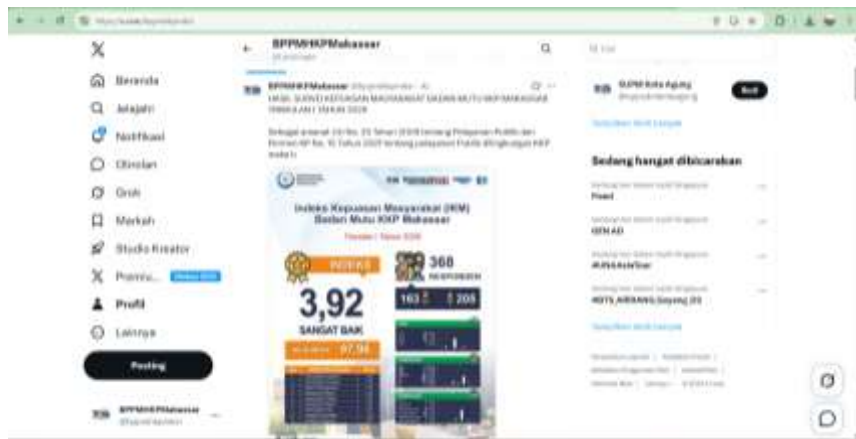
- Instagram



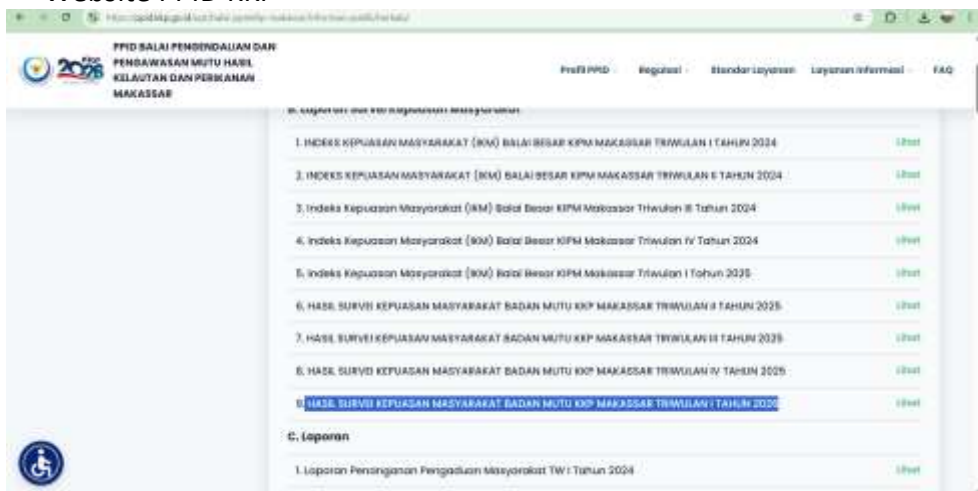
- Facebook



- X/Twitter



- Website PPID KKP



- Website KKP



- WHATSAPP GRUP SIAP MUTU



- Digisign



- SIPPN Menpan
(Tidak Bisa Akses)

PENANGANAN PENGADUAN TRIWULAN I TAHUN 2026



Revisi: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838

[illegible]

